

TESIS

**STUDI MORFOLOGI KAWASAN TEBING TINGGI
KABUPATEN EMPAT LAWANG**



IMAM SUMARWOTO
No. Mhs.: 18.54.02.956/PS/MArs

PROGRAM STUDI MAGISTER ARSITEKTUR
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2020



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ARSITEKTUR

PERSETUJUAN TESIS

Nama : Imam Sumarwoto
Nomor Mahasiswa : 185402956/PS/MTA
Konsentrasi : Arsitektur Digital
Judul Tesis : Studi Morfologi Kawasan Tebing Tinggi Kabupaten Empat
Lawang

Nama Pembimbing I

Tanggal

Tanda Tangan

Dr.Amos Setiadi.ST., MT

13 Januari 2021



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ARSITEKTUR

PENGESAHAN TESIS

Nama : Imam Sumarwoto
Nomor Mahasiswa : 185402956/PS/MTA
Konsentrasi : Arsitektur Digital
Judul Tesis : Studi Morfologi Kawasan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang

Nama Pembimbing

Tanggal

Tanda Tangan

Dr.Amos Setiadi. S.T., M.T

13 Januari 2021

(Pembimbing I)

Ir. Lucia Asdra Rudwiarti, M.Phil., Ph.D

.13 Januari 2021

(Penguji I)

Khaerunissa S.T.,M.Eng.,Ph.D

15 Januari 2021

(Penguji II)

Ketua Program Studi Magister Arsitektur

Khaerunissa S.T.,M.Eng.,Ph.D

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Imam Sumarwoto

NPM : 185402956/PS/MTA

Dengan sungguh-sungguhnya dan atas kesadaran sendiri, menyatakan bahwa,
Tesis yang berjudul:

STUDI MORFOLOGI KAWASAN TEBING TINGGI KABUPATEN EMPAT LAWANG

Benar-benar hasil karya saya sendiri.

Pernyataan, gagasan, maupun kutipan -baik langsung maupun tidak langsung yang bersumber dari tulisan atau gagasan orang lain yang digunakan di dalam tesis ini telah saya pertanggungjawab melalui catatan perut atau pun catalan kaki dan daftar pustaka, sesuai norma dan etika penulisan yang berlaku. Apabila kelak dikemudian hari terdapat bukti yang memberatkan bahwa saya melakukan plagiasi sebagian atau seluruh hasil karya tesis ini, maka saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku di kalangan Program Studi Magister Arsitektur - Program Pascasarjana - Universitas Atma Jaya Yogyakarta; gelar dan ijazah yang telah saya peroleh akan dinyatakan batal dan akan saya kembalikan kepada Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Demikian, surat pemyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan sungguh-sungguhnya, dan dengan segenap kesadaran maupun kesediaan saya untuk menerima segala konsekuensinya.

Yogyakarta, 15 Januari 2021

Yang membuat pernyataan



METERAI
TEMPEL
E82F2AHF807617061
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Imam Sumarwoto

STUDI MORFOLOGI KAWASAN TEBING TINGGI

KABUPATEN EMPAT LAWANG

IMAM SUMARWOTO

185402956

PROGRAM MAGISTER ARSITEKTUR

UNIVERSITAS ATMA JAYA

homedearchitects89@gmail.com

INTISARI

Kawasan Tebing Tinggi merupakan pusat Kota Kabupaten Empat Lawang dahulunya hasil pemekaran wilayah dari Kabupaten Lahat tahun 2007 telah diresmikan dalam Undang-Undang mengenai pembentukan suatu wilayah baik Kabupaten/Kota baru. Secara morfologi mengenai perkembangan kawasan Tebing Tinggi didasari adanya pengaruh yakni periode tahun 1012-1514 dan era Kesultanan Palembang, Pemerintahan Hindia Belanda tahun 1820-1900, Pemerintahan Jepang tahun 1942-1945, Periode Kemerdekaan sampai Pemerintahan Kabupaten Lahat dan Periode tahun 2007-2020 Pemerintahan Kabupaten Empat Lawang sehingga setiap periode perkembangan akan mengenai bentuk morfologi kawasan. Tujuan dalam penelitian mengidentifikasi perkembangan dan faktor-faktor terkait mempengaruhi baik secara faktor fisik dan non fisik dalam setiap periode-periode mengenai kawasan Tebing Tinggi. Metode Penelitian melihat rekam jejak perubahan mengenai kawasan baik secara sinkronik dan diakronik maupun metode kualitatif. Hasil penelitan adanya Fragment cities dan Split Cities mempengaruhi bentuk morfologi kawasan Tebing Tinggi, di setiap periode-periode waktu perkembangan kawasan dipengaruhi faktor ekonomi, politik, sosial budaya, infrastruktur dan ditandai adanya elemen-elemen perkembangan kota mempengaruhi kawasan Tebing Tinggi dalam setiap periode.

Kata Kunci : Tebing Tinggi, Kawasan Kota, Morfologi Kota, Elemen-elemen Kota, Kabupaten Empat Lawang

MORPHOLOGY STUDY OF HIGHEST AREA

DISTRICT FOUR LAWANG

IMAM SUMARWOTO

185402956

PROGRAM MAGISTER ARSITEKTUR

UNIVERSITAS ATMA JAYA

Homedearchitects89@gmail.com

ABSTRACT

Tebing tinggi area is the center of the city of four lawang regency formerly the result of the expansion of the region from lahat regency in 2007 has been inaugurated in the law on the establishment of a good area regency / city new. morphologically on the development of tebing tinggi area based on the influence of the period 1012-1514 and the era of the sultanate of palembang, the dutch east indies government in 1820-1900, the japanese government in 1942-1945, the period of independence to the government of lahat regency and the period of 2007-2020 government of four lawang regency so that each period of development will be about the form of morphology of the region. the purpose of the study was to identify the development and related factors affecting both physical and non-physical factors in each period regarding the tebing tinggi area. the research method looks at the track record of changes regarding the region both synchronously and inkronic and qualitative methods. the results of the research on fragment cities and split cities influenced the morphological form of the tebing tinggi area, in each period of time the development of the region was influenced by economic, political, socio-cultural, infrastructure and marked by the presence of elements of urban development affecting the high cliff area in each period.abstract

Keywords: *Tinggi, City Area, City Morphology, City Elements, Regency of Four Lawang*

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran ALLAH SWT atas nikmat, rahmat dan ridhonya serta sholawat dan salam kepada baginda nabi Muhammad Shalallaahu Alaihi Wassalaam. akhirnya penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan judul **"STUDI MORFOLOGI KAWASAN TEBING TINGGI KABUPATEN EMPAT LAWANG "** ini dengan baik. Untuk itu, maka perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada pembimbing tugas akhir, Bapak **Dr.Amos Setiadi. S.T., M.T** selaku pembimbing I yang telah membimbing penulis dari awal hingga selesainya penulisan tesis ini. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan agar memperoleh gelar Magister pada Program Pascasarjana, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Tesis ini berisikan penelitian untuk mengetahui morfologi pusat Kota Kabupaten Empat Lawang.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari pihak lain, tesis ini tidak akan selesai. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis secara khusus mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini dari awal hingga akhir:

1. Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan penulis berkat, karunia, dan perlindungan setiap saat ketika mengerjakan tesis ini hingga selesai.
2. Kepada kedua orang tua dan keluarga besar di Kota Palembang telah mendoakan saya.
3. Rektor dan Staff Karyawan Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Ibu Khaerunnisa, S.T., M.Eng., Ph.D. selaku Ketua Program Studi MTA Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan dukungan dalam proses penelitian tesis.
5. Ibu Ir. Lucia Asdra Rudwiarti, M. Phil., Ph.D dan Ibu Khaerunnisa, S.T., M.Eng., Ph.D. sebagai dosen penguji yang juga memberikan masukan yang sangat membangun untuk penulisan ini.

6. Kepada Pemerintahan Pusat Kota Kabupaten Empat Lawang dan Staff yang telah mengizinkan untuk penelitian di kawasan ini sebagai objek penelitian.
7. Terima Kasih kepada Dinas PUPR Kabupaten Empat Lawang yang telah membantu dalam penelitian tesis.
8. Kepada asisten II Bupati Kabupaten Empat Lawang Ir. H. Suharli M. Yamin. M.Si.
9. Kepada Dinas Bappeda Kabupaten Empat Lawang Yulius Sugiantara, S.E, M.Si.
10. Kepada adik saya Ira Wahyu Anggraini S.Pd., M.Pd. telah membantu penelitian ini dan mengkoordinasikan untuk komunikasi dengan Pemerintah Pusat Kota Kabupaten Empat Lawang.
11. Terima Kasih kepada rekan-rekan di magister arsitektur Universitas Atma Jaya Yogyakarta semoga kita bisa membawa nama kampus ke tingkat dunia.
12. Terima Kasih Kota Yogyakarta semoga selalu menjadi Istimewa.

Penulis menyadari akan kekurangan dari penyusunan tesis ini, baik dari segi materi maupun cara penyajiannya, mengingat keterbatasan, pengalaman dan waktu yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, masukan dan kritik yang membangun sangat diharapkan oleh penulis dari para pembaca agar penyusunan berikutnya menjadi lebih baik.

Semoga dukungan beserta doanya selama ini yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT, dan semoga Tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua maupun bagi dunia arsitektur. Aamiin.

Yogyakarta, 15 Desember 2020

Yang membuat pernyataan

Penyusun
Imam Sumarwoto

DAFTAR ISI

INTISARI	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	3
1.3 Tujuan.....	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Keaslian Penelitian.....	5
1.6 Sistem Penulisan	13
BAB II	14
TINJAUAN TEORI	14
2.1 Pengertian Morfologi	14
2.2 Pengertian Kota.....	15
2.3 Faktor Perkembangan Kota	17
2.4 Pengertian Pemekaran Wilayah	19

2.5 Faktor Yang Mempengaruhi Pemekaran Daerah.....	20
2.6 Syarat Pemekaran Daerah.....	21
2.7 Komponen Morfologi.....	21
2.8 Sinkronik dan Diakronik	22
BAB III	24
METODE PENELITIAN	24
3.1 Metode Penelitian	24
3.2 Langkah-Langkah Penelitian	25
3.3 Lokasi Penelitian.....	26
3.4 Bahan dan Alat Penelitian	26
3.5 Metode Pengumpulan Data	27
3.6 Analisa Data Penelitian	28
3.7 Penyajian Hasil Analisis Data.....	29
3.8 Penyusunan Kesimpulan	29
BAB IV	30
TINJUAN KAWASAN PENELITIAN	30
4.1 KABUPATEN EMPAT LAWANG	30
4.1.1 Kedudukan dan Batas Administrasi.....	31
4.1.2 Topografi	32
4.1.3 Keadaan Iklim.....	32
4.1.4 Kedudukan dan Batas Administrasi Kawasan Tebing Tinggi.....	33
4.2 Sejarah Kabupaten Empat Lawang	33

4.3 Perkembangan Kota Kawasan Tebing Tinggi Sebelum dan Setelah Pemekaran	36
4.3.1 Kota Tebing Tinggi Sebelum Pemekaran	36
4.3.2 Kota Tebing Tnggi Setelah Pemekaran.....	37
4.4 Orientasi Tata Kota	44
BAB V.....	46
ANALISIS DAN PEMBAHASAN	46
5.1 Pola Morfologi.....	46
5.1.1 Analisis Bentuk Morfologi	46
5.1.2 Analisis Karakteristik Morfologi Kawasan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang	49
5.1.3 Penggunaan Lahan Kawasan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang	51
5.1.4 Analisis Perubahan Plot-Plot Bangunan Kawasan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang	57
5.1.5 Analisis Pola Jaringan Jalan Kawasan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang	58
5.2 Analisis Faktor Fisik dan Non Fisik.....	61
5.2.1 Analisis Faktor Fisik dan Non Fisik Mempengaruhi Terhadap Perkembangan Kawasan Tebing Tinggi Periode Tahun (1012-1514) Era Kesultanan Palembang Periode Tahun (1830)	61
5.2.2 Analisis Faktor Fisik dan Non Fisik Mempengaruhi Terhadap Perkembangan Kawasan Tebing Tinggi Pemerintahan Hindia	

Belanda Periode Tahun (1870-1900)	62
5.2.3 Analisis Faktor Fisik dan Non Fisik Mempengaruhi Terhadap Perkembangan Kawasan Tebing Tinggi Pemerintahan Jepang Periode Tahun (1942-1945).....	63
5.2.4 Analisis Faktor Fisik dan Non Fisik Mempengaruhi Terhadap Perkembangan Kawasan Tebing Tinggi Periode Kemerdekan - Pemerintahan Kabupaten Lahat.....	64
5.2.5 Analisis Faktor Fisik dan Non Fisik Mempengaruhi Kawasan Perkembangan Kawasan Tebing Tinggi Periode Tahun (2007-2020)	66
5.3 Faktor Yang Mempengaruhi Terbentuknya Kabupaten Empat Lawang dari Kabupaten Lahat	73
BAB VI	76
KESIMPULAN	76
6.1 KESIMPULAN.....	75
6.2 SARAN.....	81
6.2.1 Saran Terhadap Pemerintah Pusat Kota Kabupaten Empat Lawang	81
6.2.2 Saran Terhadap Masyarakat Pusat Kota Kabupaten Empat Lawang	81
DAFTAR PUSTAKA	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan	4
Gambar 2.1 Jenis Jaringan Jalan.....	18
Gambar 3.1 Peta Administrasi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan	30
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan	34
Gambar 4.2 Peta Topografi Kabupaten Empat Lawang	36
Gambar 4.3 Peta Administrasi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan	37
Gambar 4.4 Peta Jaringan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.....	50
Gambar 5.1 Peta Perkembangan Kawasan Tebing Tinggi.....	46
Gambar 5.2 Inti Morfologi dan Bentuk Morfologi Kawasan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang	48
Gambar 5.3 Peta Penggunaan Lahan dan Zonasi Kawasan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.....	51
Gambar 5.4 Peta Rencana Pengembang Kawasan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang	54
Gambar 5.5 Peta Penggunaan Lahan Sebelum dan Setelah Pemekaran Kawasan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang	55

Gambar 5.6 Peta Plot Bangunan Sebelum dan Setelah Pemekaran	
Kawasan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang	57
Gambar 5.7 Peta Pola Jaringan Sebelum dan Setelah Pemekaran	
Kawasan Tebing Tinggi	59
Gambar 5.8 Peta Pola Jaringan Setelah Pemekaran Kawasan	
Tebing Tinggi Tahun (2009-2015)	59
Gambar 5.9 Peta Pola Jaringan Kawasan Tebing Tinggi Tahun	
(2015-2020)	60
Gambar 5.10 Peta Perkembangan Kawasan Tebing Tinggi Kabupaten	
Empat Lawang Periode Tahun (1012-1514) - Era	
Kesultanan Palembang	61
Gambar 5.11 Peta Perkembangan Kawasan Tebing Tinggi Kabupaten	
Empat Lawang Periode Tahun (1870-1900) - Era	
Pemerintahan Hindia Belanda	63
Gambar 5.12 Peta Perkembangan Kawasan Tebing Tinggi Kabupaten	
Empat Lawang Periode Tahun (1942-1945) - Era	
Pemerintahan Jepang	64
Gambar 5.13 Peta Perkembangan Kawasan Tebing Tinggi Periode	
Kemerdekaan Sampai Pemerintahan Kabupaten	
Lahat	65
Gambar 5.14 Peta Perkembangan Kawasan Tebing Tinggi Periode Tahun	
2007 Pemekaran dari Kabupaten Lahat	67

Gambar 5.15 Peta Perkembangan Periode Tahun (2012-2020)

Kawasan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang 67

Gambar 5.16 Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Pusat Kota Kabupaten

Empat Lawang Tahun (2007-2019)..... 69

Gambar 5.17 Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Pusat Kota Kabupaten

Empat Lawang Tahun (2007-2019)..... 70

Gambar 6.1 Peta Perkembangan Kawasan Tebing Tinggi Sebelum

dan Setelah Pemekaran 75



DAFTAR TABEL

Tabel 1.5 Matriks Keaslian Penelitian	5
Tabel 4.1 Tinggi Wilayah Di Atas Permukaan Laut (DPL) IbuKota Kabupaten Ke IbuKota Kecamatan di Kabupaten Empat Lawang .	31
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Empat Lawang	38
Tabel 5.1 Bentuk Morfologi Kawasan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.....	47
Tabel 5.2 Karakteristik Wilayah Kawasan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.....	49
Tabel 5.3 Zonasi Penggunaan Lahan di Kecamatan Tebing Tinggi.....	53
Tabel 5.4 Perkembangan Jumlah Penduduk di Kecamatan Tebing Tinggi Sebelum dan Setelah Pemekaran Tahun 2007-2019	69
Tabel 5.5 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kecamatan Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2007-2019	70
Tabel 5.6 Elemen-Elemen Perkembangan Kawasan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang	72
Tabel 6.1 Elemen-Elemen Perkembangan Kawasan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang	82

BAB 1

PENDAHULUAN

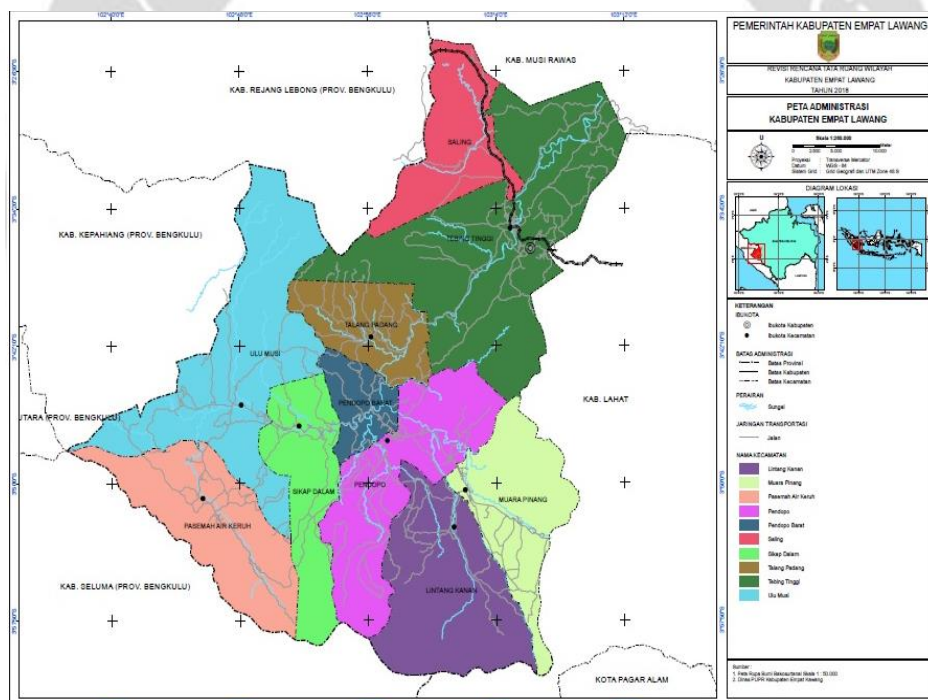
1.1 Latar Belakang

Salah satu cara untuk mengembangkan suatu daerah atau wilayah ialah melalui pemekaran diatur dalam Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah (Daerah, 2014). Hal ini Undang-undang sebagaimana dimaksud dengan cakupan wilayah, batas, ibukota dan kewenangan urusan pemerintahan yang dimaksud dengan penunjukan pejabat kepala daerah, DPRD serta perangkat daerah. Berdasarkan menurut (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, 2018). Tentang terbentuknya Kabupaten Empat Lawang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup seperti ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, kependudukan secara geografis dan pertahanan keamanan. Di Indonesia sudah terjadi dari zaman era orde lama sampai era reformasi sampai saat ini pemekaran telah dilakukan dari sabang sampai marauke dikarenakan otonomi daerah dengan tujuan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sehingga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pendapat ekonomi daerah.

Pada implementasinya, sejak tahun 2000 terjadi pemekaran wilayah dari Provinsi Bangka Belitung yang awalnya berasal dari Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya, Provinsi Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Maluku dan Papua juga telah melalui administrasi pemekaran yang telah dibentuk oleh pemerintah pusat. Dari kesekian Provinsi berada di Indonesia, Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan tingkat pemekaran yang cukup pesat. Adapun nama-nama kabupaten pemekaran di Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

1. Periode tahun 2001 Kota Pagar Alam, Kota Prabumulih dan Kota Lubuk Linggau.
2. Periode tahun 2002 Kabupaten Banyuasin.
3. Periode tahun 2003 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Komering Ulu Timur.
4. Periode tahun 2007 Kabupaten Empat Lawang.
5. Periode tahun 2012-2013 yakni Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Murata.

Fokus pada penelitian ini terletak pada kawasan Tebing Tinggi merupakan sebagai pusat Kota dan wilayah hasil dari induk wilayah Kabupaten Lahat periode waktu tahun 2007. Asal – usul terjadinya Kabupaten Empat Lawang merupakan hasil dari aspirasi masyarakat difasilitasi oleh forum perjuangan masyarakat lintang atau (FPMLIVL) terdiri dari adanya tokoh adat, masyarakat dan tokoh agama (Statistik, 2020). Setelah adanya proses dan bersepakata terbentuknya wilayah baru yakni kawasan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang merupakan sebagai pusat kota (Khairullah & Cahyadin, 2006). Semenjak terjadi pemekaran Kabupaten Empat Lawang terus melakukan pembangunan dari sebelumnya sampai saat ini di bidang kesehatan, pendidikan sampai infrastruktur sebagai kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Empat Lawang mengeluarkan RTRW sebagai startegi pembangunan kabupaten berdasarkan (Dalam Negeri, 2012). Pasal 1 angka 12 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.



Gambar 1.1 : Peta Administrasi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Empat Lawang, 2018

Kabupaten Empat Lawang memiliki 10 kecamatan sebagai berikut :

1. Kecamatan Tebing Tinggi.
2. Kecamatan Saling.
3. Kecamatan Talang Padang.

4. Kecamatan Ulu Musi.
5. Kecamatan Pasemah Air Keruh.
6. Kecamatan Sikap Dalam.
7. Kecamatan Pendopo Barat.
8. Kecamatan Pendopo.
9. Kecamatan Lintang Kanan.
10. Kecamatan Muara Pinang.

Penelitian ini lebih merujuk pada kawasan Kecamatan Tebing Tinggi mempunyai luas wilayah 362,93 km² di kabupaten Empat Lawang. Pemilihan kecamatan tersebut dikarenakan mempunyai 26 desa saat ini, berdasarkan (Lawang, 2019). Wilayah kabupaten saat ini 81 % rata-rata mempunyai kawasan hutan selain itu juga warga setempat kebanyakan bercocok tanaman seperti Kelapa Sawit, Karet, Kopi, Duku, Durian dan Lada sebagai roda perekonomian setiap desa di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.

Pusat pemerintahan berada di desa Tanjung Beringi dan desa Talang Banyu berdasarkan hasil wawancara dengan (Ir. H. Suharli M Yamin, 2020) kedepan Kabupaten Empat Lawang akan mengembangkan zona pertanian sebagai penggerakan roda perekonomian masyarakat saat ini dalam tahap proses perencanaan seluas 84 Hektar di peruntukan sebagai tempat pelatihan pertanian maupun akan membangun universitas yang akan dirujuk untuk pembangunan kedepannya mengatakan dalam rancangan. Pusat kantor pemerintah akan didirikan kembali seperti kantor bupati maupun kantor yang lain terletak di jalan poros yang menghubungkan Kecamatan Pendopo saat ini dicanangkan sebagai zona kawasan perekonomian.

1.2 Perumusan Masalah

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berada di kawasan Tebing Tinggi sebelumnya merupakan hasil wilayah pemekaran dari induknya kota Lahat namun sekarang menjadi sebuah Kabupaten baru berada di Provinsi Sumatera Selatan. Telah diatur dalam undang-undang mengenai wilayah baru.

- a) Bagaimana perkembangan morfologi kawasan Tebing Tinggi di Kabupaten Empat Lawang sebelum dan sesudah terjadi pemekaran?

- b) Faktor apa yang menjadi dominan baik dari aspek fisik maupun non fisik terbentuk dan mempengaruhi dilihat dari setiap periode perkembangan kawasan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang?
- c) Faktor apa yang mempengaruhi terjadinya terbentuknya Kabupaten Empat Lawang dari Kabupaten Lahat?

1.3 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh morfologi kawasan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, maka dalam penelitian ini mempunyai tujuan yakni :

- a) Mengidentifikasi perkembangan morfologi kawasan Tebing Tinggi di Kabupaten Empat Lawang sebelum dan sesudah terjadi pemekaran.
- b) Mengkaji apa yang menjadi dominan baik dari aspek fisik maupun non fisik terbentuk dan mempengaruhi dilihat dari setiap periode perkembangan kawasan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
- c) Mengidentifikasi apa yang mempengaruhi terjadinya terbentuknya Kabupaten Empat Lawang dari Kabupaten Lahat.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi baik secara praktis maupun kepada pemerintah Kabupaten Empat Lawang yakni :

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap kebudayaan di Kabupaten Empat Lawang serta mendokumentasikan perkembangan morfologi kawasan Tebing Tinggi dan faktor apa yang menjadi dominan perkembangan saat ini.
- b) Hasil dari penelitian diharapkan dapat memperkaya pengetahuan baik mahasiswa, pemerintah dan masyarakat terhadap perkembangan morfologi kawasan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
- c) Diharapkan menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah Kota Kabupaten Empat Lawang dalam upaya kedepannya dapat merencanakan kawasan yang berpotensi baik dari segi perekonomian maupun tentang sejarah terdapat di kawasan Tebing Tinggi.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini dapat dilihat pada table 1.5 menjelaskan tentang penelitian sebelumnya membahas tentang morfologi dan pemekaran sebuah wilayah di Indonesia. Sebagaimana akan dilakukan penelitian pada studi morfologi kawasan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 1.5 Matriks Keaslian Penelitian

No	Judul	Temuan
1	Hakim, A. (2017). Analisis Dampak Pemekaran Daerah Ditinjau Dari Aspek Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. <i>Journal of Chemical Information and Modeling</i> .	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap kinerja perekonomian daerah Kabupaten Kepulauan Meranti setelah pemekaran, dampak pemekaran belum menunjukkan positif dan kualitas pelayanan publik menjadi baik.
2	Hidayati, D. A. (2017). Evaluasi kebijakan pemekaran daerah Kabupaten Lampung Barat. <i>Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan</i> .	Provinsi Lampung Adanya peningkatan setelah pemekaran wilayah terjadi di Kabupaten dan ini berdampak positif bagi masyarakat selain kepada masyarakat PAD pemerintah Kabupaten Lampung Barat meningkat pesat dari tahun 2011-2016 menjadi 4,95% bertujuan kepada perekonomian untuk masyarakat Lampung Barat.
3	Udiarto, A. K. (2015). Karakteristik Pengembangan Wilayah Sebelum dan Sesudah Pemekaran Kabupaten Jayapura. <i>Jurnal Wilayah Dan Lingkungan</i> .121-130	<p>Fenomena pemekaran di wilayah Papua pasca pemerintah orde baru hingga saat ini, isu pemekaran wilayah di Papua disertai isu-isu seputar reformasi, demokrasi, HAM dan keadilan sosial.</p> <p>Provinsi Papua memiliki potensi sangat besar dalam bidang ekonomi dan memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun kondisi geografis tidak mendukung merupakan menjadi salah satu kendala daerah ini untuk dikembangkan dengan cepat. Limitasi kondisi geografi menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan pada Provinsi Papua sehingga tidak merata dalam pembangunan. Dilihat dari segi aspek perekonomian pada Kabupaten di Jayapura berdampak tidak mendukung bagi masyarakat yang berada di kawasan ini dan lapangan pekerjaan tidak mencukupi sedangkan pada aspek sosial tahun 2002 adanya mengalami kecenderungan negatif namun ketika di tahun 2012 mengalami kecenderungan positif terhadap masyarakat.</p>

		<p>Aspek infrastruktur mengalami peningkatan yang baik dari sebelumnya dikarenakan adanya sarana dan prasarana setelah terjadi pemekaran di Kabupaten Jayapura. Berdampak pada pemekaran wilayah di Kabupaten Jayapura yakni :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerataan Pembangunan. 2. Adanya Infrastruktur. 3. Ekonomi. 4. Sosial dan Kependudukan
4	<p>Hamri, E., Putri, E. I. K., Siregar, H. J., & Bratakusumah, D. S. (2016). Kebijakan Pemekaran Wilayah Dan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kota Tasikmalaya. <i>Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik</i>.412</p>	<p>Pada penelitian ini menunjukkan sektor-sektor perekonomian di Kota Tasikmalaya saat ini lebih berkembang dibandingkan daerah <i>hinterland</i>-nya. Terlihat rata-rata indeks diversitas entropi Kota Tasikmalaya (0,85) lebih besar dibandingkan rata-rata nilai entropi wilayah sekitarnya (<i>hinterland</i>) yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Tasikmalaya (0,71). 2. Kabupaten Garut (0,67). 3. Kabupaten Ciamis (0,81). 4. Kota Banjar (0,83). 5. Kabupaten Pangandaran (0,74). <p>Besarnya nilai entropi menunjukkan hasil perekonomian wilayah Kota Tasikmalaya lebih maju dan berkembang.</p>
5	<p>Muqoyyidin, Andik. (2013). Pemekaran Wilayah Dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris Dan Rekomendasi Ke Depan. <i>Jurnal Konstitusi</i>.</p>	<p>Pada dasarnya, pemekaran wilayah merupakan salah satu bentuk otonomi daerah dan merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan karena dengan adanya pemekaran wilayah diharapkan dapat lebih memaksimalkan pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah dengan otonomi daerah itu muncul paradigma terhadap pemekaran wilayah yang dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan, memudahkan pelayanan publik kepada masyarakat, serta percepatan kesejahteraan terhadap masyarakat.</p> <p>Di masa era reformasi sekarang, ruang bagi daerah untuk mengusulkan pembentukan Daerah Otonomi Baru dibuka lebar oleh kebijakan pemekaran daerah berdasar UU No. 22 Tahun 1999. Dengan kebijakan yang demikian ini, kebijakan pemekaran wilayah sekarang lebih didominasi oleh proses politik daripada proses teknokratis. Melihat kebijakan yang tidak sesuai pada aturannya maka kedepannya diperlukan adanya menyangkut perencanaan kelembagaan sebagai tujuan untuk tidak ada lagi permasalahan menyangkut kepada masyarakat dan dapat menjadikan wilayah-wilayah daerah otonomi yang baru sehingga tidak ada lagi setiap daerah, kabupaten dan kota mengalami tidak pemerataan pembangunan.</p>

-
- 6 Carolin Monica Sitompul, Muhammad Sani Roychansyah. (2018) Identifikasi Perkembangan Morfologi Kota lama Semarang. Temu Ilmiah IPLBI.
- Kota merupakan wujud dari pemikiran manusia yang berada didalamnya perkembangan sebuah kota dilatarbelakangi dengan faktor ekonomi, politik, sosial dan budaya Kota lama Semarang mengalami tiga periodisasi terhadap morfologi kota yakni :
1. Periode tahun 1700-1800
Perkembangan kota lama Semarang sejak tahun 1700 hingga awal tahun 1800 dimana saat itu adanya pemerintahan VOC menjadi pemerintahan dimasa lalu. Pada dimasa pemerintahan VOC merujuk kepada sektor perdagangan dikarenakan dekat dengan sungai dan pelabuhan.
 2. Periode tahun 1800-1900
Dimasa tahun 1800 sampai 1900 adanya kota pemerintah dan pemukiman elit bagi orang eropa namun adanya pergeseran disebabkan oleh faktor ekonomi dan politik yang sangat mempengaruhi di Kota lama Semarang dimasa itu.
 3. Periode tahun 1900-2000
Pada masa ini lah eksistensi Kota lama Semarang menurun adanya penjajahan jepang masuk ke Indonesia dimana dulunya pembangunan-pembangunan berubah menjadi alih fungsi bagi tentara Jepang untuk sebagai barak. Pada akhir penjajahan Jepang di Kota Semarang pemerintah pada tahun 2000 menjadikan dan menetapkan sebagai fungsi kawasan pariwisata dan adanya penambahan elemen-elemen yang mendukung untuk di kawasan Kota lama Semarang.
-
- 7 Dinata Aulum, B Ulum. (2019). Morfologi Kawasan Permukiman Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.Seminar Nasional Pembangunan Wilayah dan Kota Berkelanjutan.
- Perkembangan kota yang dinamis mengakibatkan adanya tuntutan akan ruang meningkat terutama peruntukan bagi lahan permukiman, kota yang semakin padat tidak dapat memenuhi kebutuhan bagi masyarakat sehingga berkembang ke wilayah sekitar kota yang dikenal dengan *urban fringe*.
- Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Riau pada kabupaten ini perkembangan sangat pesat di kecamatan Siak Hulu dibandingkan dengan kecamatan lain berada di Kampar.
- Dengan laju pertumbuhan penduduk yang makin tinggi, Kecamatan Siak Hulu dari tahun ke tahun menjadi daerah hunian yang makin padat hal ini lah menjadi permasalahan bagi pemerintah kota sehingga pesatnya perkembangan tidak ada lagi lahan yang dapat digunakan namun kebanyakan disampingkan fungsi lahan menjadi berubah sehingga adanya
-

		perubahan terhadap bentuk morfologi permukiman di Kecamatan Siak Hulu menjadi pola grid dan <i>organic pattern</i> .
8	Andi Rakasiwi.(2014). Dampak Pemekaran Terhadap Pembangunan Daerah Di Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2010-2012.Jom FISIP Vol. 1 No. 2 – Oktober 2014.	<p>Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 tahun 2008 tentang pemerintah menetapkan Kabupaten. Dengan tujuan utama Pekaitan adalah Distrik <i>Redistricting</i> adalah "untuk meningkatkan layanan dan mempercepat pengembangan. Perluasan Kabupaten Pekaitan juga diharapkan bisa menciptakan lokal kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat "melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 2. mempercepat pertumbuhan demokrasi. 3. mempercepat pembangunan ekonomi regional. 4. percepatan area manajemen yanag potensial. 5. meningkat keamanan dan ketertiban. <p>Hasil dari penelitian ini menunjukan adanya dampak positif dan negative terhadap pembangunan, pelayanan publik di Kecamatan Pekaitan Rokan Hilir.</p>
9	Sondarika, Wulan Ratih, Dewi Suryana, Aan. (2017). Dampak Pemekaran Kabupaten Pangadaran Terhadap Potensi Budaya Dan Pariwisata Alam Kabupaten.Jurnal Artefak.	<p>Hasil penelitian potensi budaya di Kabupaten Ciamis sebelum terjadinya pemekaran Kabupaten Pangadaran yaitu,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ronggeng Gunung. 2. Bebegig Sukamantri. 3. Ronggeng Amen. 4. Debus Panjalu. 5. Wayang Landing. <p>Sebagainya untuk pariwisata alam yang memberikan pemasukan paling besar bagi PAD kabupaten Ciamis yaitu wisata alam pantai Pangadaran. Sebagai Potensi budaya dan pariwisata alam kabupaten Ciamis setelah terjadinya pemekaran Kabupaten Pangadaran mengalami perubahan besar terhadap PAD pada Kabupaten Pangadaran.</p>
10	Rendy Sueztra Canaldhy, Bayu Ady Wijaya, M. Imam Akbar Hairi. (2017). Pemekaran Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2016. Jurnal Pemerintah dan Politik Volume 2 No. 1 Januari 2017	<p>Kabupaten Muratara terbentuknya dikarenakan alasan rendahnya kendali administrasi yang sangat meluas sehingga adanya faktor etnisitas dan kesukuan menjadi pendorong dan mempercepat legislatif untuk segera mengesahkan daerah menjadi DOB.</p> <p>Selain itu adanya faktor sumber daya alam yang melimpah dan ini menjadi motif legitimasi dan menjadi keyakinan elit kelak kedepannya Muratara mampu berkembang lebih pesat dari Kabupaten Induknya saat ini. Adapun menjadi faktor dalam pemekaran ini bagaimana kemampuan sumber daya manusia yang</p>

		<p>ada untuk mengelolal dan menjalankan kemampuan membangun ketika dimekarkan menjadi Kabupaten baru.</p> <p>Dalam pembentukan suatu daerah harus diperhatikan berbagi aspek yang terkait dan pendukung terutama sumber daya alam dan sumber daya manusia apabila aspek ini tidak terpenuhi dengan baik maka akan memberikan dampak kepada kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.</p> <p>Secara garis besar Kabupaten Muratara belum memenuhi aspek dan dirasakan belum layak untuk dimekarkan menjadi Kabupaten yang baru di Provinsi Sumatera Selatan dikarenakan akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat tinggal di wilayah ini. Faktor saat ini yang dihadapi Kabupaten ini yakni sumber daya manusia yang belum memadai.</p>
11	<p>Dr Ali, M. Ag. Sitti Mawar, S.Ag., M.H NurdinSyah. (2018). Dampak Pemekaran Daerah Pada Pelayanan Publik Ditinjau Menurut Hukum Indonesia. Jurnal Petita Volume 3 Nomor 2, Januari-Juni 2018</p>	<p>Pemekaran daerah telah lama semenjak disahkannya UU No. 2 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota bertujuan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.</p> <p>Terdapat beberapa alasan kenapa pemekaran daerah saat ini menjadi salah pendekatan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintah daerah dan peningkatan pelayanan publik namun dalam penyelenggaraan ini dijadikan alasan utama dalam pemekaran daerah yaitu adanya kendala geografis, infrastruktur dan sarana yang minim.</p> <p>Menurut sistem hukum di Indonesia mengenai pemekaran wilayah yakni :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperpendek jarak geografis. 2. Adanya sarana dan prasarana. 3. Meningkatkan perekonomian bagi masyarakat. 4. Dalam UU No. 25 Tahun 2009 yang berisi tentang kepatuhan standar pelayanan publik dan Undang-undang tahun 2016 yang mengenai tentang pelayanan publik. <p>Seharusnya kepatuhan pelayanan publik terhadap pemekaran daerah baik provinsi, kabupaten dan kota harus memenuhi mencapai 80 % tingkat pelayanan publik.</p>
12	<p>Ratty Puspitasari. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembentukan Daerah Baru (Studi Kelayakan Secara Administratif Kabupaten Indragiri Selatan) Jom FISIP Vol.1 No.2-Oktober 2014</p>	<p>Luasnya sebuah wilayah pemerintah daerah setingkat dengan kabupaten dan menjadi persoalan sendiri hal pemerataan pelayanan terhadap masyarakat namun kegiatan pemerintah yang terkonsentrasi pada satu wilayah tertentu sangat cenderung membuat akses</p>

pelayanan terabaikan pada daerah tertentu.

Dan ini menjadi permasalahan ketidakadilan dalam pembangunan sarana dan prasarana baik fisik maupun pendidikan masyarakat kondisi seperti akan memicu masyarakat untuk mendapatkan haknya untuk pembangunan yang merata dimana telah disebutkan dalam undang-undang.

Masyarakat Indragiri Selatan mempunyai permasalahan yang terjadi yakni aspek pelayanan dan pemerataan pembangunan yang tidak berdampak positif bagi masyarakat tinggal di wilayah ini sehingga terjadinya pendidikan tertinggal dikarenakan tidak ada fasilitas memadai.

Adanya aspirasi dari masyarakat untuk pemekaran di Kabupaten Indragiri Selatan namun adanya permasalahan dalam pembentukan kabupaten baru ini disebabkan moratorium pemerintah yang menetapkan tidak adanya pemekaran pada jangka waktu yang telah ditetapkan sehingga tidak pemekaran untuk menjadi daerah otonom baru.

-
- 13 Elysa Wulandari, Fahmi Aulia. (2018). Pengaruh Morfologi Kota Terhadap Ekologi Perkapungan Tradisional Di Kota Banda Aceh, Indonesia. Jurnal Arsitektur Zonasi Vol. 1 No.1- Juni 2018

Banda Aceh tdi ujung utara pulau sumatera Semenjak terjadinya bencan tsunami di Aceh tahun 2004 dimana merupakan bencana alam yang terbesar menghancurkan pusat kota sehingga adanya revisi ulang terhadap RTRW di Kota Banda Aceh hingga tahun 2029 digunakan sebagai pendekatan mitigasi bencana alam adanya perubahan orientasi terjadi pada perkampungan sebelumnya ada zona perkebunan namun saat ini menjadi zona muka kampung.

Perkampungan tertua Gampong Lamseupeung ini sebagai kawasan perkampungan tradisional dan kawasan utama kota. Pengaruh morfologi kota Banda Aceh sejalan perubahan sebelum dan sesudah bencana tsunami melanda kota ini mengalami perubahan fiskal yang membentuk kampung kota yang kumuh dan masyarakat yang mulai heterogen hal ini menjadikan identitas kampung tradisional ini telah hilang dari sebelumnya dan perlu dilindungi sebagai identitas Kota Banda Aceh sebagai kota bersejarah.

-
- 14 Rocky Radinal Panduru, Fella Warouw, Verry Lahamedu. (2018). Analisis Morfologi Kota di Kecamatan Malalayang. Jurnal Spasial Vol 5 No. 2, 2018.

Pada dasarnya morfologi kota diamati dari kenampakan fisik yang antara lain tercermin pada sistem jalan-jalan yang ada, blok-blok bangunan terdapat pada wilayah. Morfologi kota dari waktu ke waktu mengalami perubahan sehingga mengalami perubahan dan terus bergerak

		<p>untuk mencari ruang-ruang baru dalam pembentukan wilayah dan ini akan berdampak pertumbuhan ekonomi.</p> <p>Kecamatan Malalayang berada di kota Manado merupakan sebagai pintu masuk jalur penghubung dari Kabupaten lain yang berada di Provinsi Sulawesi Utara. Morfologi kota pada Kecamatan Malalayang setiap tahun mengalami perubahan aspek yang mempengaruhi morfologi kota berdampak penggunaan lahan dikarenakan jumlah penduduk terus meningkat.</p>
15	<p>Falah, M., Lubis, N. H., & Sofianto, K. (2017). Morfologi Kota-Kota Di Priangan Timur Pada Abad Xx – Xxi; Studi Kasus Kota Garut, Ciamis, dan Tasikmalaya. <i>Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya</i>. h9i1.342</p>	<p>Perkotaan merupakan wadah bagi sebuah kawasan untuk melakukan kegiatan utama bagi masyarakat dan memiliki fungsi sebagai kawasan pemukiman perkotaan maupun pelayanan jasa. Hal ini mempengaruhi kota garut, ciamis, taksimalaya, banjar dan Kota parigi Secara geografis Priangan Timur merupakan wilayah paling timur dari sebuah wilayah yang bernama Priangan, munculnya Priangan Timur seiring dengan keruntuhan kerajaan Sunda pada tahun 1579. Wilayah Priangan Timur pernah diduduki pemerintahan VOC dan ini mempengaruhi terhadap kekuatan politik pada masa itu. Morfologi kota yang mempengaruhi kawasan pertumbuhan Kota Garut, Ciamis, dan Tasikmalaya yakni :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tata ruang dan infrastruktur kawasan perkotaan. 2. Simbol pada kawasan perkotaan. <p>Kota Garut, Ciamis, dan Tasikmalaya mempunyai perbedaan terhadap tata ruang kota adapun yang memiliki kesamaan yakni terhadap simbol pada kawasan kota.</p>
16	<p>Greglory, M. M., Jeffrey, I. K., & Judy, O. W. (2016). Morfologi Wilayah Peri Urban Di Kecamatan Pineleng. <i>Spasial Perencanaan Wilayah dan Kota, Volume 3</i>, 254-264</p>	<p>Peningkatan perekonomian dan perkembangan infrastruktur menjadi indikator pada Kota Manado telah mendorong pertumbuhan wilayah di sekitarnya. Dalam beberapa dekade ini perkembangan lahan secara skala besar menjadi salah satu aktifitas yang diminati para pengembang contohnya adanya pembangunan perumahan dekat dengan perbatasan di Kecamatan Pineleng dan ini memberikan peluang untuk penggunaan dan pengembangan lahan skala besar ini mengakibatkan adanya perubahan terhadap karakteristik wilayah.</p> <p>Dari morfologi wilayah Peri Urban di Kecamatan Pineleng faktor yang mempengaruhi perkembangan yakni :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aksesibilitas yang memudahkan bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan. 2. Adanya sarana dan prasarana yang menunjang kehidupan bagi masyarakat di Kecamatan Pineleng. 3. Pemanfaatan bangunan selain tempat tinggal pada sektor non agraris lebih

-
- besar dibandingkan sektor agraris.
4. Sirkulasi terhadap jalan di kecamatan ini menunjukan kenampakan kekotaan.
 5. Pertumbuhan permukiman pada penggunaan menjadi naik dari luas Kecamatan Pineleng.
-

Sumber : Penulis. 2020



1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN TEORI

Menguraikan tentang tinjauan morfologi, pengertian tentang pemekaran, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemekaran sebuah kabupaten, syarat sebuah pemekaran terkait permasalahan objek.

BAB III METODOLOGI

Bab ini berisi tentang terkait metode penelitian data, teknik pengelola data, metode analisi dan memaparkan data.

BAB IV TINJAUAN KABUPATEN EMPAT LAWANG

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan Kabupaten Empat Lawang berada di Tebing Tinggi dan kondisi eksisting kawasan Tebing Tinggi sehingga mendapatkan data dapat diolah dalam pembahasan.

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Menguraikan pembahasan yang membahas hasil penelitian dengan teori terkait serta memaparkan nya dalam bentuk temuan penelitian.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi hasil pembahasan terhadap perkembangan kawasan Tebing Tinggi secara morfologi kawasan sebagai saran dijadikan pertimbangan dan penelitian lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 Pengertian Morfologi

Morfologi dalam arsitektur, merupakan pemikiran tentang bentuk dan struktur ruang dan lingkungan binaan terhadap suatu kawasan dan itu sangat berkaitan merencanakan dan membangun lingkungan secara fungsional terhadap aktivitas manusia dalam pendekatan morfologi terhadap kota merupakan suatu kajian ekspresi bentuk tidak hanya mencakup aspek fisik tetapi juga aspek non-fisik (sejarah, kebudayaan, sosial, dan ekonomi) penduduk yang dapat mempengaruhi perubahan bentuk ruang kota. Melalui pemahaman terhadap morfologi kota, akan didapatkan gambaran fisik arsitektural yang berkaitan dengan sejarah pembentukan dan perkembangan suatu kawasan mulai dari awal terbentuk hingga saat ini dan juga akan diperoleh pemahaman tentang kondisi masyarakatnya.

Dalam morfologi kota merupakan suatu cerminan dari fungsi dan ide-ide perencanaan dan pembangunan di setiap tahapan perkembangannya baik secara proses berdiri maupun membuka bangunan dilingkungan (Krier, 1979). Sedangkan berdasarkan menurut (Lefebvre, 1901-1991). Menyatakan bahwa ruang bukanlah entitas yang netral melainkan ruang sebagai ruang eksistensi sosial dan kelengkapan-kelengkapan ruang beserta penjelasannya.

Selain itu morfologi kota merupakan cabang ilmu geografis dan arsitektur, mempelajari perkembangan bentuk fisik di kawasan perkotaan, yang terkait dengan arsitektur bangunan, dan juga sistem sirkulasi, ruang terbuka, serta prasarana perkotaan khususnya jalan sebagai pembentuk struktur ruang yang utama. Secara garis besar, wujud fisik kota tersebut merupakan manifestasi visual dan parsial yang dihasilkan dari interaksi komponen-komponen penting pembentuknya yang saling mempengaruhi satu sama lainnya (Allain, 2004). Bentuk pola morfologi yang tercipta dari perkembangan kota dapat disebut dengan ekspresi keruangan suatu kota.

Pendekatan dalam morfologi kota dapat dilakukan melalui Tissue Analysis. Ada 3 tahapan dapat dilakukan yakni :

1. Proses dalam konteks ini dijelaskan bahwa munculnya suatu kota tidak terjadi secara langsung, namun membutuhkan suatu proses yang memiliki kurun waktu tertentu. Terdapat suatu perkembangan sejarah yang melatarbelakanginya hingga dapat muncul seperti saat ini.
2. Produk dalam hal ini kota yang ada ada tidak terjadi secara abstrak, namun merupakan hasil dari produk desain massa dan ruang yang berwujud 3 dimensi.
3. Prilaku mempengaruhi terhadap keberadaan ruang dalam konteks masyarakat yang berhuni. Bentuk kota dipengaruhi perpaduan budaya, aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat perubahan prilaku masyarakat disebabkan perkembangan teknologi hal ini menyebabkan berdampak secara kehidupan.

2.2 Pengertian Kota

Kota sebagai pemukiman relative besar, padat dan permanen baik terdiri dari kelompok individu yang heterogen dari segi faktor sosial sehingga tempat berbagai bentuk keanekaragaman banyak hal, strata atau tingkatan masyarakat tergabung menjadi satu tempat dinamakan Kota. Suatu bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non alami dengan gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup besar, dengan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah di belakangnya. Tinjauan di atas masih sangat kabur dalam arti akan sulit untuk menarik batas yang tegas untuk mendefinisi kota dan membedakannya dari wilayah desa apabila menginginkan tinjauan tersebut. Tinjauan di atas merupakan batasan kota dari segi sosial. Dalam perkembangannya, konsep-konsep kota paling tidak dapat dilihat dari 4 sudut pandang, yaitu segi fisik, administratif, sosial dan fungsional.

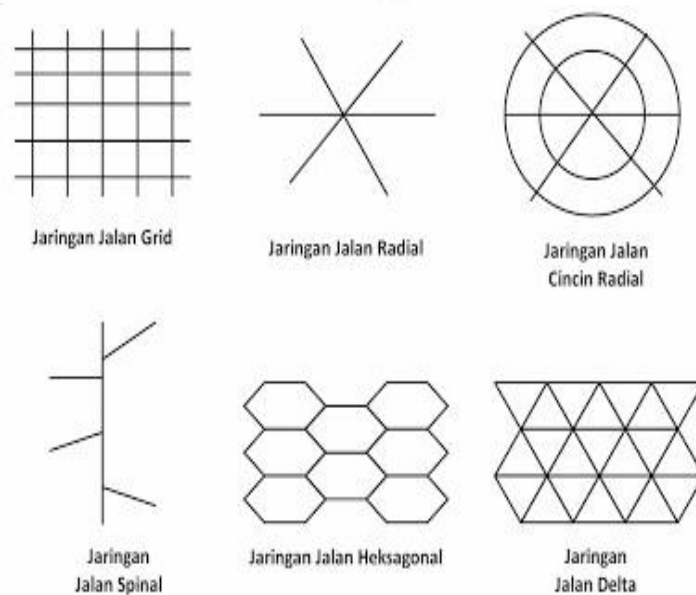
Dengan banyaknya sudut pandang dalam membatasi kota, mengakibatkan pemahaman kota dapat berdimensi jamak dan selama ini tidak satupun batasan tolak ukur kota yang dapat berlaku secara umum atau ditinjau dari segi fisik dan morfologi menekankan pada kenampakan fisik dari lingkungan kota. Menurut (Yunus, 2005) memperkenalkan ada 3 unsur morfologi kota yaitu :

1. Penggunaan lahan

Penggunaan atau pemanfaatan lahan merupakan suatu percampuran yang terkait terhadap berbagai karakteristik kepemilikan, lingkungan fisik sampai kestruktur penggunaan ruang pada suatu wilayah (Kaiser, 1995). Penggunaan lahan tempat atau daerah dimana penduduk berkumpul dan hidup bersama sehingga mereka dapat menggunakan lingkungan sebagai melangsungkan dan mengembangkan hidupnya adapun penggunaan lahan segala campur tangan manusia terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan sehingga pada penggunaan lahan dapat digolongkan berdasarkan adanya kawasan permukiman, ruang terbuka, perkantoran, kawasan komersial dan kawasan industri.

2. Pola-pola jalan dan tipe

Menurut (Morlok, 1978) ada berapa jenis dan pola jalan yang ideal dapat digunakan pada perencanaan kawasan atau telah terbentuknya sejak lama pada sebuah kawasan kota jaringan jalan sangat penting bagi kota apalagi tingkatnya sudah skala besar dikarenakan sebagai penghubung dan jaringan transportasi antar kota, yakni jaringan jalan berbentuk *grid*, radial, cincin radial, Spinal, heksagonal dan delta terdapa pada jaringan jaringan dapat dilihat pada gambar 2.1.



Gambar 2.1 : Jenis Jaringan Jalan

Sumber : Morlok, 1978

3. Karakteristik bangunan

Pada karakteristik bangunan sangat mempengaruhi terhadap kawasan kota sehingga dapat memberikan ciri khas yaitu zona kota dan zona desa menurut (Yunus, 2005) fungsi bangunan yang orientasi kegiatan mengarah kekotaan atau sektor non agraris sedangkan mengarah ke desa selalu dicirikan dengan dominasi fungsi bangunan berorientasi kegiatannya mengarah sektor pertanian.

2.3 Faktor Perkembangan Kota

Perkembangan kota secara umum menurut (Branch, 1995). sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi internal yang menjadi unsur terpenting dalam perencanaan kota secara komprehensif. Namun beberapa unsur eksternal yang menonjol juga dapat mempengaruhi perkembangan kota. Beberapa faktor internal yang mempengaruhi perkembangan kota adalah :

1. Faktor terhadap letak geografis mempengaruhi fungsi dan bentuk fisik kota. Kota yang berfungsi sebagai simpul distribusi, misalnya perlu terletak di simpul jalur transportasi, dipertemuan jalur transportasi regional atau dekat pelabuhan laut. Kota pantai, misalnya akan cenderung berbentuk setengah lingkaran, dengan pusat lingkaran adalah pelabuhan laut.
2. Faktor terhadap letak Topografi merupakan yang mempengaruhi perkembangan suatu kota. Salah satu yang di pertimbangkan dalam kondisi tapak adalah topografi. Kota yang berlokasi didataran yang rata akan mudah berkembang kesemua arah, sedangkan yang berlokasi dipegunungan biasanya mempunyai kendala topografi. Kondisi tapak lainnya berkaitan dengan kondisi geologi daerah patahan geologis biasanya dihindari oleh perkembangan kota.
3. Faktor perkembangan kota dari aspek ekonomi, berarti kota memiliki fungsi sebagai penghasil produksi barang dan jasa, untuk mendukung kehidupan penduduknya dan untuk keberlangsungan kota itu sendiri. Ekonomi perkotaan dapat ditinjau dari tiga bagian yaitu ekonomi publik, ekonomi swasta (privat), dan ekonomi khusus. Ekonomi publik meliputi pelaksanaan pemerintahan kota sebagaimana terlihat pada anggaran pendapatan dan belanja departemen-departemen yang melaksanakannya secara reguler, distrik sekolah, dan distrik khusus yang ditetapkan untuk tujuan-tujuan

tertentu. Ekonomi swasta terdiri atas berbagai macam kegiatan yang diselenggarakan oleh perusahaan swasta, mulai dari perusahaan industri dan komersial yang besar hingga kegiatan usaha yang independen atau seorang profesional yang menyediakan berbagai bentuk jasa.

4. Perkembangan sebuah kota dilihat dari segi sejarah dan kebudayaan juga mempengaruhi karakteristik fisik dan sifat masyarakat kota. Kota yang sejarahnya direncanakan sebagai ibu kota kerajaan akan berbeda dengan perkembangan kota yang sejak awalnya tumbuh secara organisasi. Kepercayaan dan kultur masyarakat juga mempengaruhi daya perkembangan kota. Terdapat tempat-tempat tertentu yang karena kepercayaan dihindari untuk perkembangan tertentu.
5. Faktor dari segi umum dalam perkembangan sebuah kota terdapat pada jaringan jalan, penyediaan air bersih berkaitan dengan kebutuhan masyarakat luas, ketersediaan unsur-unsur umum akan menarik kota kearah tertentu.
6. Perkembangan sebuah kota di lihat dari segi aspek politik, sangat mempengaruhi perkembangan kota baik dari segi administrasi ataupun pembangunan sebuah kota.

Pertumbuhan dan perkembangan kota pada prinsipnya menggambarkan proses berkembangnya suatu kota dipengaruhi adanya faktor sosial ekonomi dan budaya. Elemen-elemen perkembangan sebuah kota dilihat dari segi dua aspek dari sifat permanen dari sebuah kota yang dipertimbangkan sebagai (Rossi, 1982) :

1. Elemen yang bersifat mendorong kemajuan (*Propelling elements*) sebagai elemen dari bentuk masa lalu yang masih dialami hingga sekarang (*Propelling permanences*).
2. Elemen patologis (*Pathological elements*) sebagai elemen yang bersifat terisolasi Aldo Rossi menuliskan bahwa kota memiliki kecenderungan untuk terbagi menjadi 3 fungsi utama yaitu perumahan, aktivitas yang tetap, dan sirkulasi. Fungsi aktivitas tetap diartikan sebagai fungsi-fungsi yang bersifat publik dan melayani sebuah kota. Fungsi ini juga meliputi elemen primer kota. Keberadaan elemen primer kota bukan hanya sekedar merupakan

monumen melainkan lebih jauh lagi sebagai elemen yang mampu mempercepat proses urbanisasi dalam suatu kota. Area perumahan memang jarang memiliki karakter sebagai *propelling elements* atau elemen primer yang dapat berfungsi sebagai generator atau akselerator dalam perkembangan suatu kota, namun dalam analisis evolusi, area perumahan dihubungkan dengan elemen- elemen primer atau *propelling elements* yang terkait dalam pertumbuhannya.

2.4 Pengertian Pemekaran Wilayah

Pemekaran sebuah wilayah sudah terjadi sejak lama di Negara Republik Indonesia dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan mengarah Undang-Undang tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah. Pada pasal 2 menyebutkan pemekaran daerah/wilayah yakni :

1. Kesejahteraan masyarakat.
2. Demokrasi terhadap kehidupan masyarakat.
3. Pertumbuhan ekonomi yang stabil.
4. Mengelola pendapatan daerah dan potensi.
5. Menjadikan kawasan nyaman dan keamanan terhadap masyarakat.
6. Kerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah.

Menurut (Ratnawati, 2005) sebuah daerah untuk sebagai salah satu kunci dari keberhasilan otonomi daerah. Menurut dalam buku bertulis tentang pemikiran tentang otonomi daerah (Abdurrahman S. , 1987). Penataan wilayah juga mencakup kemampuan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan secara efektif dan efisien dengan menggunakan segala potensi dan sumber daya yang tersedia. Berdasarkan pernyataan tersebut, konsep penataan wilayah sebenarnya dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu :

1. Pemekaran.
2. Penggabungan terhadap wilayah.
3. *Regrouping* sub-sub wilayah dalam daerah yang bersangkutan (misalnya *regrouping* kecamatan dan/desa dalam kabupaten).

Pemekaran daerah sebagaimana dimaksud dalam (Daerah, 2014) Pasal 33 ayat (1) yaitu pemekaran daerah berupa Pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru atau penggabungan

bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam 1 (satu) daerah provinsi. Ada 5 faktor yang harus diperhatikan dalam pembentukan/pemekaran suatu wilayah yaitu :

- a. Luas daerah suatu wilayah sedapat mungkin merupakan suatu kesatuan dalam perhubungan, pengairan dan dari segi perekonomian dan juga harus diperhatikan keinginan penduduk setempat, persamaan adat istiadat serta kebiasaan hidupnya.
- b. Pembagian kekuasaan pemerintahan dalam pembentukan/pemekaran hendaknya diusahakan agar tidak ada tugas dan pertanggungjawaban kembar dan harus ada keseimbangan antara beratnya kewajiban yang diserahkan dengan struktur di daerah.
- c. Jumlah penduduk tidak boleh terlampau kecil.
- d. Pegawai daerah sebaiknya mempunyai tenaga-tenaga professional dan ahli. Keuangan daerah yang berarti terdapat sumber-sumber kemakmuran yang dimiliki oleh daerah itu sendiri.

2.5 Faktor Yang Mempengaruhi Pemekaran Daerah

Dasar pertimbangan pembentukan daerah adanya ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah maupun pertimbangan lain. Sebagai daerah otonom baru dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan dalam PP Nomor 129 Tahun 2000 berisi tentang yakni :

1. Kemampuan Politik.
2. Potensi Daerah.
3. Sosial Budaya.
4. Sosial Politik.
5. Jumlah Penduduk.
6. Luas Daerah.
7. Pengaruh adanya pemekaran wilayah secara kawasan otonomi daerah baru.

Pemekaran wilayah merupakan hasil dari pendapat dan aspirasi masyarakat ingin membentuk daerah otonom sendiri dengan alasan ingin peningkatan kesejahteraan masyarakat akan tetapi usulan ini sering kali dimanfaatkan untuk kepentingan dan mendapatkan status kekuasaan atas pembentukan daerah otonom baru faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu :

1. Pemerataan dan Keadilan.
2. Kondisi geofrafis yang luas dan pelayanan masyarakat tidak efektif dan efisien.
3. Perbedaan *civil Society* berkembang di masyarakat.
4. Insentif Fiskal.
5. Status Kekuasaan.

2.6 Syarat Pemekaran Wilayah

Adapun berdasarkan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, 2007) dan persyaratan dasar kewilayahan (Daerah, 2014). dinyatakan bahwa meliputi syarat :

- a) Luas wilayah minimum ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan yang di atur di dalam peraturan pemerintah.
- b) Jumlah penduduk ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan yang diatur di dalam peraturan pemerintah.
- c) Secara batasan-batasan administratif wilayah melalui peta.
- d) Ruang wilayah mempunyai cakupan setidaknya lima daerah Provinsi , Kabupaten/Kota sampai tingkat Kecamatan.
- e) Memiliki umur terhadap mengenai Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan minimal 10 tahun sedangkan mengenai umur terhadap Kabupaten yakni 7 tahun sejak terbentuknya wilayah baru.

2.7 Komponen Morfologi

Komponen morfologi ada 4 bagian yang perlu untuk diperhatikan karena ini berkaitan dengan morfologi kota (Carmona, 2003) yakni:

1. Menurut (Kaiser, 1995) dikarenakan ini dianggap sebagai generator sistem aktivitas menentukan pola dan arah pertumbuhan kawasan mengenai tata guna lahan sangat mempengaruhi perwujudan fisik kawasan terutama yang terkait dalam pengembangan kawasan terbangun dan tidak terbangun.
2. Struktur bangunan mengarah dari tipologi dalam sebuah analisis morfologi dan dapat dibahas dalam dua aspek, baik secara penataan dan bangunan arsitektur. Pada penataan massa bangunan ini akan terkait dengan kepadatan dan tapak bangunan sementara bangunan arsitektur lebih dalam mempunyai makna.

3. Plot atau dimensi membahas pemanfaatan lahan sehingga merujuk pemanfaatan dan pengelolaan ruang.
4. Jaringan jalan sebagai jalur penghubung, jalan sangat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas fungsi kawasan, jaringan jalan sebagai dari ruang publik dianggap generator inti dari kawasan perkotaan atau jantungnya perkotaan (Hillier B, 1984).

Adapun komponen morfologi secara morfologi menggunakan ada 4 aspek analisis (Moudon, 1997), antara lain :

1. Elemen desain yaitu mengenai tentang adanya desain seperti ruang penutup atap, buka-buka efektif dan ruang terbuka terhadap desain.
2. Struktur internal hubungan antara elemen desain yang merujuk pada sebaran ruang terbuka hijau.
3. Hubungan antara bentuk dan kegunaan tentang dimensi dan proporsi ruang beserta komponen fisik yang dapat mengakomodasi fungsi ruang.
4. Aspek formal atau perwujudan fisik yaitu bagaimana desain bangunan dan kawasan secara fisik mencerminkan makna dan kegunaan.

2.8 Sinkronik dan Diakronik

Menurut (Kuntowijoyo, 2008) Sinkronik dan Diakronik, pada dasarnya sinkronik mempelajari peristiwa sejarah dengan dari waktu ke waktu dengan ini bertujuan dapat mengkaji lebih dalam terhadap peristiwa secara meluas. Pada akhirnya seorang sejarawan akan melihat dari segi aspek ekonomi, politik, sosial budaya dan ideologi. Sedangkan cara berpikir diakronik. Adapun ciri-ciri cara sinkronik dan diakronik yakni :

1. Sinkronik
 - Mempelajari secara kehidupan sosial.
 - Cara berpikir sinkronik digunakan para ilmu-ilmu sosial seperti geografi, sosiologi, politik, ekonomi, antropologi dan arkeologi.
2. Diakronik
 - Digunakan dalam ilmu sejarah.
 - Menguraikan proses perubahan yang terus berlangsung dari waktu ke waktu dalam kehidupan masyarakat.
 - Mempelajari kehidupan sosial secara memanjang berdimensi waktu.

Menurut (Suprijanto, 1996) mengutarakan sinkronik dan diakronik dalam morfologi kota merupakan analisis. Perkembangan morfologi atau perkembangan, aspek diakronik digunakan untuk mengkaji satu aspek. Dalam *historical reading* (Winarno, 1994) metode dan memecahkan permasalahan secara ilmiah dapat dilihat dari historik dengan menggunakan sumber-sumber dokumen kesejarahan yakni seperti bangunan atau prasasti, relief dan religi terhadap kebudayaan sehingga dapat disimpulkan bahwa sinkronik dan diakronik yaitu perbandingan dengan objek sejenis dan mewakili kesamaan dengan periode waktu dan adanya pemahaman suatu objek berdasarkan periode-periode perkembangannya.



BAB V

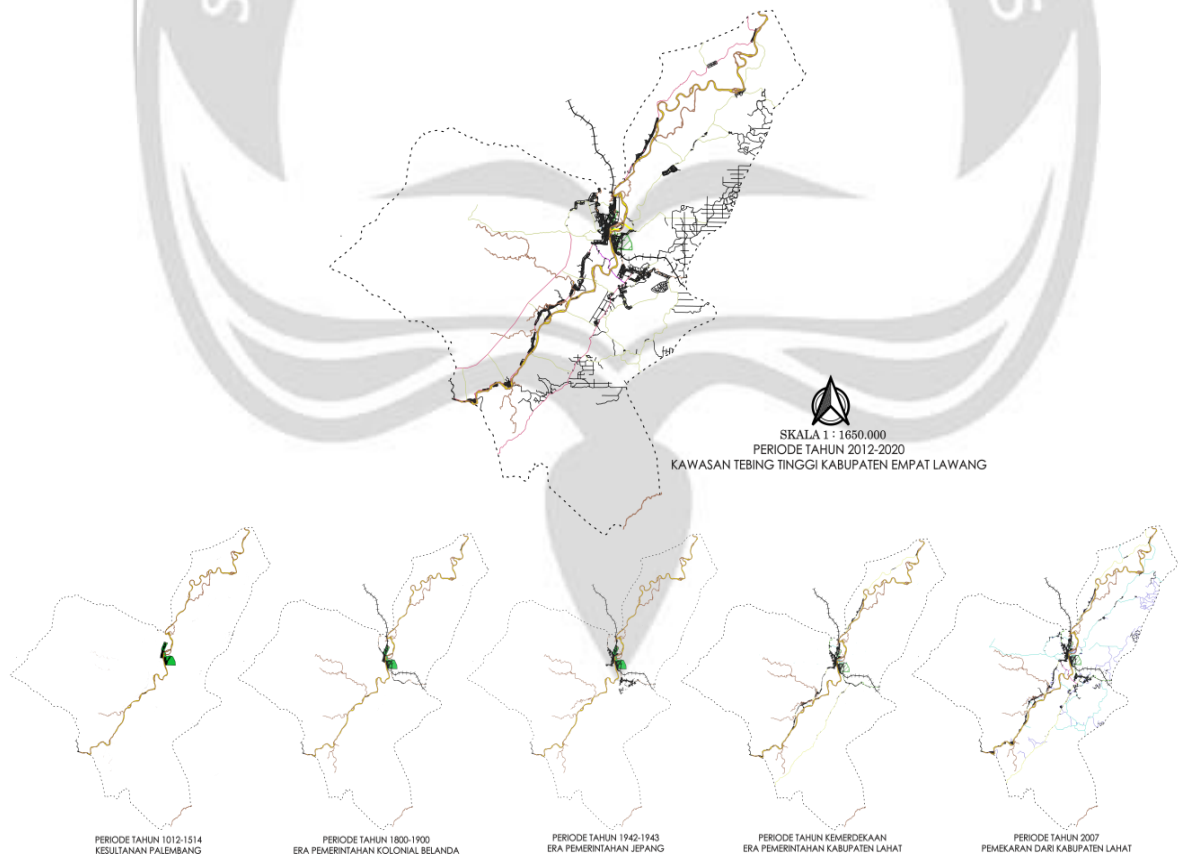
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1. Pola Morfologi

5.1.1. Analisis Bentuk Morfologi

Bentuk morfologi kawasan Tebing Tinggi adanya pengaruh terhadap perkembangan sebelum dan setelah terjadinya pemekaran sehingga mempengaruhi bentuk kawasan. Hal ini didasari adanya pengaruh perkembangan setiap periodenya yakni sebagai berikut :

1. Periode tahun (1012-1514) sampai era Kesultanan Palembang (1830).
2. Periode Pemerintah era Hindia Belanda tahun (1870-1900).
3. Periode Pemerintah Jepang tahun (1942-1945).
4. Periode Kemerdekaan sampai Pemerintahan Kabupaten Lahat.
5. Periode Pemekaran tahun 2007 Kabupaten Lahat – Kabupaten Empat Lawang.
6. Periode Tahun (2012-2020) Kawasan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.



Gambar 5.1 : Peta Perkembangan Kawasan Tebing Tinggi
Sumber : Analisis Penulis, 2020

Pada dasarnya bentuk morfologi dapat ditinjau dari 3 komponen menurut (Yunus, 2005) adanya penggunaan lahan, pola jaringan jalan dan karakteristik bangunan, berdasarkan dari ketiga komponen ini akan memiliki peran atau kontribusi masing-masing dalam bentuk morfologi. Adanya hasil perpaduan pola linier bemanik dan bercabang mempengaruhi terhadap pola jaringan jalan sehingga memiliki karakteristik khusus yaitu suatu kawasan memiliki pusat sepanjang jalan dan bangunan terdapat di desa P.S Tebing Tinggi merupakan sebagai roda perekonomian masyarakat di pusat kota.

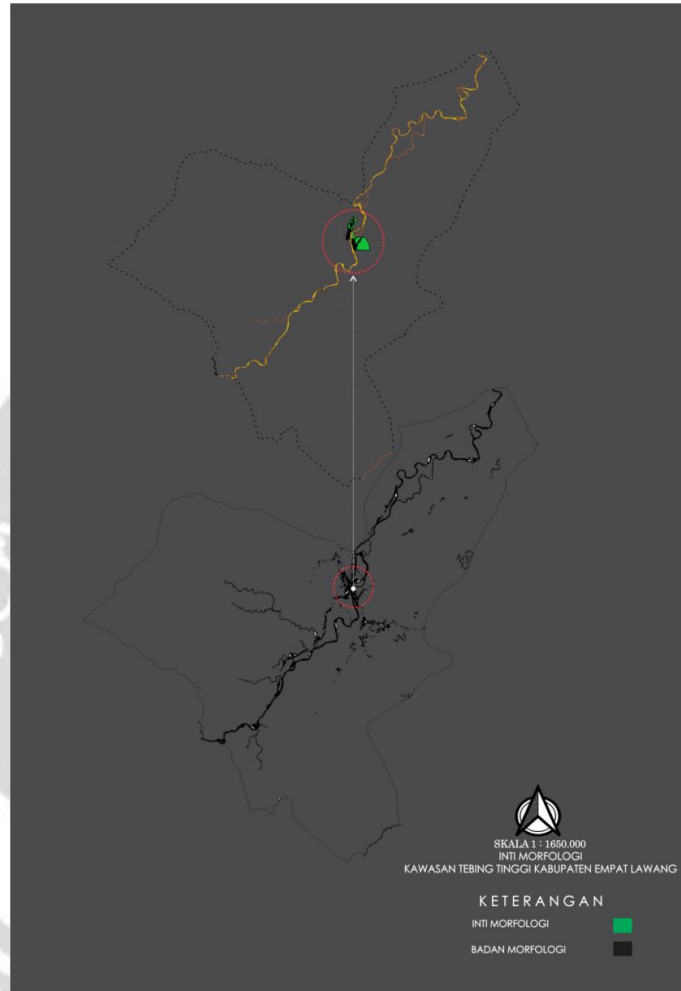
Table 5.1 Bentuk Morfologi Kawasan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang

Komponen Morfologi	Hasil Analisis
Inti Kawasan	Pada pusat kawasan terletak di desa P.S Tebing Tinggi berada tepat di sungai musi hal ini adanya antara ulu dan ilir dan ini tepat berada di kawasan Tebing Tinggi merupakan sebagai pusat kota.
Pola Penggunaan Lahan	Pola penggunaan lahan campuran dikarenakan adanya sektor perkebunan dikelola oleh masyarakat adapun sektor perdagangan jasa, fasilitas, permukiman penduduk yang mengelilingi kawasan.
Pola Jaringan Jalan	Pola jaringan jalan berbentuk spinal atau bercabang dengan dimensi yang berbeda mempengaruhi kawasan Tebing Tinggi.
Kepadatan	Terpusat di kawasan di desa P.S Tebing Tinggi.
Pola Bangunan	Adanya heterogen terdapat kenampakan dua pola bangunan dengan dimensi yang berbeda berada di kawasan Tebing Tinggi.

Sumber : Analisis Penulis, 2020

Bentuk morfologi kawasan Tebing Tinggi didasari adanya bentuk *fragment cities* dan *split cities* mempengaruhi terhadap kawasan Tebing Tinggi, dikarenakan tepat berada pada jalan utama yakni Jl. Trans Sumatera Lahat-Lubuk Linggau bersifat jalan kolektor primer dan kolektor sekunder diartikan adanya penggunaan baik tata guna lahan sektor barang dan jasa dan kepadatan pemukiman tinggi dan ini terletak di desa P.S Tebing Tinggi. Pengaruh terhadap *fragment cities* mempengaruhi terhadap

kepadatan penduduk bercabang baik tinggi, sedang dan rendah terjadi di kawasan sedangkan dilihat secara *Split Cities* adanya antara ulu dan ilir kawasan Tebing Tinggi. Inti kawasan morfologi adanya aktivitas mempengaruhi kepadatan bangunan maupun area komersial (perdagangan jasa).



Gambar 5.2 : Inti Morfologi dan Badan Morfologi Kawasan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang

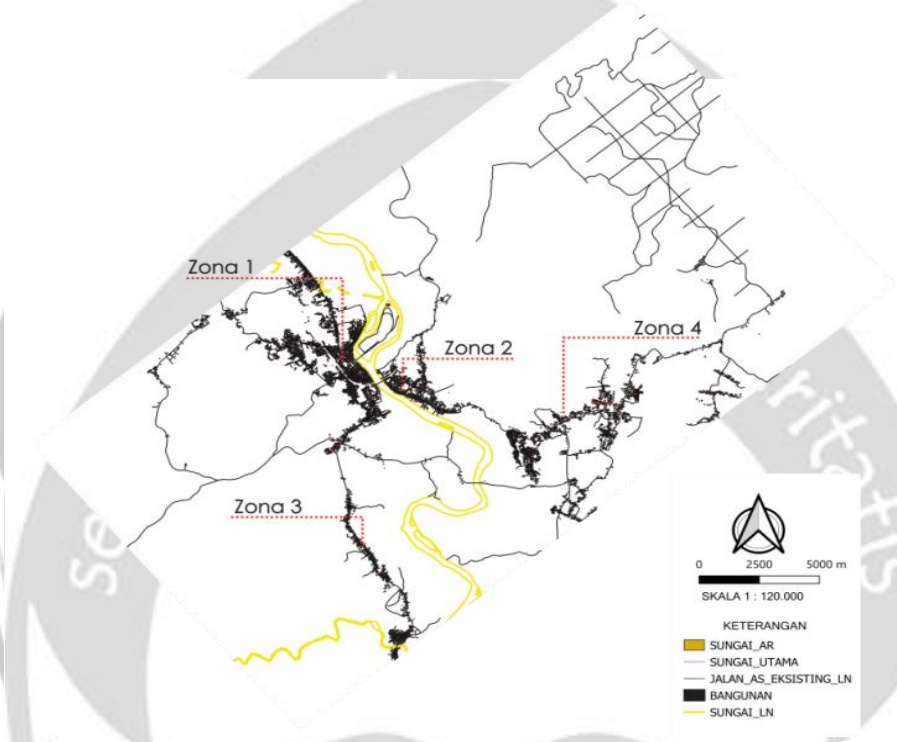
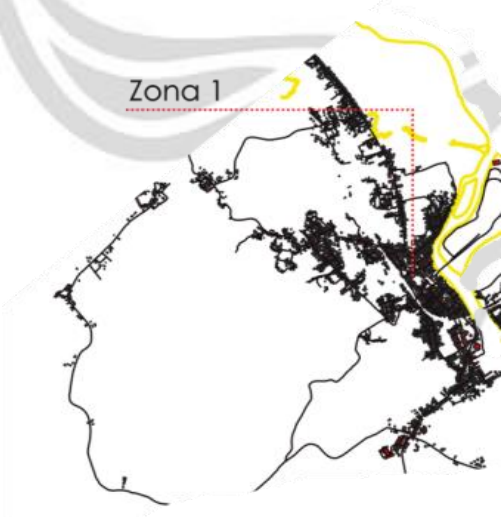
Sumber : Analisis Penulis, 2020

Sedangkan bagian kerangka bagian dari inti morfologi kawasan, terindikasi terbentuk oleh *fragment cities* dan *split cities* mempengaruhi pada kerangka kawasan tidak menyatu dengan induk namun melainkan tersebar dan terbelah oleh perairan sungai musi yang cukup lebar sehingga kawasan tersebut terdiri dari dua bagian antara Ulu dan Ilir terpisah dan dihubungkan oleh jembatan terdapat kawasan Tebing Tinggi merupakan sebagai pusat Kota Kabupaten Empat Lawang.

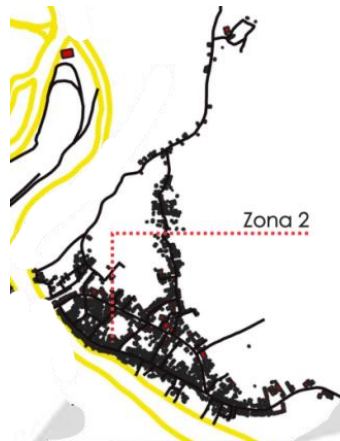
5.1.2. Analisis Karakteristik Morfologi Kawasan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang

Karakteristik kawasan Tebing Tinggi berdasarkan penggabungan antara bentuk *fragment cities* dan *split cities* hal ini menghasilkan 4 zonasi karakteristik yang berbeda di setiap kawasan.

Table 5.2 Karakteristik Wilayah Kawasan Tebing Tinggi
Kabupaten Empat Lawang

		
No	Karakteristik	Keterangan
1		<p>Zona 1 terletak bagian Ulu merupakan pusat kawasan terletak di P.S Tebing Tinggi dan desa Jaya Loka, adanya permukiman penduduk yang tersebar. Hal ini memberi peran sebagai zona perekonomian terkait dengan sektor perdagangan dan jasa maupun sektor industri.</p>

2



Zona 2 terletak bagian Ilir mendominasi kawasan penduduk tepian sungai musi yang berada di Pusat Kota. Terdapat pada desa P.S Tebing Tinggi dan desa Kupang Jaya. Untuk tingkat kepadatan penduduk cukup padat.

3



Zona 3 terletak pada desa Kupang, Kemang Manis, Lampar Baru, Seguring Kecil, Terusan Lama, Aur Gading dan Batu Pancet untuk kawasan penduduk tidak terlalu padat dan kawasan ini masih ada bangunan tradisional dibandingkan mengarah ke desa P.S Tebing Tinggi yang modern. Untuk zona 3 ini mendominasi area perkebunan dan pertanian yang dimiliki oleh penduduk sebagai perekonomian.

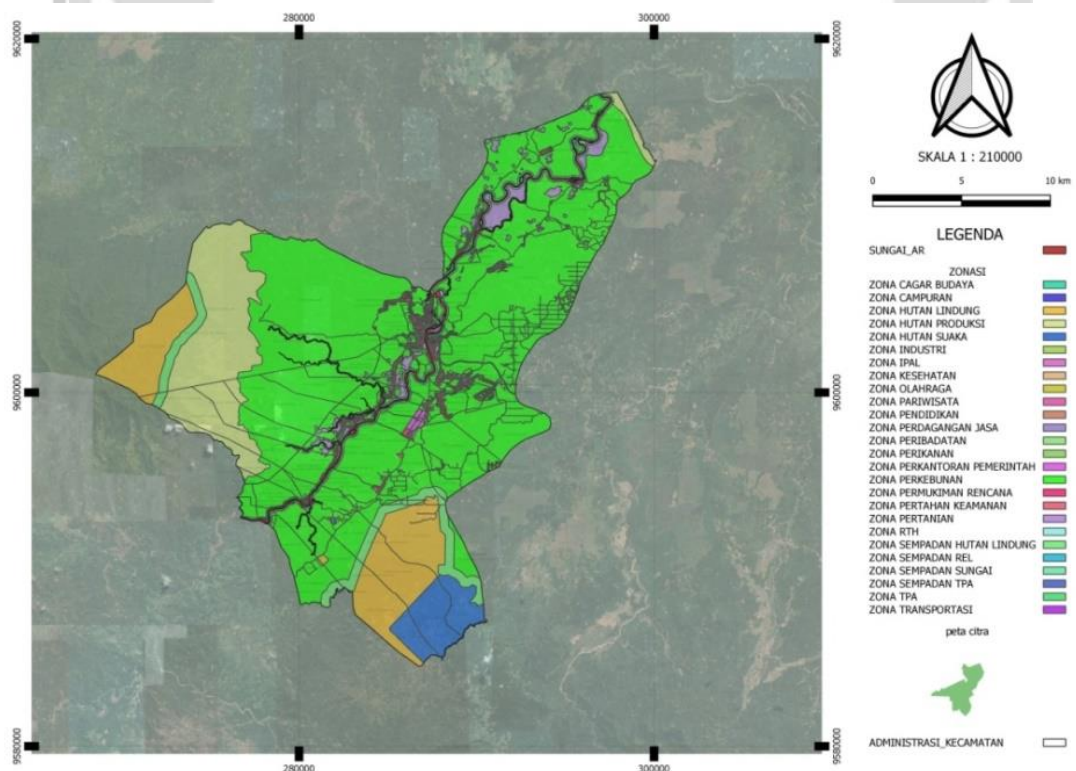
4



Zona 4 terletak pada desa Tanjung Kupang dan Mekarti Jaya merupakan pusat perkantoran pemerintahan Kabupaten Empat Lawang untuk kawasan penduduk tersebar tidak terlalu padat dan kawasan ini bangunan mengarah yang modern zona 4 ini menghubungkan dengan Kabupaten Lahat.

5.1.3. Penggunaan Lahan Kawasan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang

Penggunaan lahan terhadap kawasan Tebing Tinggi berawal dari periode tahun 1012-1514 hal ini didasari adanya kedatangan dari daratan Saudi Arabia dan India sehingga terbentuk pemukiman di tepian sepanjang sungai musi dengan luas area 20 ha sampai era pemerintahan Jepang periode tahun 1942-1945, sedangkan periode kemerdekaan sampai tahun 1996 penggunaan masih banyak hutan yang belum dikelola di masa itu dan untuk kawasan permukiman masih di dominasikan pada tepian sungai musi tepatnya berada di pusat kota sehingga adanya antara ulu dan ilir. Menurut (Lahat, 2006) mencatat dari Kabupaten Lahat dalam angka mengatakan kawasan Tebing Tinggi memiliki 33 desa dan memiliki 48.578 jiwa, tata guna lahan mulai berkembang dengan adanya perdagangan dan jasa, permukiman sudah mulai meluas dan berkembang tidak seperti tahun 1996 yang masih sedikit penyebaran permukiman, dimasa pemerintah Kabupaten Lahat menjadikan Kecamatan Tebing Tinggi sebagai kawasan pertanian dan perkebunan bagi masyarakat sebagai sektor perekonomian.



Gambar 5.3 : Peta Penggunaan Lahan dan Zonasi Kawasan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang

Sumber : BAPPEDA dan PUPR Kabupaten Empat Lawang, 2020

Hal ini didasari (Negeri, 2007) dari pemekaran Kabupaten Lahat penggunaan lahan setelah pemekaran di kawasan Tebing Tinggi merupakan sebagai pusat kota yakni dengan luas kawasan 590,93 Km² dan mempunyai 33 desa namun adanya pemekaran di Kecamatan Saling pada tahun 2012. Setelah pemekaran kawasan Tebing Tinggi menjadi luas area 397,63 Km² dan mempunyai 26 desa sampai saat ini (Kabupaten Empat Lawang, 2012). Berdasarkan hasil wawancara (Ir. H. Suharli M Yamin, 2020). Mengatakan penggunaan lahan di kawasan Tebing Tinggi mendominasi yakni lahan perkebunan dan pertanian merupakan sebagai perekonomian masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Empat Lawang. Hampir 95% rata-rata penduduk di Pusat Kota Kecamatan Tebing Tinggi berprofesi sebagai petani yakni Kelapa Sawit, Kopi, Karet, Durian dan Lada. Sedangkan 5% berprofesi yakni Pegawai Negeri Sipil, Buruh dan Perdagangan.

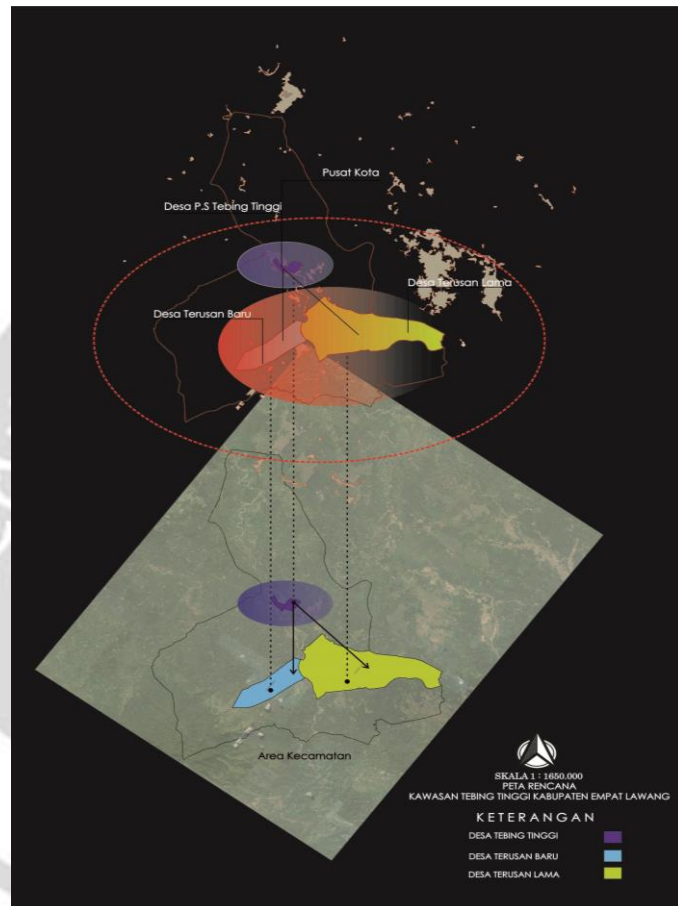
Berdasarkan (Lawang B. K., 2007) mengenai penggunaan lahan di Kecamatan Tebing Tinggi terhadap sawah sebesar 2.074 ha dimana 720 ha irigasi sedangkan non irigasi 532 ha dan luas perkebunan 60.909 ha dan luas lahan non pertanian sebesar 914 ha. Menurut (Lawang B. K., 2019). Periode tahun 2019 penggunaan lahan 24.626 ha di Kecamatan Tebing Tinggi, sekitar 23,15% merupakan lahan bukan pertanian, sedangkan lahan pertanian sebesar 76,85% yang terdiri atas 91,97% lahan pertanian bukan sawah dan 8,03% yakni lahan pertanian sawah. Gambar 5.3 menjelaskan tentang penggunaan lahan pada Kecamatan Tebing Tinggi telah direncanakan oleh BAPPEDA dan PUPR Kabupaten Empat Lawang rencana ini terkait untuk menzonasikan kawasan dimana sebelumnya belum memiliki peta penggunaan lahan. Berdasarkan (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2007) yakni bertujuan :

1. Rencana startegis Kabupaten/Kota.
2. Untuk mencegah terjadinya pembangunan yang tidak sesuai dengan acuan dimana telah disusun.
3. Rencana pola ruang wilayah Kabupaten yang meliputi kawasan lindung Kabupaten dan kawasan budidaya Kabupaten.
4. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten yang meliputi sistem perkotaan dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten.

*Table 5.3 Zonasi Penggunaan Lahan Kawasan Tebing Tinggi
Kabupaten Empat Lawang*

No	Penggunaan Lahan	Keterangan
1	Zona Cagar Budaya	Terletak di Desa Kupang dan Tanjung Kupang.
2	Zona Hutan Lindung	Terletak di Desa Jaya Loka, P.S Tebing Tinggi, Kupang, Kemang Manis dan Terusan Baru.
3	Zona Hutan Produksi	Terletak di Desa Jaya Loka, Aur Gading, Batu Pancet, Ulak Mengkudu, Lubuk Gelanggang dan SugiWaras.
4	Zona Hutan Suaka	Terletak di Desa Terusan Lama, Ulak Mengkudu dan Lubuk Gelanggang.
5	Zona Industri	Terletak di Desa Terusan Lama dan Tanjung Kupang.
6	Zona Kesehatan	Terletak di Desa Terusan Lama dan Kelumpang Jaya.
7	Zona Perdagangan Jasa	Terletak di Desa Jaya Loka, P.S Tebing Tinggi, Kupang, Kemang Manis dan Terusan Baru.
8	Zona Pendidikan	Terdapat di setiap desa yang berada di Kecamatan Tebing Tinggi
9	Zona Perkebunan	Terletak di Desa Jaya Loka, Terusan Baru, Terusan Lama, Mekar Jaya, Pajar Bakti, Pancurmas, Ujung Alih, Seguring Kecil, Batu Pancet, Lubuk Gelanggang, Lampar Baru, SugiWaras, Kemang Manis, Rantau Tenang, Kelumpang Jaya, Tanjung Kupang, Kupang dan Pasar Tebing Tinggi.
10	Zona Pertanian	Terletak di Desa Sugiwaras, Baturaja Baru, Tj. Kupang Baru, Pajar Bakti, Baturaja Lama, Kemang Manis, Lampar Baru, Terusan Baru dan Lama, Aur Gading, Kelumpang Jaya dan Pasar Tebing Tinggi.
11	Zona Perkantoran	Terletak di Desa Jayaloka, Baturaja Lama, Kelumpang Jaya, Terusan Lama, Rantau Tenang dan Tanjung Kupang.
12	Zona Permukiman	Terdapat di setiap desa yang berada di Kecamatan Tebing Tinggi.

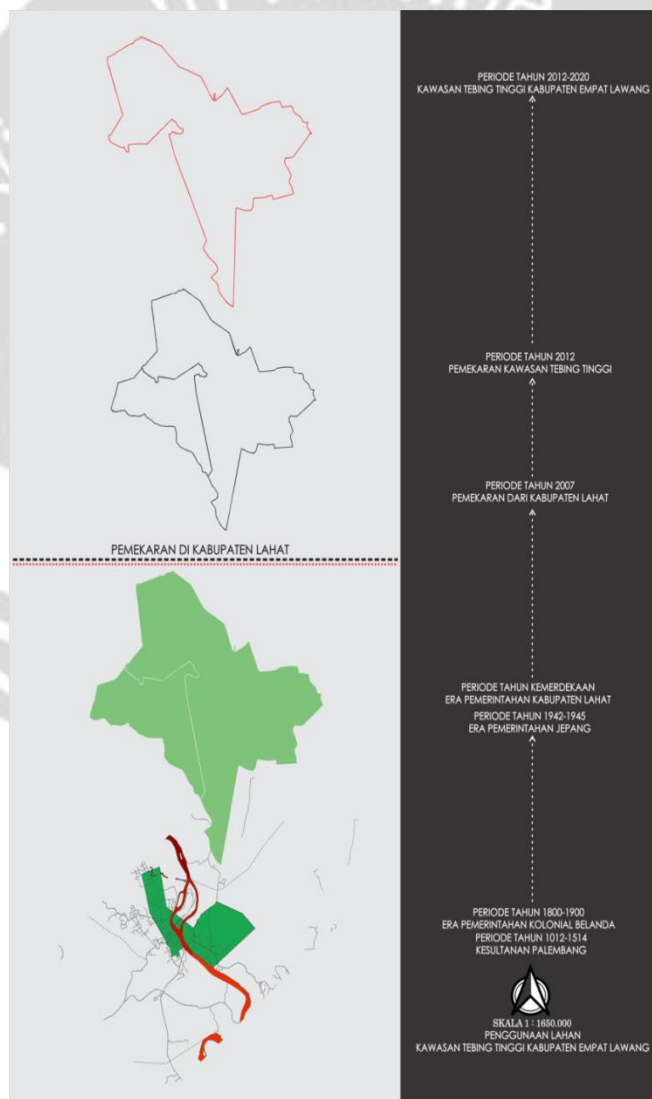
Sumber : Analisis Penulis, 2020



Gambar 5.4 : Peta Rencana Pengembangan Kawasan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang
Sumber : Analisis Penulis, 2020

Berdasarkan table 5.3 menunjukkan zona perkebunan dan zona pertanian yang dominan terhadap perkembangan di kawasan Kecamatan Tebing Tinggi dikarenakan sebagai perekonomian masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dibandingkan sebelum terjadi pemekaran perkembangan terhadap kawasan Tebing Tinggi masih kurang mendukung terhadap perekonomian masyarakat dan ini mengakibatkan terjadinya jenjang sosial. Adapun rencana yang dilakukan terhadap Pemerintah Kabupaten Empat Lawang khususnya di pusat kota terletak di Desa Terusan Baru dan Lama akan dikembangkan menjadi pusat perkantoran maupun yang mendukung sebagai perkembangan kota. Dalam rencana penggunaan lahan tidak hanya terfokus terhadap di bagian ulu yakni di Desa P.S Tebing Tinggi sehingga bertujuan untuk

memeratakan perkembangan dan penggunaan lahan di Desa Terusan Baru dan Lama akan dikembangkan sebagai zona perekonomian kawasan ini menghubungkan dengan Kecamatan Pendopo (Ir. H. Suharli M Yamin, 2020). Gambar 5.4 menjelaskan peta rencana sebagai kawasan startegis terhadap perkembangan kawasan Tebing Tinggi diperuntukan di Desa Terusan Baru dan Desa Terusan Lama hal ini bertujuan untuk memaksimalkan perkembangan terhadap kawasan baik antara Ulu dan Ilir secara geografis kedua desa ini memiliki jarak ke pusat kota 5 kilometer sedangkan untuk luas area Desa Terusan Baru (6,01 Km²) dan Desa Terusan Lama (20 Km²) sedangkan luas Pusat Kota di Desa Tebing Tinggi (3,25 Km²) (Lawang B. K., 2019).



Gambar 5.5 : Peta Penggunaan Lahan Sebelum dan Setelah Pemekaran Kawasan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang
Sumber : Analisis Penulis, 2020

Gambar 5.5 menjelaskan tentang penggunaan lahan terhadap kawasan Tebing Tinggi dari setiap periode perkembangan sebagai berikut :

1. Periode tahun (1012-1514) - Era Kesultanan Palembang

Di era periode pertama penggunaan lahan terhadap kawasan Tebing Tinggi terfokus hanya pada tepian sepanjang sungai musi terletak di Desa P.S Tebing Tinggi hal ini didasari adanya pemukiman penduduk.

2. Periode era pemerintahan Hindia Belanda.

Periode kedua era Hindia Belanda mulai adanya pergesaran terhadap penggunaan lahan adanya pembangunan-pembangunan seperti halnya bangunan benteng, jembatan, terowongan dan rel kereta api hanya terfokus pada bagian Ulu kawasan Tebing Tinggi.

3. Periode era pemerintahan Jepang.

Periode ketiga pemerintahan era Jepang kawasan Tebing Tinggi hanya dijadikan sebagai wilayah startegis dan meneruskan peninggalan-peninggalan era pemerintahan Hindia Belanda.

4. Periode Kemerdekaan - Pemerintah Kabupaten Lahat.

Kawasan Tebing Tinggi penggunaan lahan mencakup secara luas masih bagian dari Kabupaten Lahat luas kawasan 590,93 Km² dan mempunyai 33 desa, periode kemerdekaan adanya DOB terjadi di Kabupaten Lahat hal ini bertujuan sebagai keseimbangan dan pemerataan terhadap perkembangan wilayah, era pemerintahan Kabupaten Lahat kawasan Tebing Tinggi lebih terfokus di sektor perkebunan dan sektor pertanian dikarenakan memiliki pontesi sebagai perekonomian masyarakat Tebing Tinggi. Sedangkan pemukiman penduduk di kawasan Tebing Tinggi mulai menyebar di setiap desa-desa baik antara Ulu dan Ilir. Tahun 2007 adanya pemekaran wilayah di Kabupaten Lahat hal ini terjadi pada kawasan Tebing Tinggi merupakan sebagai pemekaran wilayah baru dan pusat kota Kabupaten Empat Lawang.

5. Periode Tahun (2007) pemekaran wilayah kawasan Tebing Tinggi.

Setelah pemekaran dari Kabupaten Lahat kawasan Tebing Tinggi penggunaan lahan semakin luas terjadi hal ini terkait dengan pembangunan-pembangunan secara merata berdasarkan wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB). Perkembangan

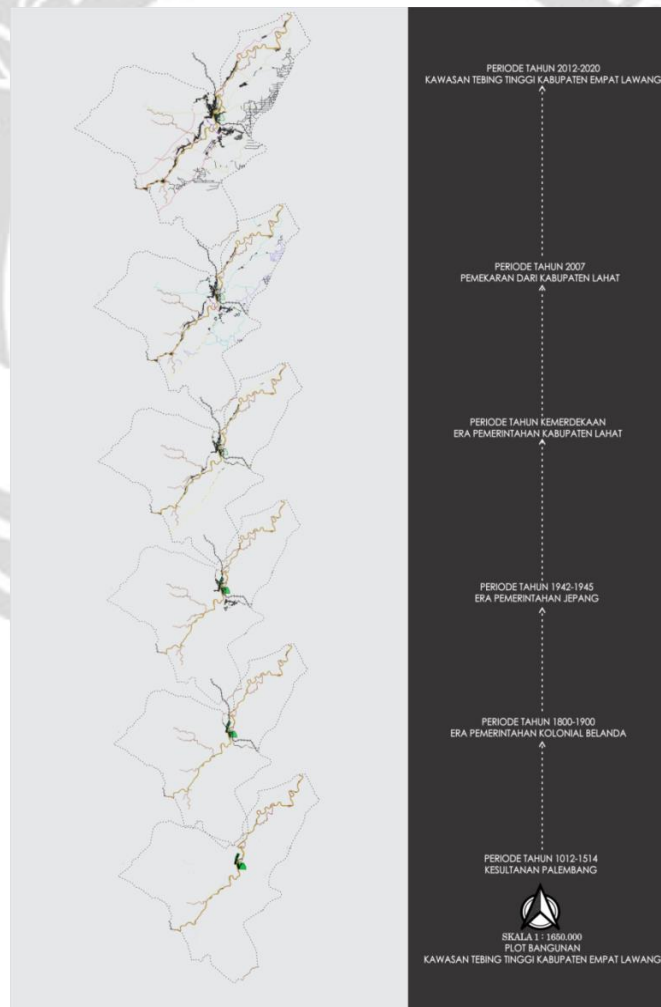
selama 5 tahun berdampak setiap sektor mempengaruhi terhadap kawasan Tebing Tinggi.

6. Periode Tahun (2012-2020) kawasan Tebing Tinggi.

Periode tahun 2007- 2012 Adanya pemekaran di kawasan Tebing Tinggi terbentuknya Kecamatan Saling. Penggunaan lahan menjadi berkurang sebelumnya luas kawasan 590,93 Km² menjadi 397,63 Km² dan mempunyai 26 desa selain berdampak terhadap luasan wilayah secara administratif mempengaruhi perkembangan kawasan Tebing Tinggi.

5.1.4. Analisis Perubahan Plot-Plot Bangunan Kawasan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang

Perubahan plot-plot bangunan berdasarkan setiap periode perkembangan kawasan Tebing Tinggi yakni sebagai berikut :



Gambar 5.6 : Peta Plot Bangunan Sebelum dan Setelah Pemekaran Kawasan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang
Sumber : Analisis Penulis, 2020

1. Periode tahun (1012-1514) - Era Kesultanan Palembang - Era Pemerintahan Hindia Belanda dan Era Pemerintahan Jepang.

Pola plot bangunan kawasan Tebing Tinggi terfokus pada sepanjang tepian sungai musi terletak di Desa P.S Tebing Tinggi, sedangkan pola plot bangunan era Hindia Belanda adanya bangunan kolonial dan benteng sampai era Pemerintahan Jepang.

2. Periode Kemerdekaan - Pemerintah Kabupaten Lahat.

Perubahan plot bangunan kawasan Tebing Tinggi tidak terlalu signifikan terhadap tepian sungai musi, perubahan pola plot bangunan tertinggi terjadi di bagian Ulu Desa P.S Tebing Tinggi bertambahnya pemukiman penduduk, sedangkan bangunan peninggalan era Hindia Belanda tidak ada perubahan diperuntukan sebagai rumah dinas Bupati pemerintah Kabupaten Lahat sampai adanya pemekaran wilayah.

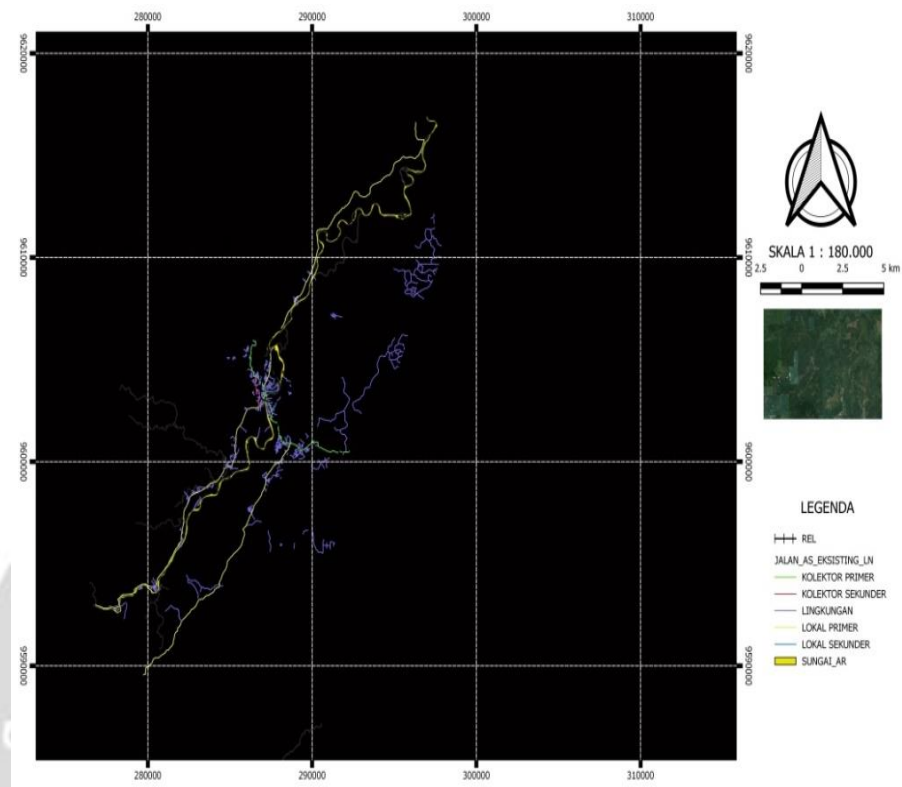
3. Periode Tahun (2007) sampai Tahun (2012-2020) kawasan Tebing Tinggi.

Periode tahun 2007-2020 setelah pemekaran kawasan Tebing Tinggi, mengalami perubahan terhadap pola bangunan hal ini didasari adanya persebaran jaringan jalan baru dan pembangunan fasilitas sarana dan prasarana merupakan sebagai pendukung kawasan Daerah Otonomi Baru (DOB), di sisi lain pola bangunan tepian sepanjang musi tidak perubahan sampai saat ini sedangkan bangunan-bangunan peninggalan era Hindia Belanda terutama terletak di Desa P.S Tebing Tinggi dijadikan zona kawasan bangunan lindung maupun secara bentuk bangunan, beda halnya pembangunan kantor-kantor pemerintahan mengarah bangunan berbentuk modern baik secara penggunaan material sedangkan pemukiman penduduk lebih dominan berbentuk modern dibandingkan kawasan Desa Kupang, Kemang Manis, Lampar Baru, Seguring Kecil, Terusan Lama, Aur Gading dan Batu Pancet lebih mengarah berbentuk arsitektur tradisional.

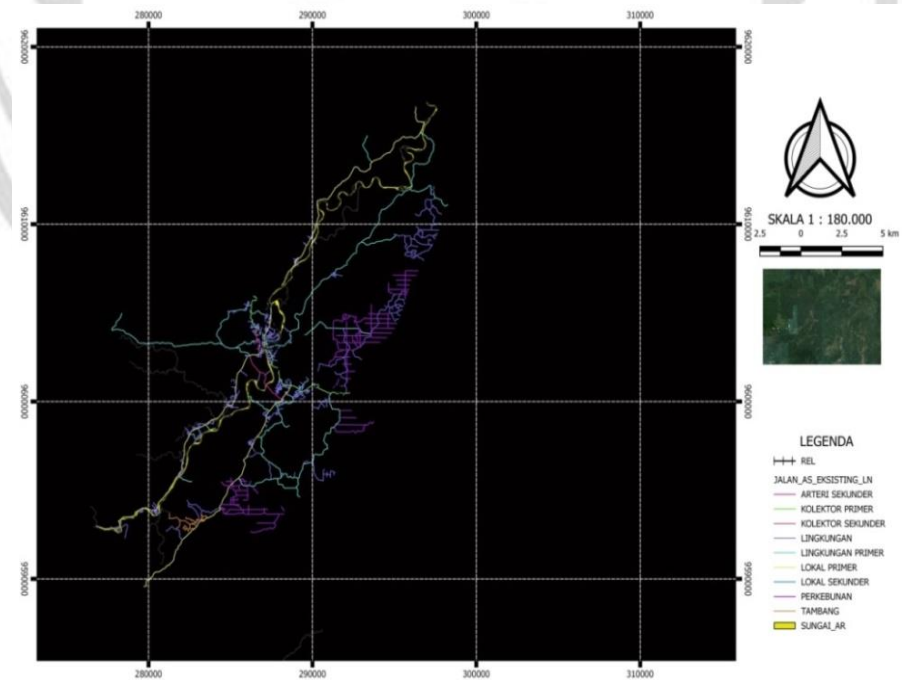
5.1.5. Analisis Pola Jaringan Jalan Kawasan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang

Kawasan Tebing Tinggi secara badan morfologi terhadap kawasan berbentuk *fragment cities* hal ini didasari mempengaruhi terhadap pola bentuk jaringan jalan yakni Kolektor Primer, Kolektor Sekunder, Lingkungan, Lokal Primer dan Sekunder. Sebelum pemekaran terhadap kawasan pola jaringan jalan hanya terfokus di Desa P.S Tebing Tinggi merupakan pusat kota kawasan ini terhubung dengan jalan kolektor

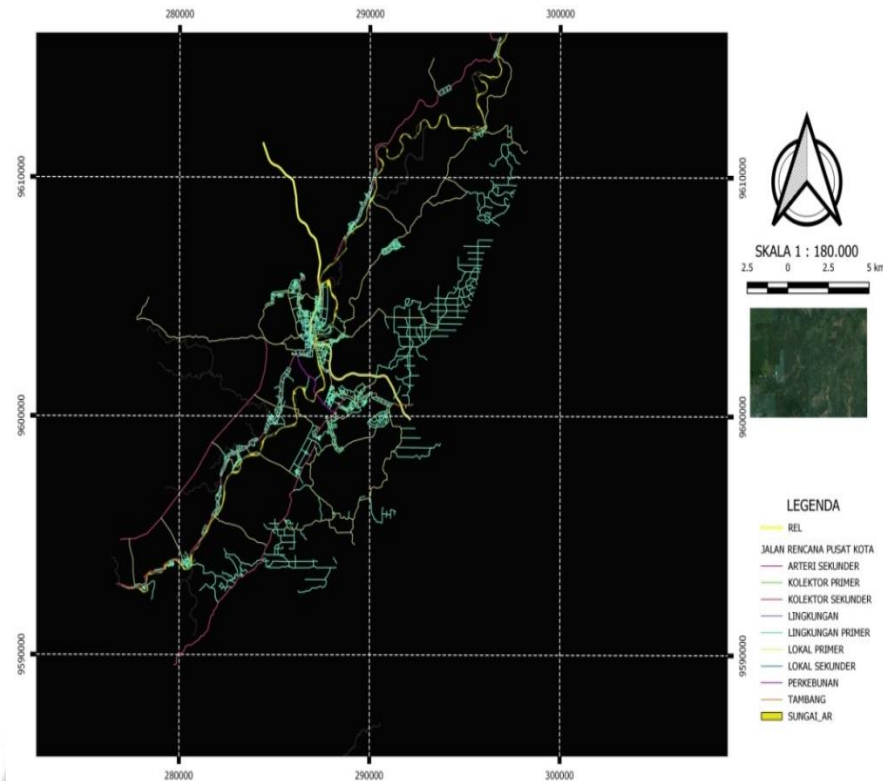
primer bertujuan sebagai menghubungkan pusat-pusat kota maupun pusat kegiatan kawasan Tebing Tinggi.



Gambar 5.7 : Peta Pola Jaringan Sebelum Pemekaran Kawasan Tebing Tinggi
Sumber : Analisis Penulis, 2020



Gambar 5.8 : Peta Pola Jaringan Setelah Pemekaran Kawasan Tebing Tinggi Tahun (2009-2015)
Sumber : Analisis Penulis, 2020



Gambar 5.9 : Peta Pola Jaringan Kawasan Tebing Tinggi Tahun (2015-2020)

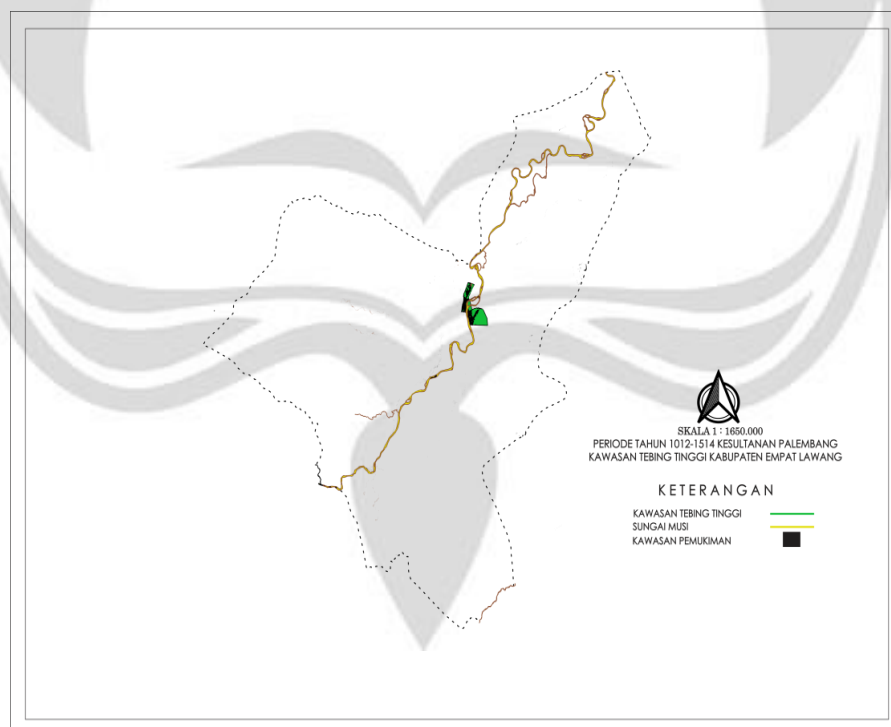
Sumber : BAPPEDA dan PUPR Kabupaten Empat Lawang, 2020

Seperti gambar 5.9 setelah pemekaran kawasan Tebing Tinggi tahun 2009-2015 adanya perkembangan munculnya pemukiman-pemukiman penduduk maupun pembangunan-pembangunan sehingga adanya penambahan jaringan jalan baru terletak di Desa Tanjung Kupang, Pajar Bakti, Ulak Mengkudu, Jaya Loka, Tanjung Kupang Baru dan Terusan Lama. Periode perkembangan pola jaringan jalan tahun 2015-2020 semakin banyak pembebasan lahan dan perkembangan terhadap kawasan Tebing Tinggi merupakan sebagai pusat kota di Kabupaten Empat Lawang berdampak terhadap Desa Lampar Baru, Seguring Kecil, Terusan Baru, Aur Gading, Batu Pancet, Ulak Mengkudu, Lubuk Gelanggang dan Ujung Alih kawasan ini berhubungan langsung dengan Kecamatan Pendopo. Selain itu menurut (Ir. H. Suharli M Yamin, 2020) Tebing Tinggi akan dijadikan sebagai kawasan startegis baik secara pembangunan-pembangunan maupun sektor perekonomian dengan adanya penambahan akses jaringan jalan baru agar dapat secara efektif dan efesien digunakan kepada masyarakat kawasan Tebing Tinggi.

5.2. Analisis Faktor Fisik dan Non Fisik

5.2.1. Analisis Faktor Fisik dan Non Fisik Mempengaruhi Terhadap Perkembangan Kawasan Tebing Tinggi Periode Tahun (1012-1514) Era Kesultanan Palembang Periode Tahun (1830)

Perkembangan kawasan Tebing Tinggi didasari adanya kedatangan dari dataran Arab Saudi dan India terletak di tepian sepanjang Sungai Musi kemudian mendirikan pemukiman-pemukiman penduduk sebagai tempat tinggal di era tahun 1012-1514 sampai Kesultanan Kota Palembang periode tahun 1830 dampak terhadap perkembangan kawasan Tebing Tinggi faktor fisik, sosial budaya, religius, sektor perdagangan dan sektor pertanian sedangkan transportasi air menggunakan perahu belum ada jembatan yang menghubungkan antara Ulu dan Ilir terhadap kawasan. Menurut (Prof. Drs. Nawiyanto, 2011) dalam buku tentang Kesultanan Palembang Darussalam Sejarah dan Warisan Budayanya, sektor pertanian berkembang secara baik berbagai wilayah di Sumatera Selatan berkat kondisi tanah yang subur dan menjadi sektor utama bagi penduduk kawasan Tebing Tinggi pada era masa kedatangan dari dataran Arab Saudi, India sampai Kesultanan Palembang Darussalam.



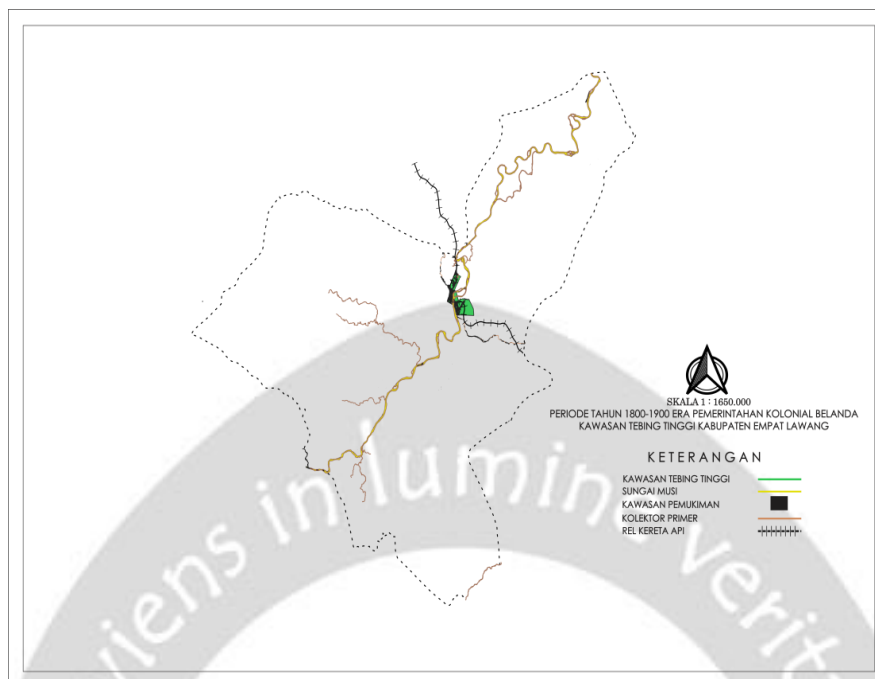
Gambar 5.10 : Peta Perkembangan Kawasan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Periode Tahun (1012-1514) – Era Kesultanan Palembang (1830)

Sumber : Analisis Penulis, 2020

5.2.2. Analisis Faktor Fisik dan Non Fisik Mempengaruhi Terhadap Perkembangan Kawasan Tebing Tinggi Pemerintahan Hindia Belanda Periode Tahun (1870-1900)

Perkembangan Kawasan Tebing Tinggi kedatangan Hindia Belanda bertujuan menjadikan Desa P.S Tebing Tinggi menjadi pusat kota dikarenakan letak yang sangat strategis sehingga di manfaatkan terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Pada periode tahun 1870-1900 pembangunan-pembangunan adanya bangunan tempat tinggal kolonial dan benteng pertahanan berorientasi menghadap ke arah tepian Sungai Musi terletak di Desa P.S Tebing Tinggi. Pengaruh terhadap pusat kota adanya indikator-indikator seperti faktor ekonomi dan faktor politik, faktor ekonomi merupakan sektor perdagangan adanya gesekan terhadap faktor politik hal ini memicu membuat aturan dan pengendalian baik secara fisik maupun non fisik. Kawasan Tebing Tinggi ditandai dengan adanya pembangunan jaringan jalur kereta api di masa pemerintahan Hindia Belanda sebagai fasilitas penunjang kebutuhan militer dan pemerintahan. Adapun catatan menurut (Sevenhoven, 1971) kawasan Tebing Tinggi merupakan wilayah yang menghasilkan produk-produk yang penting bagi Belanda digunakan sebagai menyuplai pasar di Eropa. *Willian Marsden* pegawai dari Inggris melaporkan bahwa daerah pedalaman disebut yakni kawasan Tebing Tinggi memiliki kualitas yang sangat baik, terhadap pertumbuhan sektor pertanian jauh lebih sempurna dibandingkan dengan daerah di Sumatera.

Pada lahan-lahan dataran tinggi berada di kawasan Tebing Tinggi terdapat banyak kebun-kebun yang diusahakan oleh penduduk, tahun 1821 (Marsden, 2008) era Hindia Belanda produk-produk sektor pertanian seperti beras, kapas, gambir dan lada dan rotan dihasilkan di daerah aliran Sungai Musi, Sungai Lamatang dan Sungai Ogan. Sementara itu, daerah aliran Sungai Komering dan Sungai Banyuasin memberi produk sektor pertanian berupa beras dan lada. Semua aliran sungai menghubungkan dengan kawasan Tebing Tinggi sebagai pusat pemerintah Hindia Belanda. Dalam konsep barat, sistem disebut dengan istilah *Swidden Argiculture* atau *Slash and Burn Argiculture*, secara umum wilayah-wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk masih relatif rendah hal ini terjadi di kawasan Tebing Tinggi pemukiman penduduk masih terfokus pada tepian Sungai Musi.



Gambar 5.11 : Peta Perkembangan Kawasan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Periode Tahun (1870-1900) – Era Pemerintahan Hindia Belanda

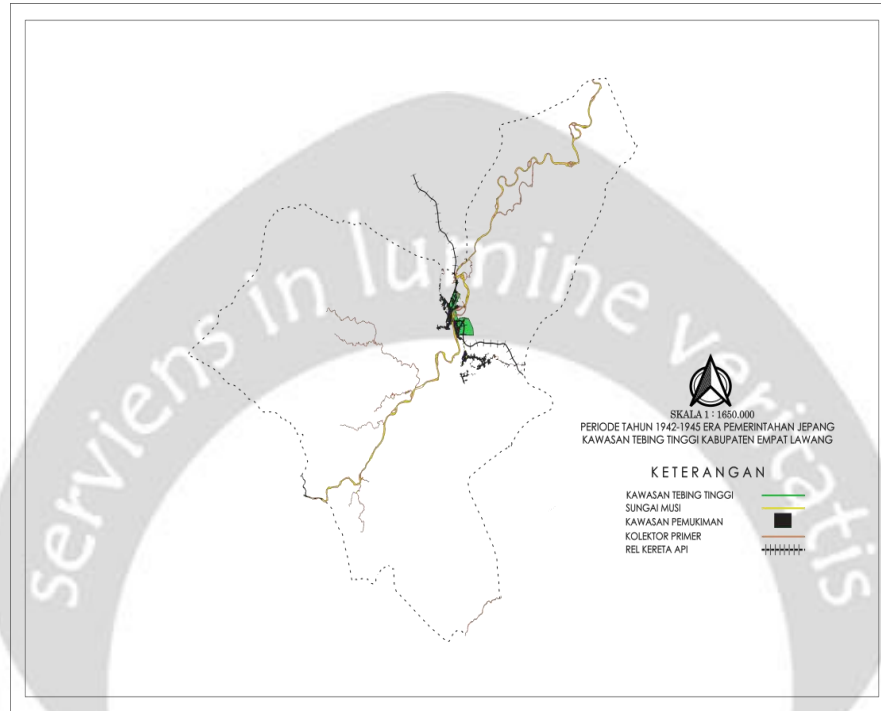
Sumber : Analisis Penulis, 2020

5.2.3. Analisis Faktor Fisik dan Non Fisik Mempengaruhi Terhadap Perkembangan Kawasan Tebing Tinggi Pemerintahan Jepang Periode Tahun (1942-1945)

Periode pemerintahan Jepang tahun (1942-1945) merupakan periode masa yang sangat singkat dan dianggap tidak memiliki sejarah maupun tidak banyak cerita, namun tidak bisa ditutupi bahwa periode waktu cukup singkat ini Jepang telah memberikan sebuah cerita baru dalam periodisasi sejarah di Indonesia, kawasan Tebing Tinggi merupakan wilayah dianggap memiliki nilai strategis bagi pemerintahan Jepang mendapatkan sumber-sumber daya alam dimana dapat dimanfaatkan sebagai menyuplai bagi tentara di masa pemerintahan Jepang. Selain kawasan Tebing Tinggi wilayah Palembang dianggap memiliki nilai strategis adanya jalur transportasi yakni terdapat aliran Sungai Musi. Kawasan Tebing Tinggi berganti menjadi wilayah kewedanaan hal ini mempengaruhi terhadap sistem politik dibuat oleh pemerintah Jepang jauh lebih besar dibandingkan sistem politik pada era pemerintahan Hindia Belanda.

Pada masa pemerintahan Jepang perkembangan terhadap kawasan Tebing Tinggi hanya meneruskan pembangunan-pembangunan seperti jaringan jalan, jalur rel kereta api, terowongan kereta api menghubungkan Kabupaten Lahat dan tempat

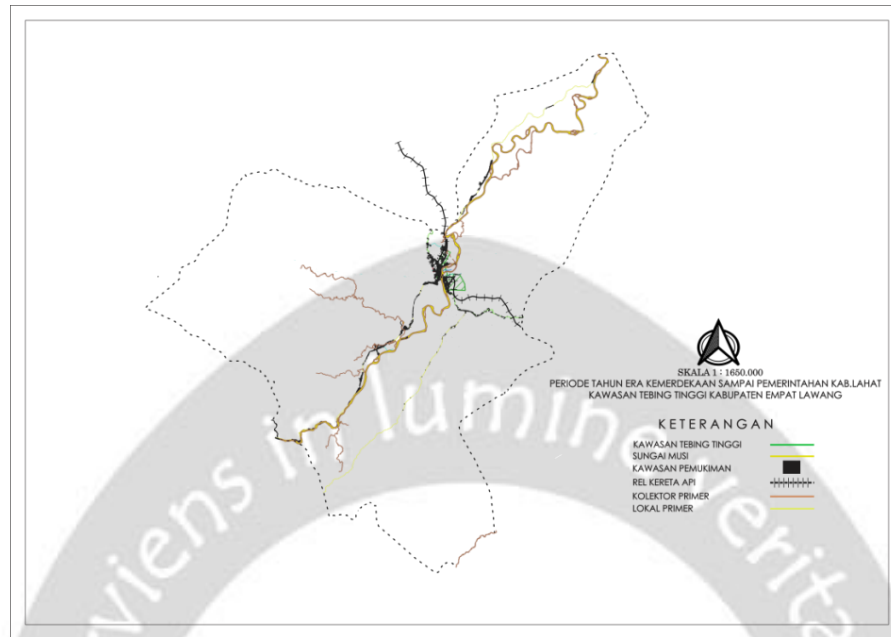
ibadah. Sejak awal kedatangan pemerintahan Jepang pada kawasan Tebing Tinggi tidak donominan terhadap secara sektor infrastruktur hanya mementingkan terhadap sektor perekonomian hal ini menjadikan penyokong ekonomi bagi militer Jepang dan pemerintah berbasis di Desa P.S Tebing Tinggi.



Gambar 5.12 : Peta Perkembangan Kawasan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Periode Tahun (1942-1945) Era Pemerintah Jepang
Sumber : Analisis Penulis, 2020

5.2.4. Analisis Faktor Fisik dan Non Fisik Mempengaruhi Terhadap Perkembangan Kawasan Tebing Tinggi Periode Kemerdekaan – Pemerintah Kabupaten Lahat

Pasca kemerdekaan adanya desentralisasi hal ini bermaksud adanya penyerahan kekuasaan sistem pemerintahan dari Pusat ke Daerah (Daerah, 2014). Pasca kemerdekaan kawasan Tebing Tinggi menjadi bagian dari wilayah dari Kabupaten Lahat, setelah pasca kemerdekaan timbul adanya otonomi daerah bermaksud sebagai pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan penggunaan terhadap sumber daya nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun mempercepat pembangunan-pembangunan terhadap perkembangan wilayah telah diatur tentang undang-undang daerah.



Gambar 5.13 : Peta Perkembangan Kawasan Tebing Tinggi Periode Kemerdekaan Sampai Pemerintahan Kabupaten Lahat
Sumber : Analisis Penulis, 2020

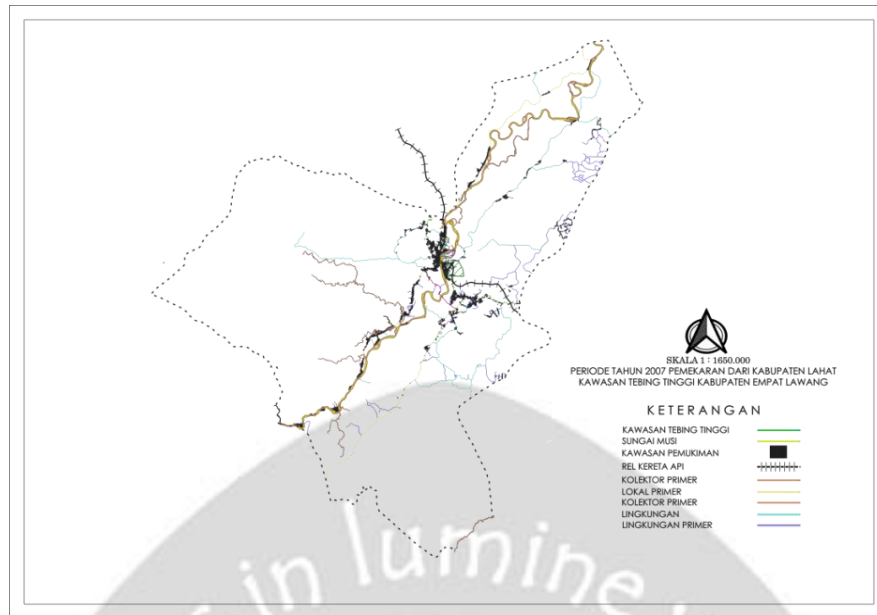
Perkembangan kawasan Tebing Tinggi pasca kemerdekaan dari pemerintahan Jepang berdampak terhadap sistem politik hal ini mempengaruhi keputusan-keputusan yang dibuat oleh Kabupaten Lahat merupakan pusat pemerintah. Tahun 1956 berlandaskan Tentang Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 menjelaskan pembentukan daerah tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan daerah tingkat I Sumatera Selatan yakni kawasan Tebing Tinggi dan Pagar Alam merupakan satu induk wilayah dengan Kabupaten Lahat. Berdasarkan data (Lahat B. P., 2001) mencatat tahun (2001-2005) bahwa perkembangan kawasan lebih dominan mengarah faktor non fisik yakni terkait sektor perkebunan dan sektor pertanian meliputi seperti kelapa sawit dan kopi yang mempengaruhi perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Adapun catatan secara makro terhadap perkembangan kawasan Tebing Tinggi dalam buku Kabupaten Lahat Dalam Angka (Lahat, 2006) merupakan berbasis sektor pertanian hal ini sejak dari era pemerintahan Hindia Belanda sudah menjadi sektor utama bagi perekonomian. Hampir sebagian 80% di sektor sekunder yakni meliputi industri-industri seperti jasa konstruksi dan di tahun 2003-2005 terjadi perubahan pergeseran terhadap sektor pertanian adanya transformasi disebabkan Kabupaten Lahat adanya desentralisasi berdampak terhadap pemekaran wilayah terjadi di Pagar Alam.

Pada tahun 2002 timbulnya wacana pemekaran wilayah di Kabupaten Lahat mempengaruhi faktor politik terjadi di kawasan Tebing Tinggi baik dalam pemerintahan dan tokoh masyarakat. Hasil dari terbentuknya wilayah pemekaran baru berdampak dengan kawasan merupakan sebagai pusat pemerintahan dan kota, hal ini mempengaruhi faktor politik (faktor non fisik), selain itu mengakibatkan adanya perubahan-perubahan baik secara fisik maupun non fisik terhadap kawasan seperti tata guna lahan, jaringan jalan, ekonomi dan status pemukiman penduduk.

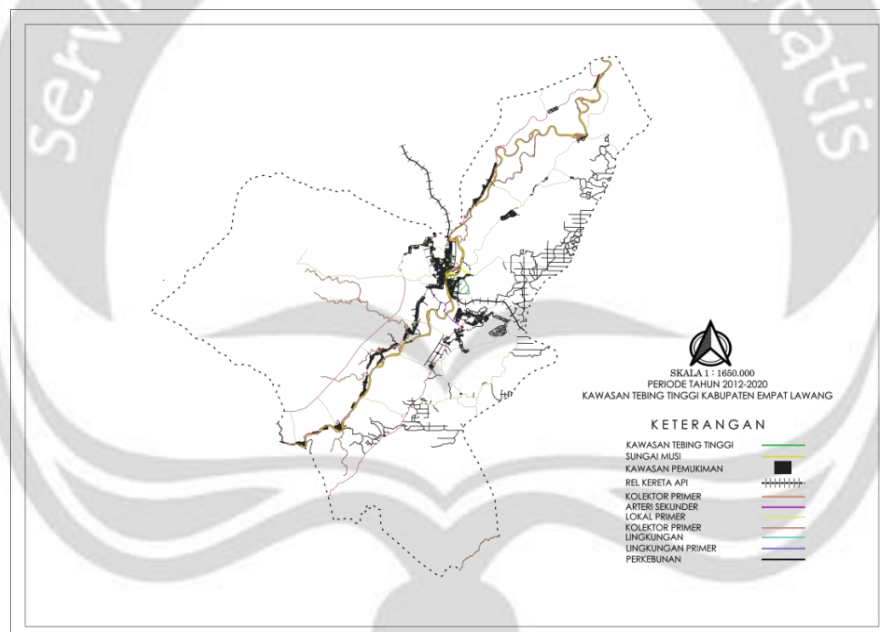
5.2.5. Analisis Faktor Fisik dan Non Fisik Mempengaruhi Terhadap Perkembangan Kawasan Tebing Tinggi Periode Tahun (2007-2020)

Pasca pemekaran periode tahun 2007 dari Kabupaten Lahat resmi terbentuknya wilayah baru dimana telah disahkan berdasarkan dalam hukum terbentuknya kawasan Tebing Tinggi. setelah pemekaran dampak perkembangan terhadap kawasan Tebing Tinggi lebih dipengaruhi oleh faktor politik (non fisik) hal ini didasari dikarenakan adanya pemilihan Kepala Daerah yakni Bupati, Wakil Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan telah diatur dalam undang-undang (UU Nomor 32 Tahun 2004, 2004). Menjelaskan pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yakni melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan serta peran masyarakat. Hal ini bertujuan mengenai kawasan Tebing Tinggi untuk mengatur sistem pemerintahan, tata guna lahan, ekonomi, sosial dan budaya sehingga perkembangan dan sistem kota lebih terarah sehingga tidak terjadi disimilaritas.

Dalam periode pertama perkembangan terhadap kawasan Tebing Tinggi tahun 2007-2012 selama 5 tahun lebih mengarah aspek politik dikarenakan menyusun racangan kepemimpinan di setiap instansi yang terkait dalam sistem pemerintahan, dibandingkan secara aspek fisik tidak terlalu mendominasi mempengaruhi perkembangan kawasan terhadap Tebing Tinggi.



Gambar 5.14 : Peta Perkembangan Kawasan Tebing Tinggi Periode Tahun 2007 Pemekaran dari Kabupaten Lahat
Sumber : Analisis Penulis, 2020



Gambar 5.15 : Peta Perkembangan Periode (2012-2020) Kawasan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang
Sumber : Analisis Penulis, 2020

Setelah adanya pemekaran wilayah terhadap kawasan Tebing Tinggi terjadi tahun 2012, terbentuknya Kecamatan Saling dimana dahulunya merupakan bagian dari Kecamatan Tebing Tinggi dikarenakan luas administrasi terlalu luas maka pemerintahan melakukan pemekaran wilayah secara administratif sebelumnya kawasan Tebing Tinggi luas area yakni 590,93 Km² setelah adanya pemekaran

wilayah kota menjadi 397,63 Km². Hal ini berdampak terhadap penggunaan tata guna lahan menjadi berkurang, sistem pemerintahan berubah maupun status penduduk berdampak terhadap perkembangan kawasan Tebing Tinggi. Berdasarkan (Kabupaten Empat Lawang, 2012). Mengenai pembentukan wilayah baru yakni Kecamatan Saling berdasarkan undang-undang nomor 02 tahun 2012. Dari dampak pemekaran wilayah secara Kecamatan berdampak secara pandangan segi positif dan negatif yakni :

1. Dampak positif

- Aspek kesehatan.
- Administrasi wilayah.
- Aspek perekonomian.
- Aspek fasilitas-fasilitas pendukung terhadap wilayah.

2. Dampak Negatif

- Terjadinya Penyempitan Lahan.
- Adanya Pembagian Aset.
- Kepemilikan Tata Guna Lahan.
- Tekanan terhadap penduduk menetap di kawasan Tebing Tinggi.

Menurut (Kartodirdjo, 1999) dalam pembangunan bangsa berpendapat bahwa secara pemekaran wilayah secara geografis dapat menjadikan penduduk dalam skala proposional dan menjadikan rasa sifat gotong royong sehingga tidak terjadi adanya dismilaritas mengenai sistem pemerintahan dan masyarakat. Sedangkan secara wilayah Kecamatan dan Kelurahan merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Hal ini bertujuan lembaga pemerintahan daerah yang bertanggung jawab kepala daerah atau membantu dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan sesuai dengan kebutuhan daerah diantara untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Table 5.4 Perkembangan Jumlah Penduduk di Kecamatan Tebing Tinggi sebelum dan setelah Pemekaran Tahun 2007-2019

Kecamatan	Jumlah Penduduk Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2007-2019												
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kecamatan Tebing Tinggi	56.022	50.542	54.654	55.639	56.081	44.415	45.056	45.388	45.467	46.120	47.451	48.000	67.847
	<i>Sebelum Terjadi Pemekaran</i>						<i>Setelah Terjadi Pemekaran</i>						

Sumber : BPS Kabupaten Lahat dan BPS Kabupaten Empat Lawang, 2020



Gambar 5.16 : Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Pusat Kota Kabupaten Empat Lawang Tahun (2007-2019)

Sumber : Analisis Penulis, 2020

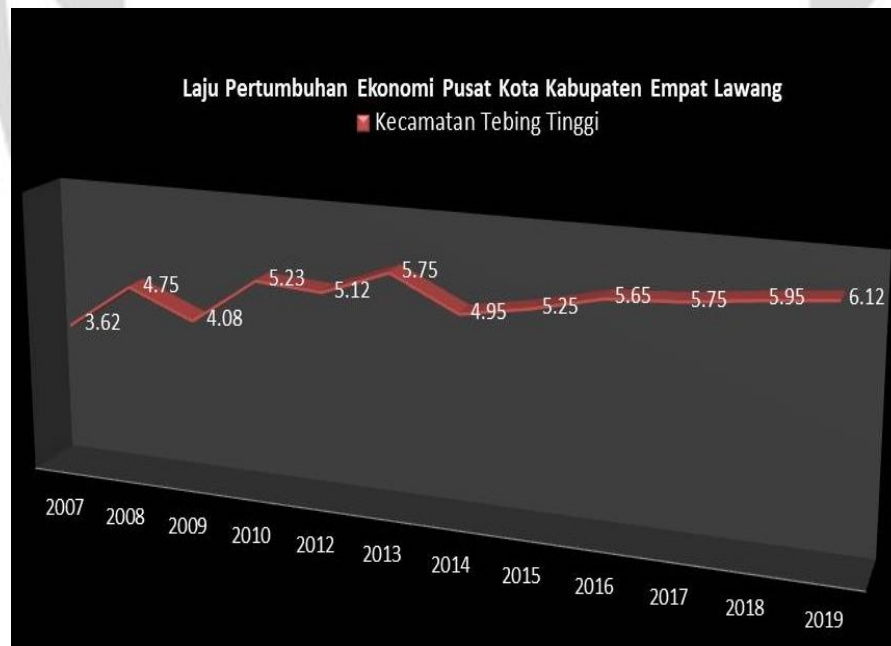
Perkembangan kawasan Tebing Tinggi pertumbuhan secara jumlah penduduk dari tahun 2007-2012 berdasarkan table 5.4 dan gambar 5.16 dikarenakan sebelum adanya terjadi pemekaran Kecamatan berdasarkan data Kabupaten Dalam Angka (Lawang B. K., 2019). Mencatat pertumbuhan penduduk kawasan tebing Tinggi merupakan sebagai pusat kota yakni sebesar setiap tahunnya 2,84% sampai 5,44% terhadap laju pertumbuhan. Hal ini mempengaruhi perkembangan berdampak secara non fisik (pembangunan manusia) munculnya pemukiman-pemukiman yang baru sebagai adanya perpindahan penduduk dari luar kawasan Tebing Tinggi di Kabupaten

Empat Lawang serta meningkatnya angka kelahiran. Selain faktor non fisik adapun faktor fisik yang mempengaruhi memberikan ruang bagi laju pertumbuhan penduduk adanya akses pembangunan jaringan jalan baru setiap desa-desa pada kawasan wilayah Kecamatan Tebing Tinggi dan ini telah dilakukan sejak periode tahun 2015 bertujuan untuk pembangunan yang merata tidak hanya terfokus di bagian Ilir akan berdampak adanya dismilaritas mengenai perkembangan kawasan bagian Ulu kawasan.

Table 5.5 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2007-2019

Kecamatan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Persentase %											
	Periode Tahun											
Kecamatan Tebing Tinggi	2007	2008	2009	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	3.62	4.75	4.08	5.23	5.12	5.75	4.95	5.25	5.40	5.75	5.95	6.12

Sumber : BPS Kabupaten Empat Lawang, 2020



Gambar 5.17 : Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Pusat Kota Kabupaten Empat Lawang Tahun (2007-2019)

Sumber : Analisis Penulis, 2020

Pertumbuhan ekonomi secara perkembangan pada periode tahun 2007 kawasan Tebing Tinggi sebesar 3,62 % masih tingkat rendah dikarenakan adanya pengaruh terhadap sistem politik. Jika dilihat periode tahun 2008-2012 pertumbuhan ekonomi adanya kemajuan yang signifikan dikarenakan adanya pembangunan-pembangunan telah dirancang oleh pemerintah seperti fasilitas-fasilitas pendukung terhadap perkembangan kawasan Tebing Tinggi (faktor fisik). Adapun data menjelaskan selama periode tahun 2013-2019 berdasarkan (Lawang B. K., 2019). Struktur ekonomi masih didominasi oleh adanya lapangan usaha, sektor perkebunan, sektor pertanian, sektor kehutanan dan sektor perikanan.

Hal ini yang mempengaruhi perkembangan secara faktor non fisik (ekonomi) sebagai penggerak roda perekonomian bagi masyarakat dan berdampak terhadap kepemimpinan pemerintahan Kabupaten Empat Lawang sehingga laju pertumbuhan ekonomi sebesar diangka 6,12 % dan jika diukur secara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara makro 65,1% mempengaruhi terhadap sumber daya manusia dimana memiliki peran penting dari terciptanya sebuah pembangunan yaitu bertujuan menciptakan lingkungan masyarakat yang layak dan dapat menjalankan kehidupan secara produktif untuk mencapai pembangunan dalam skala berkelanjutan. Adapun rencana pemerintah Kabupaten Empat Lawang terhadap kawasan Tebing Tinggi tertuju di Desa Terusan Baru dan Desa Terusan Lama merupakan secara letak geografis sangat strategis dan mempunyai jalan poros yang berarti dapat menghubungkan dengan Kecamatan Pendopo, kemajuan untuk dimasa mendatang dengan lingkup ekonomi, sosial, budaya guna sumber daya alam dan teknologi tinggi..

Dalam perkembangan periode tahun 2020 kawasan Tebing Tinggi mengalami perubahan-perubahan secara signifikan dibandingkan periode tahun 2007-2012 hanya terfokus terhadap faktor politik, seiring dengan waktu terus terjadi perubahan dialami oleh kawasan Tebing Tinggi baik secara faktor fisik maupun non fisik seperti laju pertumbuhan penduduk, tata guna lahan, pembangunan jaringan jalan baru dan fasilitas sarana dan prasarana.

*Table 5.6 Elemen-Elemen Perkembangan Kawasan Tebing Tinggi
Kabupaten Empat Lawang*

No	Perkembangan Kawasan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Menurut Periode dan Elemen-Elemen Perkembangan Kota
1	<p style="text-align: center;">Periode tahun (1012-1514) sampai era Kesultanan Palembang tahun 1830</p> <p>Periode awal perkembangan ditandai pemukiman-pemukiman penduduk sepanjang tepian Sungai Musi pada kawasan Tebing Tinggi.</p>
2	<p style="text-align: center;">Periode Pemerintah era Hindia Belanda tahun (1870-1900)</p> <p>Periode era Hindia Belanda ditandai dengan pembangunan-pembangunan yakni adanya tugu titik nol, bangunan pemerintah, benteng pertahanan, stasiun kereta api, terowongan kereta api, jembatan penghubung antara Ulu dan Ilir, pemukiman penduduk tepian Sungai Musi selama era Hindia Belanda tidak ada perubahan baik secara bentuk tipologi bangunan.</p>
3	<p style="text-align: center;">Periode Pemerintah Jepang tahun (1942-1945)</p> <p>Periode pemerintahan Hindia Belanda berakhir dengan kedatangan Jepang secara perkembangan kawasan mengenai dampak terhadap elemen-elemen kota tidak adanya perubahan secara signifikan hanya memanfaatkan peninggalan bangunan-bangunan pada masa itu baik antara wilayah kawasan Ulu dan Ilir Desa P.S Tebing Tinggi, masa era Jepang hanya membangun jaringan jalan sehingga menghubungkan dengan wilayah Kabupaten Lahat.</p>
4	<p style="text-align: center;">Periode Kemerdekaan sampai Pemerintahan Kabupaten Lahat</p> <p>Setelah pasca pemerintah Hindia Belanda dan pemerintah Jepang timbulnya periode kemerdekaan sampai pemerintahan Kabupaten Lahat elemen-elemen terhadap perkembangan di masa kemerdekaan tidak ada perubahan dibandingkan masa pemerintah Kota Lahat kawasan Tebing Tinggi hilangnya tugu titik nol kilometer sebelum di masa Kolonial dan Jepang, adanya penambahan seperti pasar Tebing Tinggi, jembatan dan jaringan jalan. Elemen-elemen tetap di era Hindia Belanda masih bertahan sampai masa pemerintahan Kabupaten Lahat.</p>
5	<p style="text-align: center;">Periode Pemekaran tahun 2007 - 2020 Kawasan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang</p> <p>Elemen-elemen perkembangan kota kawasan Tebing Tinggi periode tahun 2007 merupakan hasil dari pemekaran wilayah dari Kabupaten Lahat merupakan induk pusat kota, bangunan-bangunan tetap dari peninggalan era Hindia Belanda dialihkan menjadi fungsi rumah dinas kantor Bupati yang bersifat kegiatan pemerintah dan titik nol kilometer pada kawasan dijadikan tempat kantor layanan publik.</p>

Sampai tahun 2007 – 2020 bangunan era Hindia Belanda tidak ada perubahan baik secara bentuk maupun material sampai pemukiman-pemukiman penduduk tepian Sungai Musi tidak perubahan. Setelah periode pertama dari pemekaran ditandai adanya bangunan kawasan pemerintah dibagian wilayah Ilirnya kawasan Tebing Tinggi seperti tugu emas, jembatan kuning, kantor bupati. Adanya pemekaran tahun 2012 hal ini mempengaruhi elemen-elemen terbentuknya di kawasan Tebing Tinggi. secara bentuk kawasan pemukiman-pemukiman penduduk antara Ulu dan Ilir kawasan memiliki secara arsitektural mempunyai perbedaan. Untuk Desa Kemang Manis sampai Desa Batu Pancet bangunan-pemukiman masih bentuk tradisional dan menggunakan material kayu terletak bagian Ulu Tebing Tinggi, sedangkan bagian Ilir elemen-elemen perkembangan kota sudah mengarah modern hal ini ditandai adanya kawasan bangunan pemerintah.

Sumber : Analisis Penulis, 2020

5.3. Faktor Yang Mempengaruhi Terbentuknya Kabupaten Empat Lawang dari Kabupaten Lahat

Pada dasarnya pembentukan suatu daerah merupakan pembentuk wilayah baru merupakan salah satu fenomena yang dimana menunjukkan adanya keinginan aspirasi terhadap masyarakat pada wilayah daerah, daerah Kabupaten sampai ketinggian Kota. Daerah Otonomi Baru (DOB) sudah sejak tahun 1994 di Republik Indonesia. Hal ini berlandaskan dalam peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan telah disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Sejak tahun 2002 adanya wacana pemekaran wilayah terjadi di Kabupaten Lahat dan aspirasi masyarakat maka menginginkan wilayah baru. Maka dapat disimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi yakni sebagai berikut :

1. Faktor Ekonomi

Adanya kawasan dimekarkan kurang tata kelola dengan efektif selama di Kabupaten induk dan kurangnya pembangunan yang merata berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Salah satu hasil sumber daya alam adalah, perkebunan, pertanian, perikanan dan pertambangan sebagai harapan bagi masyarakat. Alasan tersebut merupakan landasan dari masyarakat maupun tokoh masyarakat untuk melakukan pemekaran dari Kabupaten Lahat, tujuannya agar kekayaan sumber daya alam dapat dikelola secara maksimal dan dinikmati bagi yang menetap di wilayah Kecamatan-kecamatan dimekarkan menjadi Kabupaten Empat Lawang.

2. Faktor Sosial

Secara kondisi geografis Kecamatan-kecamatan yang akan dimekarkan menjadi Kabupaten Empat Lawang, jarak akses terhadap pusat Kota Kabupaten Lahat

dikarenakan terlalu jauh jarak tempuh hal ini dapat menyebabkan jarak tempuh dengan transportasi daerah tidak efisien terhadap masyarakat. Dalam keterkaitan terhadap dengan pemerintah seharusnya pemerintah pusat Kota Kabupaten Lahat memberikan kebijakan terhadap pelayanan publik maupun sarana dan prasarana umum harus perlu diperhatikan berdampak kehidupan sosial bagi masyarakat hal ini mengenai dengan pemekaran daerah.

3. Faktor Politik

Secara faktor politik akan mempengaruhi terhadap sistem pemerintahan baik eksekutif maupun non eksekutif sehingga memberikan ruang terhadap elit-elit politik dimana akan menjadi peran sebagai penggagas upaya untuk terwujudnya Kabupaten Empat Lawang dan mereka akan mendapatkan jabatan yang strategis bagi pemerintahan terbentuknya Kabupaten baru selain itu adanya nepotisme selama dimasa kepemimpinan setiap periodenya.

4. Faktor Budaya

Selain faktor ekonomi, sosial dan politik yang mempengaruhi terjadi pemekaran Tebing Tinggi dahulunya pernah dipimpin pemerintahan pada waktu Hindia Belanda dan pemerintahan kekuasaan Jepang. Pemekaran pada wilayah Kabupaten Lahat ada 7 Kecamatan merupakan akan menjadi bagian dari Kabupaten Empat Lawang pada tahun 2007 dalam sejarah Kecamatan ini memiliki nama masyarakat Lintang, Empat Pendekar arti dari Empat Lawang yakni empat pintu dahulunya merupakan penjaga wilayah dari penjajahan zaman Era Hindia Belanda sampai kekuasaan Jepang.

Menurut (Makagansa, 2008) dalam buku tentang tantangan pemekaran daerah yakni menjelaskan faktor pendorong terhadap budaya dan sejarah adanya visi politik suatu dari kelompok masyarakat dilihat dari latarbelakang etnik berbeda penggunaan bahasa, suku dan adat istiadat mempengaruhi terhadap faktor budaya. Perbedaan bahasa dan logat yang digunakan dalam sehari-hari oleh masyarakat berada di daerah calon DOB Kabupaten Empat Lawang sangat berbeda dengan kecamatan yang berada di daerah induk yakni Kabupaten Lahat. Hal ini juga menjadi faktor pendorong pemekaran daerah otonomi baru (DOB). Selain perbedaan bahasa didalamnya terdapat etnis sebgaaian besar penduduk bermayoritas Suku Lintang, Suku Pasemah, Suku Saling, Suku Kikim Tebing, kemudian adanya etnis jawa dan sunda yang bermukim di Kabupaten Empat Lawang.

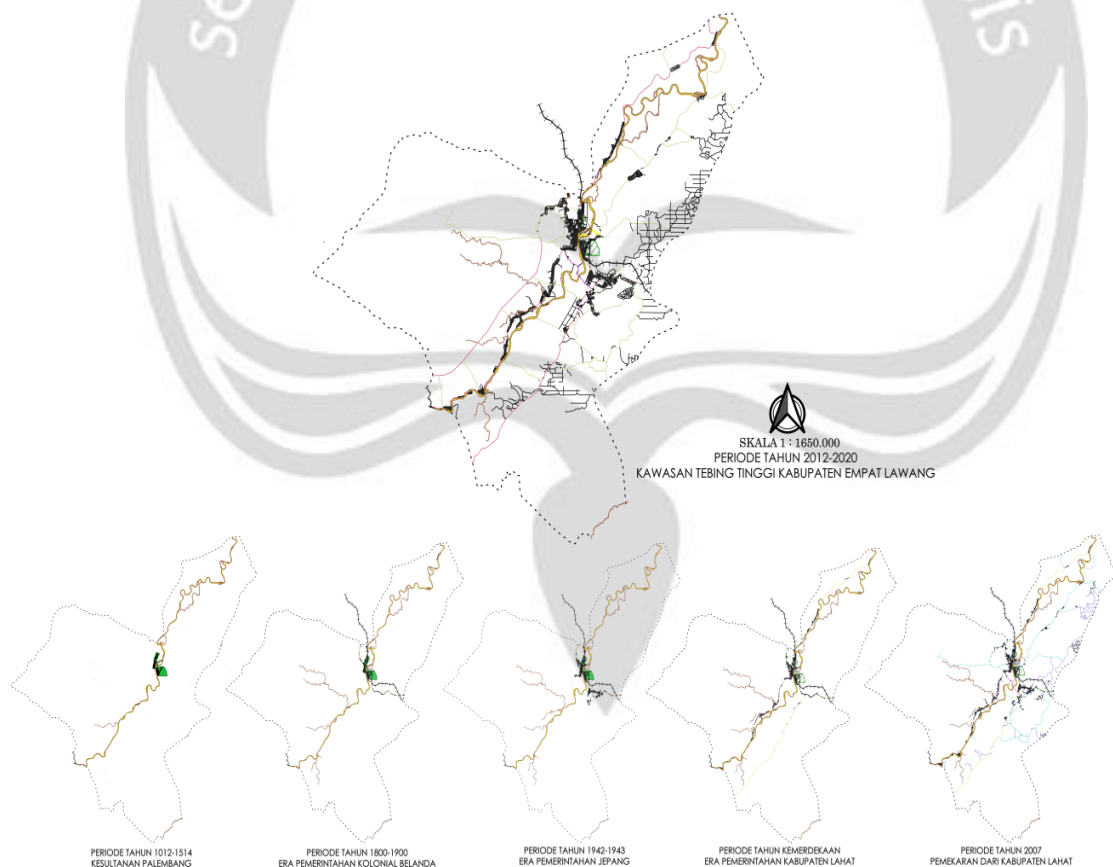
BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Hasil analisis mengenai perkembangan **”Studi Morfologi Kawasan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang”** dapat disimpulkan indikator-indikator yang mempengaruhi terhadap perkembangan sampai terbentuknya wilayah kawasan Tebing Tinggi yakni :

1. Periode tahun (1012-1514) sampai era Kesultanan Palembang (1830).
2. Periode Pemerintah era Hindia Belanda tahun (1870-1900).
3. Periode Pemerintah Jepang tahun (1942-1945).
4. Periode Kemerdekaan sampai Pemerintahan Kabupaten Lahat.
5. Periode Pemekaran tahun 2007 Kabupaten Lahat – Kabupaten Empat Lawang.
6. Periode Tahun (2012-2020) Kawasan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.



Gambar 6.1 : Peta Perkembangan Kawasan Tebing Tinggi
Sumber : Analisis Penulis, 2020

Kawasan Tebing Tinggi secara bentuk morfologi didasari *fragment cities* dan *split cities* hal ini mempengaruhi kawasan baik secara tata guna lahan, pola jaringan jalan dan kepadatan pemukiman penduduk. Secara garis besar penggabungan antara bentuk *fragment cities* dan *split cities* menghasilkan zonasi karakteristik mempengaruhi setiap kawasan Tebing Tinggi. Perkembangan kawasan Tebing Tinggi periode tahun 1012-1514 didasari kedatangan dari dataran Arab Saudi dan India dan mendirikan pemukiman penduduk di tepian Sungai Musi sampai era Kesultanan Palembang tahun 1830 menyebabkan adanya pengaruh seperti faktor sosial budaya, religus sampai sektor perdagangan jasa dan sektor pertanian sedangkan alat transportasi air menggunakan perahu belum ada pembangunan jembatan menghubungkan antara Ulu dan Ilir. Menurut (Prof. Drs. Nawiyanto, 2011) dalam buku tentang Kesultnan Palembang Darussalam Sejarah dan Warisan Budaya lebih dominan mengarah sektor pertanian disebabkan berkat kondisi tanah yang subur merupakan sebagai utama bagi penduduk kawasan Tebing Tinggi di masa kedatangan dari dataran Arab Saudi, India sampai era Kesultanan Palembang Darussalam.

Periode kedua kedatangan Hindia Belanda tahun 1870-1900 bertujuan menjadikan kawasan Tebing Tinggi sebagai pusat kota dikarenakan letak sangat strategis sehingga dimanfaatkan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa itu pembangunan-pembangunan seperti tempat tinggal, benteng pertahanan berorientasi menghadap kearah Sungai Musi. Kedatangan Belanda mempengaruhi kawasan secara sektor ekonomi dan sektor politik, adanya gesekan faktor politik hal ini memicu membuat aturan dan pengendalian baik secara fisik dan maupun non fisik, kawasan Tebing Tinggi ditandai dengan pembangunan jaringan rel kereta api merupakan sebagai fasilitas penunjang kebutuhan militer dan pemerintahan. Menurut (Sevenhoven, 1971) mencatat sebagai wilayah menghasilkan produk-produk penting bagi Belanda digunakan untuk menyuplai pasar di Eropa dikarenakan sektor pertanian Desa P.S Tebing Tinggi memiliki kualitas sangat baik. Dalam konsep barat, sistem disebut dengan istilah *Swidden Argiculture* atau *Slash and Burn Argiculture*, secara umum wilayah-wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk masih relatif rendah hal ini terjadi di kawasan Tebing Tinggi pemukiman penduduk masih terfokus pada tepian Sungai Musi.

Periode pemerintahan Jepang merupakan periode masa yang sangat singkat dan dianggap tidak memiliki sejarah maupun tidak banyak cerita, kawasan Tebing Tinggi merupakan wilayah dianggap memiliki nilai strategis bagi pemerintahan Jepang mendapatkan sumber-sumber daya alam dimana dapat dimanfaatkan sebagai menyuplai bagi tentara di masa pemerintahan Jepang. Selain kawasan Tebing Tinggi wilayah Palembang dianggap memiliki nilai strategis adanya jalur transportasi yakni terdapat aliran Sungai Musi. Kawasan Tebing Tinggi berganti menjadi wilayah kewedanaan hal ini mempengaruhi terhadap sistem politik dibuat oleh pemerintah Jepang lebih besar dibandingkan sistem politik pada zaman pemerintahan Kolonial Belanda. Sejak awal kedatangan pemerintahan Jepang pada kawasan Tebing Tinggi tidak didominasi terhadap secara sektor infrastruktur hanya mementingkan terhadap sektor perekonomian hal ini menjadikan penyokong ekonomi bagi militer Jepang dan pemerintah berbasis di Desa P.S Tebing Tinggi.

Perkembangan kawasan Tebing Tinggi pasca kemerdekaan dari pemerintahan Jepang berdampak terhadap sistem politik hal ini mempengaruhi keputusan-keputusan yang dibuat oleh Kabupaten Lahat merupakan pusat pemerintah. Tahun 1956 berlandaskan Tentang Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 menjelaskan pembentukan daerah tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan daerah tingkat I Sumatera Selatan yakni kawasan Tebing Tinggi dan Pagar Alam merupakan satu induk wilayah dengan Kabupaten Lahat. Berdasarkan data (Lahat B. P., 2001) mencatat tahun (2001-2005) bahwa perkembangan kawasan dominan lebih mengarah faktor non fisik yakni terkait sektor perkebunan dan sektor pertanian meliputi seperti kelapa sawit dan kopi yang mempengaruhi perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Adapun catatan secara makro terhadap perkembangan kawasan Tebing Tinggi dalam buku Kabupaten Lahat Dalam Angka (Lahat B. K., 2006) merupakan berbasis sektor pertanian hal ini sejak dari era pemerintahan Hindia Belanda sudah menjadi sektor utama bagi perekonomian. Hampir sebagian 80% di sektor sekunder yakni meliputi industri-industri seperti konstruksi, tahun 2003-2005 terjadi perubahan pergeseran terhadap sektor pertanian. Sebaliknya adanya transformasi disebabkan Kabupaten Lahat adanya desentralisasi berdampak terhadap pemekaran wilayah

terjadi di Pagar Alam. Pada tahun 2002 timbulnya wacana pemekaran wilayah di Kabupaten Lahat mempengaruhi faktor politik terjadi di kawasan Tebing Tinggi baik dalam pemerintahan dan tokoh masyarakat. Hasil dari terbentuknya wilayah pemekaran baru berdampak dengan kawasan merupakan sebagai pusat pemerintahan dan kota, hal ini mempengaruhi faktor politik (faktor non fisik), selain itu mengakibatkan adanya perubahan-perubahan baik secara fisik maupun non fisik terhadap kawasan seperti tata guna lahan, jaringan jalan, ekonomi dan status pemukiman penduduk.

Pasca pemekaran periode tahun 2007 dari Kabupaten Lahat resmi terbentuknya wilayah baru dimana telah disahkan berdasarkan dalam hukum terbentuknya kawasan Tebing Tinggi. setelah pemekaran dampak perkembangan terhadap kawasan Tebing Tinggi lebih dipengaruhi oleh faktor politik (non fisik) hal ini didasari dikarenakan adanya pemilihan Kepala Daerah yakni Bupati, Wakil Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan telah diatur dalam undang-undang (UU Nomor 32 Tahun 2004, 2004). Dalam periode pertama perkembangan terhadap kawasan Tebing Tinggi tahun 2007-2012 selama 5 tahun lebih mengarah aspek politik dikarenakan menyusun racangan kepemimpinan di setiap instansi yang terkait dalam sistem pemerintahan, dibandingkan secara aspek fisik tidak terlalu mendominasi mempengaruhi perkembangan kawasan terhadap Tebing Tinggi. Setelah adanya pemekaran wilayah terhadap kawasan Tebing Tinggi terjadi tahun 2012, terbentuknya Kecamatan Saling dimana dahulunya merupakan bagian dari Kecamatan Tebing Tinggi dikarenakan luas administrasi terlalu luas maka pemerintahan melakukan pemekaran wilayah secara administratif sebelumnya kawasan Tebing Tinggi luas area yakni 590,93 Km² setelah adanya pemekaran wilayah kota menjadi 397,63 Km².

Hal ini berdampak terhadap penggunaan tata guna lahan menjadi berkurang, sistem pemerintahan berubah maupun status penduduk berdampak terhadap perkembangan kawasan Tebing Tinggi. Berdasarkan (Kabupaten Empat Lawang, 2012). Perkembangan kawasan Tebing Tinggi pertumbuhan secara jumlah penduduk dari tahun 2007-2012. Mencatat pertumbuhan penduduk kawasan tebing Tinggi merupakan sebagai pusat kota yakni sebesar setiap tahunnya 2,84% sampai 5,44% terhadap laju pertumbuhan.

Hal ini mempengaruhi perkembangan berdampak secara non fisik (pembangunan manusia) munculnya pemukiman-pemukiman yang baru sebagai adanya perpindahan penduduk dari luar kawasan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang serta meningkatnya angka kelahiran.

Selain faktor non fisik adapun faktor fisik yang mempengaruhi memberikan ruang bagi laju pertumbuhan penduduk adanya akses pembangunan jaringan jalan baru setiap desa-desa pada kawasan wilayah Kecamatan Tebing Tinggi dan ini telah dilakukan sejak pada periode tahun 2015 bertujuan untuk pembangunan yang merata tidak hanya terfokus di bagian ilir akan berdampak adanya disimilaritas mengenai perkembangan kawasan bagian ulu. Pertumbuhan ekonomi secara perkembangan pada periode tahun 2007 kawasan Tebing Tinggi sebesar 3,62 % masih tingkat rendah dikarenakan adanya pengaruh terhadap sistem politik. Jika dilihat periode tahun 2008-2012 pertumbuhan ekonomi adanya kemajuan yang signifikan dikarenakan adanya pembangunan-pembangunan telah dirancang oleh pemerintah seperti fasilitas-fasilitas pendukung terhadap perkembangan kawasan Tebing Tinggi (faktor fisik). Selama periode tahun 2013-2019 berdasarkan (Lawang B. K., 2019). Struktur ekonomi masih didominasi oleh adanya lapangan usaha, sektor perkebunan, sektor pertanian, sektor kehutanan dan sektor perikanan secara faktor non fisik (ekonomi) sebagai penggerak roda perekonomian bagi masyarakat dan berdampak terhadap kepemimpinan pemerintahan Kabupaten Empat Lawang sehingga laju pertumbuhan ekonomi sebesar diangka 6,12 % dan jika diukur secara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara makro 65,1% mempengaruhi terhadap sumber daya manusia dimana memiliki peran penting dari terciptanya sebuah pembangunan yaitu bertujuan menciptakan lingkungan masyarakat yang layak dan dapat menjalankan kehidupan secara produktif untuk mencapai pembangunan dalam skala berkelanjutan.

Rencana pemerintah Kabupaten Empat Lawang terhadap kawasan Tebing Tinggi tertuju di Desa Terusan Baru dan Desa Terusan Lama merupakan secara letak geografis sangat strategis dan mempunyai jalan poros yang berarti dapat menghubungkan dengan Kecamatan Pendopo, kemajuan untuk dimasa mendatang dengan lingkup ekonomi, sosial, budaya guna sumber daya alam dan teknologi

tinggi. Perkembangan tahun 2020 kawasan Tebing Tinggi mengalami perubahan-perubahan secara signifikan dibandingkan periode tahun 2007-2012 hanya terfokus terhadap faktor politik, seiring dengan waktu terus terjadi perubahan dialami oleh kawasan Tebing Tinggi baik secara faktor fisik maupun non fisik seperti laju pertumbuhan penduduk, tata guna lahan, pembangunan jaringan jalan baru dan fasilitas sarana dan prasarana.

Setiap periode-periode kawasan Tebing Tinggi mempengaruhi terhadap elemen-elemen perkembangan kota. Dapat disimpulkan periode awal tahun 1012-1514 sampai pemerintahan Jepang tahun 1942-1945 menunjukkan tidak adanya perubahan terhadap elemen-elemen kota, sedangkan pasca kemerdekaan dan pemerintahan Kabupaten Lahat hilangnya tugu titik nol kilometer berada kawasan Tebing Tinggi ini merupakan peninggalan era Hindia Belanda sedangkan bangunan-bangunan peninggalan kolonial tidak ada perubahan secara arsitektural. Setelah adanya pemekaran terhadap kawasan Tebing Tinggi untuk bangunan era Belanda dialihkan fungsi untuk pemerintah seperti rumah dinas dahulunya merupakan bangunan tempat tinggal dan pusat kantor pemerintah bagi orang Eropa. Periode pertama setelah pemekaran 2007-2012 ditandai seperti tugu emas, jembatan kuning, kantor bupati. Adanya pemekaran tahun 2012 hal ini mempengaruhi elemen-elemen terbentuknya di kawasan Tebing Tinggi. secara bentuk kawasan pemukiman-pemukiman penduduk antara Ulu dan Ilir kawasan memiliki secara arsitektural berbeda. Untuk Desa Kemang Manis sampai Desa Batu Pancet bangunan-bangunan pemukiman masih bentuk tradisional dan menggunakan material kayu terletak bagian Ulu Tebing Tinggi, sedangkan bagian Ilir elemen-elemen perkembangan kota sudah mengarah modern hal ini ditandai adanya kawasan bangunan pemerintah.

6.2. Saran

Saran merupakan hasil kesimpulan telah didapat dalam analisis terhadap penelitian terkait, maka sebagai penulis memberikan saran kepada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dan bagi masyarakat setempat tinggal di kawasan Tebing Tinggi.

6.2.1. Saran Terhadap Pemerintah Pusat Kota Kabupaten Empat Lawang

Kawasan Tebing Tinggi merupakan hasil dari sejarah setiap periode-periode mengawali perkembangan adanya peninggalan-peninggalan bangunan sejarah diharapkan kepada pemerintah dijadikan zona kawasan lindung yaitu mengenai bangunan peninggalan di era Kolonial Belanda sektor kebudayaan maupun pariwisata perlu diangkat sehingga masyarakat baik dalam dan luar dapat mengetahui budaya mencerminkan baik kawasan Tebing Tinggi maupun wilayah lainnya tidak hasil di sektor perkebunan dan sektor pertanian sedangkan untuk pembangunan-pembangunan antara Ulu dan Ilir diharapkan merata tidak adanya disimilaritas.

6.2.2. Saran Terhadap Masyarakat Pusat Kota Kabupaten Empat Lawang

Di masa yang akan mendatang masyarakat dan pemerintahan pusat Kota Kabupaten Empat Lawang lebih kompak lagi dalam bekerjasama, lebih terbuka dan mau bekerjasama sehingga untuk memberikan perubahan untuk memajukan setiap desa-desa yang berpotensi berada di kawasan Tebing Tinggi bertujuan meningkatkan sumber pendapatan masyarakat. Dengan demikian pemerintah akan lebih mudah melakukan program-program yang dapat meningkatkan taraf hidup di kawasan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.

DAFTAR PUSTAKA

- A Dinata, B. U. (2019). Morfologi Kawasan Permukiman Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. *Seminar Nasional Pembangunan Wilayah Dan Kota Berkelanjutan*, 13-20.
- A.moleong., L. (1989). *metodelogi penelitian kualitatif*. indonesia: remaja rosda karya.
- Abdurrahman, S. (1987). *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Media Sarana Press.
- Allain, R. (2004). Urban Morphology : Geografi, Management and architecture of the city. *Management and architecture of the city*, 254.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* . jakarta: Rineka Cipta.
- Aulum, D., & Ulum, B. (2019). Morfologi Kawasan Permukiman Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau. *Seminar Nasional Pembangunan Wilayah dan Kota Berkelanjutan, Volume 1*(1), 13-20.
- Branch, M. C. (1995). *Perencanaan kota komprehensif : pengantar & penjelasan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- C.Sardjono. (1996). *Teori-Teori Komunikasi, Buku Pegangan Kuliah Fisipol*. surakarta: universitas sebelas maret.
- Canaldhy, R. S., & Hairi, M. A. (2017, Januari). Pemekaran Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2016. *Jurnal Pemerintah dan Politik, Volume 2*(1), 45-54.
- Carolyn, M. S., & muhammad, s. R. (2018). Identifikasi Perkembangan Morfologi Kotalama Semarang. *Temu Ilmiah Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia (IPLBI)* 7, 7-13.
- Djohan, D. (2005). *Fenomena Etnosentrisme dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Dr Ali, M. A. (2018, Januari-Juni). Dampak Pemekaran Daerah Pada Pelayanan Publik Ditinjau Menurut Sistem Hukum Indonesia. *Petita, Volume 3*, 224-239.

- Falah, M., Herlina, N., & Sofianto, K. (2017, Maret). Morfologi Kota-Kota di Priangan Timur Pada Abad XX-XXI : Studi Kasus Kota Garut, Ciamis dan Tasikmalaya. *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, Volume 9(1), 1-14.
- Greglory, M. M., Jeffrey, I. K., & Judy, O. W. (2016). Morfologi Wilayah Peri Urban Di Kecamatan Pineleng. *Spasial Perencanaan Wilayah dan Kota*, Volume 3, 254-264.
- Hakim, A. (2017, Februari). Analisi Dampak Pemekaran Daerah Ditinjau Dari Aspek Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti dari Kabupaten Bengkalis). *JOM Fekon*, Vol. 4(1), 843-857.
- Hamri, E., Putri, E. I., Siregar, H., & Bratakusumah, D. (2016, Juni). Kebijakan Pemekaran Wilayah Dan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kota. *JEKP*, 111-125.
- Hendarto, R. M. (1997). Teori Perkembangan dan Pertumbuhan Kota. *Makalah*, 50-56.
- Hillier B, H. J. (1984). *The social logic of space*. United Kingdom: Cambridge University Press.
- Huzain, A. (2008). Jurnal Wilayah Dan Lingkungan. *Perkembangan Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Lahat Sebelum Dan Setelah Pemekaran*, 1-10.
- Ir. H. Suharli M Yamin, M. (2020, February 15). Asisten II Bupati Kabupaten Empat Lawang. (I. Sumarwoto, Interviewer) Tebing Tinggi, Sumatera Selatan, Kabupaten Empat Lawang.
- Jumhari. (2010). *Sejarah Sosial Orang Melayu, Keturunan Arab, dan Cina Di Palembang: Dari Masa Kesultanan Palembang*. Padang: BPSNT Padang Press.
- Kaiser, e. a. (1995). *Urban Land use Planning. 4th Edition*. Chicago: Univeristy of Illinois.
- Kartodirdjo, S. (1999). *Multidimensi pembangunan bangsa : etos nasionalisme dan negara kesatuan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Khairullah, & Cahyadin, M. (2006). Evaluasi Pemekaran Wilayah Di Indonesia Studi Kasus Kabupaten Lahat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 11(3), 261-277.
- Krier, R. (1979). *Urban Space*. London: Academy Editions.

- Kuntowijoyo. (2008). *Metodologi Sejarah Edisi Kedua*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Lahat, B. K. (2006). *Kabupaten Lahat Dalam Angka Tahun 2006*. Kabupaten Lahat: BAPPEDA dan Badan Pusat Statistik.
- Lahat, B. P. (2001). *Kabupaten Lahat Dalam Angka*. Lahat: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lahat.
- Lawang, B. K. (2007). *Tebing Tinggi Dalam Angka 2007/2008*. Kabupaten Empat Lawang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lahat.
- Lawang, B. K. (2019). *Kecamatan Tebing Tinggi Dalam Angka 2019*. Kabupaten Empat Lawang: BPS Kabupaten Empat Lawang.
- Lawang, B. P. (2019). *Kecamatan Tebing Tinggi Dalam Angka*. Kabupaten Empat Lawang: BPS Kabupaten Empat Lawang.
- Lefebvre, H. (1901-1991). *The Urban Question*. Prancis: The Production of Space.
- Lynch, K. (1981). *A Theory of Good City Form*. Cambridge: MIT Press.
- Makagansa. (2008). *Tantangan Pemekaran Daerah*. Yogyakarta: Fufad.
- Marsden, W. (2008). *Sejarah Sumatra*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Marzuki. (2005). *Metodologi Riset*. yogyakarta: Ekonisia.
- Menajang, G. M., Kindangan, J., & Waani, J. (2016). Morfologi Wilayah Peri Urban di Kecamatan Pineleng. *Spasial, Volume 3(3)*, 254-264.
- Miftahul, F., Nina, H., & Kunto, S. (2017). Morfologi Kota-Kota Di Priangan Timur Pada Abad Xx – Xxi; Studi Kasus Kota Garut, Ciamis, Dan Tasikmalaya. *spasial, Volume 9*, 1-14.
- Miles, M. B. (1984). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Morlok, E. K. (1978). *Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi*. (Y. Sianipar, Ed.) Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Moudon. (1997). Urban Morphology. *Urban Morphology as an Emerging Interdisciplinary Field*, 3-10.
- Muqoyyidin, A. W. (2013, Juni). Pemekaran Wilayah Dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris Dan Rekomendasi Ke Depan. *Jurnal Konstitusi, Volume 10(2)*, 289-309.

- Nasution, S. (1988). *Metode penelitian naturalistik kualitatif*. Bandung: Tarsiti.
- Pandu, R. R., Warouw, F., & Lahamendu, V. (2018). Analisis Morfologi Kota Di Kecamatan Malalayang. *Jurnal Spasial*, 5, 150-161.
- Prof. Drs. Nawiyanto, M. P. (2011). *Kesultanan Palembang Darussalam Sejarah dan Warisan Budayanya*. Jember: Jember University Press.
- Puspitasari, R. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembentukan Daerah Baru (Studi Kelayakan Secara Administratif Kabupaten Indragiri Selatan). *Jom FISIP*, volume 1, 1-9.
- Rakasiwi, A. (2014, Oktober). Dampak Pemekaran Terhadap Pembangunan Daerah Di Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2010-2012. *Jom FISIP*, Volume 1(2), 1-12.
- Ratnawati, T. (2005). *Pemekaran Wilayah dan Alternatif Pemecahan Wilayah*. Jakarta: Yayasan Harkat.
- Rendy, S. C., Bayu, W. A., & M. Imam, A. H. (2017). Pemekaran Kabupaten Musi Rawas Utara Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2016. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, Volume 2, 45-54.
- Rossi, A. (1982). *The Architecture of The City*. Cambridge: The MIT Press.
- Sarantakos, S. (1993). *Social Research*. South Melbourne: Macmillan Education.
- Sevenhoven, V. (1971). *Lukisan tentang Ibukota Palembang*. Jakarta: Bhratara.
- Sitompul, C. M., & Roychansyah, M. S. (2018). Identifikasi Perkembangan Morfologi Kota lama Semarang. *Temu Ilmiah Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia (IPLBI)*, 7-13.
- Smith, B. C. (1985). *Decentralization The Territorial Dimension of the state*. Winchester: Massachusetts: Allen & Unwin, Inc.
- Sondarika, W., Dewi, R., & Aan., S. (2017). Dampak Pemekaran Kabupaten Pangandaran Terhadap Potensi Budaya Dan Pariwisata Alam Kabupaten Ciamis. *History and Education Jurnal Artefak*, Vol.4 No.1 April 2017, 35-46.
- Statistik, B. P. (2020). *Kabupaten Empat Lawang Dalam Angka*. Kabupaten Empat Lawang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Empat Lawang.
- Sumatera Selatan, D. P. (1981). *Risalah Sejarah Perjuangan Sultan Mahmud Badaruddin II*. Palembang: team perumus hasil-hasil diskusi sejarah perjuangan Sultan Mahmud Badaruddin II.

- Suprijanto, I. (1996). *Fenomenologi melalui Sinkronik–Diakronik Suatu Alternatif Pendekatan untuk Menjelajahi Esensi Arsitektur Nusantara*. Semarang: Simposium Nasional dalam Rangka Dies Natalies 34 Arsitektur–FTSP.
- Susanti. (2014). Dampak pemekaran wilayah terhadap kesejahteraan di Kabupaten Lampung Utara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 3*, Hal 249-268.
- Udiarto, A. K. (2015). Karakteristik Pengembangan Wilayah Sebelum dan Sesudah Pemekaran Kabupaten Jayapura. *JURNAL WILAYAH DAN LINGKUNGAN, volume 3*, 121-130.
- Widjaja.HAW. (2014). otonomi daerah dan daerah otonom. In Widjaja.HAW., *otonomi daerah dan daerah otonom* (p. 100). jakarta: Rajawali Pers.
- Winarno, S. (1994). *PENGANTAR PENELITIAN ILMIAH DASAR METODE TEKNIK*. Bandung: Tarsito.
- Wulandari, E., & Aulia, F. (2018, Juni). Pengaruh Morfologi Kota Terhadap Ekologi Perkapungan Tradisional Di Kota Banda Aceh, Indonesia. *Jurnal Arsitektur Zonasi, Volume 1*(1), 45-54.
- Yunus, H. S. (2000). *Struktur Tata Ruang Kota*. Yogyakarta: Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada.
- Yunus, H. S. (2005). *Manajemen Kota*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Otonomi Daerah, Jakarta: Pemerintah, 2004.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.

Rancangan Undang-Undangnya pada 8 Desember 2006 Tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang bersama 15 kabupaten/kota baru lainnya.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang Di Provinsi Sumatera Selatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Daerah.

Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2008 Tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan.

Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :20/PRT/M/2011 Tentang Pendoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah Otonom
Baru.

Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang
Pembentukan Kecamatan Saling dan Kecamatan Pendopo Barat.

Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2012.

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2012-
2032.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah
Daerah.



STUDI MORFOLOGI KAWASAN TEBING TINGGI KABUPATEN EMPAT LAWANG

Imam Sumarwoto

Program Studi Magister Arsitektur, Program Pascasarjana

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jl. Babarsari no.44 Yogyakarta

E-mail: homedarchitects89@gmail.com

Abstract: *Tebing Tinggi area is the city center of Regency Four Lawang wrong expansion of the area of Lahat Regency in the period of 2007 occurred expanded aimed at the welfare of the community and to the development of the city can be seen in terms of morphology. This study aims to identify the development of Tebing Tinggi area is the city center of Empat Lawang Regency. Research method with synchronous approach, diakronik and qualitative method. The results of the study can be concluded that the existence of indicators that affect the development until the formation of the downtown area of Tebing Tinggi area this causes an impact on economic, social, political and cultural factors to the development of the Tebing Tinggi area, this is characterized by the presence of development elements to the center of The City of Empat Lawang Regency.*

Keyword: *City Center, Morphology, Empat Lawang Regency*

Abstrak: Kawasan Tebing Tinggi merupakan pusat kota dari Kabupaten Empat Lawang salah pemekaran wilayah dari Kabupaten Lahat pada periode tahun 2007 terjadi dimekarkan bertujuan kesejahteraan masyarakat maupun terhadap perkembangan kota dapat dilihat dari segi morfologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perkembangan terhadap kawasan Tebing Tinggi merupakan pusat kota Kabupaten Empat Lawang. Metode penelitian dengan pendekatan secara sinkronik, diakronik maupun metode kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan adanya indikator-indikator yang mempengaruhi terhadap perkembangan sampai terbentuknya wilayah pusat kota kawasan Tebing Tinggi hal ini menyebabkan berdampak terhadap faktor ekonomi, sosial, politik dan budaya terhadap perkembangan kawasan Tebing Tinggi, hal ini ditandai adanya elemen-elemen perkembangan terhadap pusat Kota Kabupaten Empat Lawang.

Kata Kunci: Pusat Kota, Morfologi, Kabupaten Empat Lawang

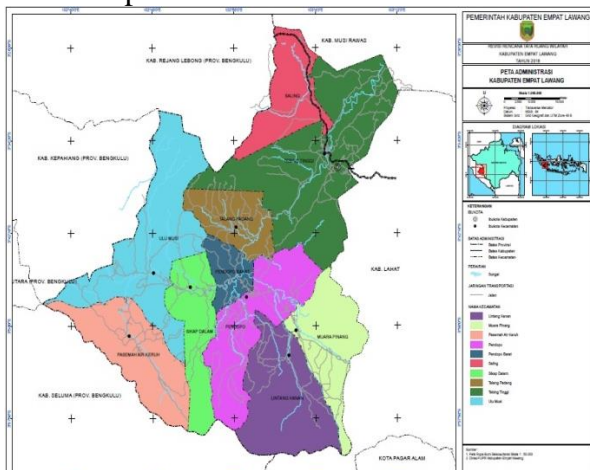
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu cara untuk mengembangkan suatu daerah atau wilayah ialah melalui pemekaran. Pemekaran di Indonesia yakni bertujuan untuk wilayah administratif baru baik secara tingkat Provinsi maupun Kota dan Kabupaten dari induknya. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa pembentukan suatu daerah harus ditetapkan dengan undang-undang tersendiri. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) pasal yang sama menyebutkan sebagai berikut : Undang-undang pembentukan daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup nama, cakupan wilayah, batas, ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukkan pejabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dokumen, serta perangkat daerah. Pada implementasinya, sejak tahun 2000 terjadi pemekaran wilayah dari Provinsi Bangka Belitung yang awalnya berasal dari Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya, Provinsi Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Maluku dan Papua juga telah melalui administrasi pemekaran yang telah dibentuk oleh pemerintah pusat. Dari kesekian Provinsi berada di Indonesia, sedangkan terjadi Provinsi Sumatera Selatan adanya terjadi pemekaran terhadap Kabupaten ada 10

wilayah dimekarkan dan termasuk pemekaran Kabupaten Empat Lawang merupakan induk dari Kabupaten Lahat.



Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Empat Lawang, 2018

Kabupaten Empat Lawang memiliki 10 wilayah Kecamatan sebagai berikut :

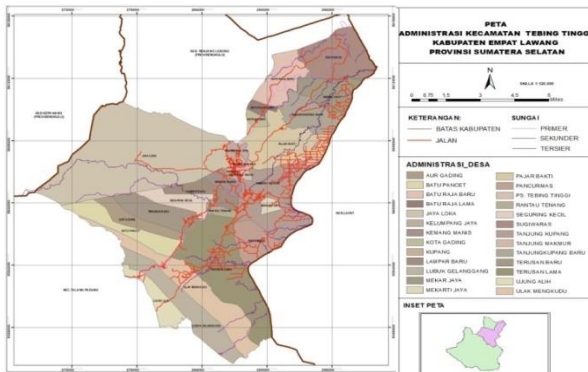
1. Kecamatan Tebing Tinggi.
2. Kecamatan Saling.
3. Kecamatan Talang Padang.
4. Kecamatan Ulu Musi.
5. Kecamatan Pasemah Air Keruh.
6. Kecamatan Sikap Dalam.
7. Kecamatan Pendopo Barat.
8. Kecamatan Pendopo.
9. Kecamatan Lintang Kanan.
10. Kecamatan Muara Pinang.

Fokus penelitian ini terletak pada kawasan Tebing Tinggi merupakan pusat Kota Kabupaten Empat Lawang yang merupakan pemekaran dari kabupaten Lahat pada tahun 2007. Kecamatan Tebing Tinggi mempunyai luas wilayah 362,93 km² di kabupaten Empat Lawang. Pemilihan kecamatan tersebut dikarenakan kecamatan Tebing Tinggi sebagai pusat Kota kabupaten Empat Lawang kecamatan Tebing Tinggi Mempunyai 26 desa saat ini, wilayah kabupaten saat ini 81 % rata-rata mempunyai kawasan hutan selain itu juga warga setempat kebanyakan bercocok tanaman seperti Kelapa Sawit, Karet, Kopi, Duku, Durian dan Lada sebagai roda perekonomian. Asal – usul terjadinya Kabupaten Empat Lawang tentang pemekaran wilayah berawal dari aspirasi masyarakat yang difasilitasi oleh pengurus Forum Perjuangan Masyarakat

Lintang Empat Lawang keanggotaan forum tersebut terdiri dari lembaga swadaya masyarakat, tokoh adat, pemuka masyarakat dan tokoh agama. Kemudian untuk melancarkan proses pemekaran dibentuk forum dengan nama Forum Pemekaran Masyarakat Lintang Empat Lawang (FPM L IV L), forum bersepakat mengajukan pembentukan Kabupaten baru yaitu dengan nama Kabupaten Empat Lawang kepada pemerintahan Kabupaten Lahat dan disambut baik oleh pemerintah serta seluruh lapisan masyarakat yang tergabung dalam wilayah pemekaran.

Pusat pemerintahan berada di Desa Tanjung Beringi dan Desa Talang Banyu berdasarkan hasil wawancara dengan asisten II Bupati Kabupaten Empat Lawang Ir. H. Suharli M Yamin, M.Si. kedepan Kabupaten Empat Lawang akan mengembangkan zona pertanian sebagai penggerakan roda perekonomian masyarakat saat ini dalam tahap proses perencanaan seluas 84 Hektar di peruntukan sebagai tempat pelatihan pertanian maupun akan membangun universitas yang akan dirujuk untuk pembangunan kedepannya sesuai dengan visi dan misi dari Bupati Kabupaten Empat Lawang. Pusat kantor pemerintah akan didirikan kembali seperti kantor bupati maupun kantor yang lain terletak di jalan poros yang menghubungkan Kecamatan Pendopo saat ini dicanangkan sebagai zona kawasan perekonomian.

Lokasi penelitian ini terletak di Kabupaten Empat Lawang yaitu Kecamatan Tebing Tinggi sebagai pusat kota dan administratif wilayah. Luas wilayah kawasan 397,63 Km² merupakan kecamatan paling terbesar di banding dari kecamatan yang berada di Kabupaten Empat Lawang jika dipersentasekan menjadi 16% dengan jumlah penduduk 67.847 jiwa, serta untuk kawasan pusat kota topografinya mencapai 100 meter dari permukaan laut (dpl).



Gambar 2. Peta Administrasi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan

Sumber: Digambar dari QGIS, 2020

Batasan wilayah Kecamatan Tebing Tinggi :

- Utara berbatasan dengan wilayah Kab. Renjang Lebong Provinsi Bengkulu dan Kecamatan Saling.
- Barat berbatasan dengan wilayah Kab. Kepahiang Provinsi Bengkulu.
- Timur berbatasan dengan wilayah Kab. Lahat Provinsi Sumatera Selatan.
- Selatan berbatasan dengan wilayah kecamatan Talang Padang.

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi perkembangan morfologi kawasan Tebing Tinggi sebelum dan sesudah terjadi pemekaran, mengkaji perkembangan baik secara aspek fisik maupun non fisik sehingga terjadinya pemekaran dan faktor yang mempengaruhi terjadinya terbentuk Kabupaten Empat Lawang dari Kabupaten Lahat.

TINJUAN PUSTAKA

Morfologi merupakan pemikiran tentang bentuk dan struktur ruang dan lingkungan binaan terhadap suatu kawasan dan itu sangat berkaitan merencanakan dan membangun lingkungan secara fungsional terhadap aktivitas manusia dalam pendekatan morfologi terhadap kota merupakan suatu kajian ekspresi bentuk tidak hanya mencakup aspek fisik tetapi juga aspek non-fisik (sejarah, kebudayaan, sosial, dan ekonomi). Dalam morfologi kota merupakan suatu cerminan dari fungsi dan ide-ide perencanaan dan pembangunan di setiap tahapan perkembangannya baik secara proses berdiri maupun membuka bangunan dilingkungan (Krier, 1979).

Sedangkan berdasarkan menurut (Lefebvre, 1901-1991). Menyatakan bahwa ruang bukanlah entitas yang netral melainkan ruang sebagai ruang eksistensi sosial dan kelengkapan-kelengkapan ruang beserta penjelasannya. Selain itu morfologi kota merupakan cabang ilmu geografis dan arsitektur, mempelajari perkembangan bentuk fisik di kawasan perkotaan, yang terkait dengan arsitektur bangunan, dan juga sistem sirkulasi, ruang terbuka, serta prasarana perkotaan (khususnya jalan sebagai pembentuk struktur ruang yang utama). Secara garis besar, wujud fisik kota tersebut merupakan manifestasi visual dan parsial yang dihasilkan dari interaksi komponen-komponen penting pembentuknya yang saling mempengaruhi satu sama lainnya sedangkan bentuk pola morfologi yang tercipta dari perkembangan kota dapat disebut dengan ekspresi keruangan suatu kota. (Allain, 2004).

Komponen morfologi ada 4 bagian yang perlu untuk diperhatikan karena ini berkaitan dengan morfologi kota (Carmona, 2003) yakni antara lain :

1. Guna lahan (Land Uses) menurut (Kaiser, 1995) merupakan komponen pokok pertumbuhan kawasan. Dikarenakan ini dianggap sebagai generator sistem aktivitas yang sangat menentukan pola dan arah pertumbuhan kawasan. Guna lahan sangat mempengaruhi perwujudan fisik kawasan terutama yang terkait dalam pengembangan kawasan terbangun dan tidak terbangun.
2. Struktur bangunan mengarah dari tipologi dalam sebuah analisis morfologi dan dapat dibahas dalam dua aspek, baik secara penataan dan bangunan arsitektur. Pada penataan massa bangunan ini akan terkait dengan kepadatan dan tapak bangunan sementara bangunan arsitektur lebih dalam perwujudan fisik ruang dan bangunan yang merepresentasikan budaya, sejarah dan kreatifitas.
3. Plot atau dimensi membahas pemanfaatan lahan sehingga akan mempengaruhi pembentukan jaringan penghubung, secara umum plot ini sangat dipengaruhi oleh bersifat alamiah terutama adanya kontur dan kondisi geologi, pemikiran secara

hukum plot ini merujuk pemanfaatan dan pengelolaan ruang.

4. Jaringan jalan sebagai jalur penghubung, jalan sangat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas fungsi kawasan, jaringan jalan sebagai ruang publik dianggap generator inti dari kawasan perkotaan atau jantungnya perkotaan (Hillier B, 1984).

Pertumbuhan dan perkembangan kota pada prinsipnya menggambarkan proses suatu kota. Secara umum kota akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan melalui keterlibatan aktivitas sumber daya manusia berupa peningkatan jumlah penduduk dan sumber daya alam dalam kota yang bersangkutan (Hendarto, 1997). Pada umumnya terdapat ada 3 faktor utama mempengaruhi perkembangan kota yaitu :

- a. Faktor penduduk, yaitu adanya pertambahan penduduk baik disebabkan karena pertambahan alami maupun karena migrasi.
- b. Faktor sosial ekonomi, yaitu perkembangan kegiatan usaha masyarakat.
- c. Faktor sosial budaya, yaitu adanya perubahan pola kehidupan dan tata cara masyarakat akibat pengaruh luar, komunikasi dan sistem informasi.

Menurut (Rossi, 1982) Elemen-elemen perkembangan sebuah kota dilihat dari segi dua aspek dari sifat permanen dari sebuah kota yang dipertimbangkan sebagai :

- a. Elemen yang bersifat mendorong kemajuan (*Propelling elements*) sebagai elemen dari bentuk masa lalu yang masih dialami hingga sekarang (*Propelling permanences*).
- b. Elemen patologis (*Pathological elements*) sebagai elemen yang bersifat terisolasi Aldo Rossi menuliskan bahwa kota memiliki kecenderungan untuk terbagi menjadi 3 fungsi utama yaitu perumahan, aktivitas yang tetap, dan sirkulasi. Fungsi aktivitas tetap diartikan sebagai fungsi-fungsi yang bersifat publik dan melayani sebuah kota. Fungsi ini juga meliputi elemen primer kota. Keberadaan elemen primer kota bukan hanya sekedar merupakan monumen melainkan lebih jauh lagi sebagai elemen yang mampu mempercepat proses urbanisasi dalam suatu kota. Area perumahan memang jarang memiliki

karakter sebagai propelling elements atau elemen primer yang dapat berfungsi sebagai generator atau akselerator dalam perkembangan suatu kota, namun dalam analisis evolusi, area perumahan dihubungkan dengan elemen-elemen primer atau propelling elements yang terkait dalam pertumbuhannya.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji mengenai morfologi kawasan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang merupakan sebagai pusat kota dan mengkaji aspek-aspek terjadinya menjadi pemekaran wilayah yang baru. Pada pendekatan metode ini melihat rekam jejak perubahan terhadap perkembangan kawasan Tebing Tinggi maupun secara sinkronik, diakronik dan metode kualitatif. Menurut (Kuntowijoyo, 2008). Sinkronik dan Diakronik, pada dasarnya sinkronik mempelajari peristiwa sejarah dengan dari waktu ke waktu dengan ini bertujuan dapat mengkaji lebih dalam terhadap peristiwa secara meluas. Pada akhirnya seorang sejarawan akan melihat dari segi aspek ekonomi, politik, sosial budaya dan ideologi. Sedangkan cara berpikir diakronik peristiwa sejarah dapat membantu merekonstruksi kembali suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu secara tepat, selain itu dapat juga membantu untuk membandingkan kejadian sejarah dalam waktu yang sama di tempat berbeda yang terkait peristiwanya.

Sedangkan menurut mengutarakan (Suprijanto, 1996). Sinkronik dan diakronik dalam morfologi kota merupakan sebagai metode analisis. Perkembangan morfologi atau perkembangan, aspek diakronik digunakan untuk mengkaji satu aspek yang menjadi bagian dari satu objek sedangkan sinkronik keterkaitan antar aspek dalam kurun waktu tertentu.

Pada pengumpulan data terhadap penelitian morfologi kawasan Tebing Tinggi yakni adanya data primer terkait dengan data lapangan merupakan hasil observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder terkait dengan data literatur merupakan hasil penelitian kepustakaan untuk mendapatkan

landasan teori yang relevan dengan kenyataan lapangan dan topik penelitian mengenai morfologi kawasan Tebing Tinggi di Kabupaten Empat Lawang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

SEJARAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

Kabupaten Empat Lawang merupakan salah satu dari 15 kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Kota Kabupaten ini terletak di Kecamatan Tebing Tinggi sebagai pusat kota. Sebelum tahun 2007. Kabupaten Empat Lawang masih menyatuh dengan Kabupaten Lahat. Kecamatan di Kabupaten Lahat awalnya terdiri dari 12 Kecamatan dengan luas wilayah 7251.93 km² atau 725.193 Ha yang terdiri dari Lahat, Merapi, Kikim, Tebing Tinggi, Pulau Pinang, Kota Agung, Pagar Alam, Tanjung Sakti, Jarai, Muara Pinang, Ulu Musi dengan jumlah penduduk 633.318 jiwa sebelum Kabupaten Empat Lawang memisahkan diri. Proses pembentukan Kabupaten Tersebut didasarkan pada sejarah dari masa kolonial Belanda pada tahun 1870 regeering Almanak yang diterbitkan di Belanda menyebutkan bahwa Pemerintah Kolonial Hindia Belanda menunjuk pusat Kota di Kecamatan Tebing Tinggi sebagai wilayah teritorial dan administratif sebagai zona ekonomi afdeling yang berada langsung dibawah karesidenan Palembang. Pada waktu Karesidenan Palembang dibagi menjadi 9 Afdelling yaitu :

1. Afdelling Palembang.
2. Afdelling Tebing Tinggi.
3. Afdelling Lematang Ulu dan Lematang Ilir.
4. Afdelling Komering Ulu.
5. Afdelling Rawas.
6. Afdelling Musi Ilir.
7. Afdelling Ogan Ilir dan Belida.
8. Afdelling Komering Ilir.
9. Afdelling Iliran dan Banyuasin.

Di era masa Hindia Belanda tahun 1870-1900, Tebing Tinggi saat ini menjadi pusat Kota di kabupaten Empat Lawang memegang peran sangat penting sebagai wilayah administratif

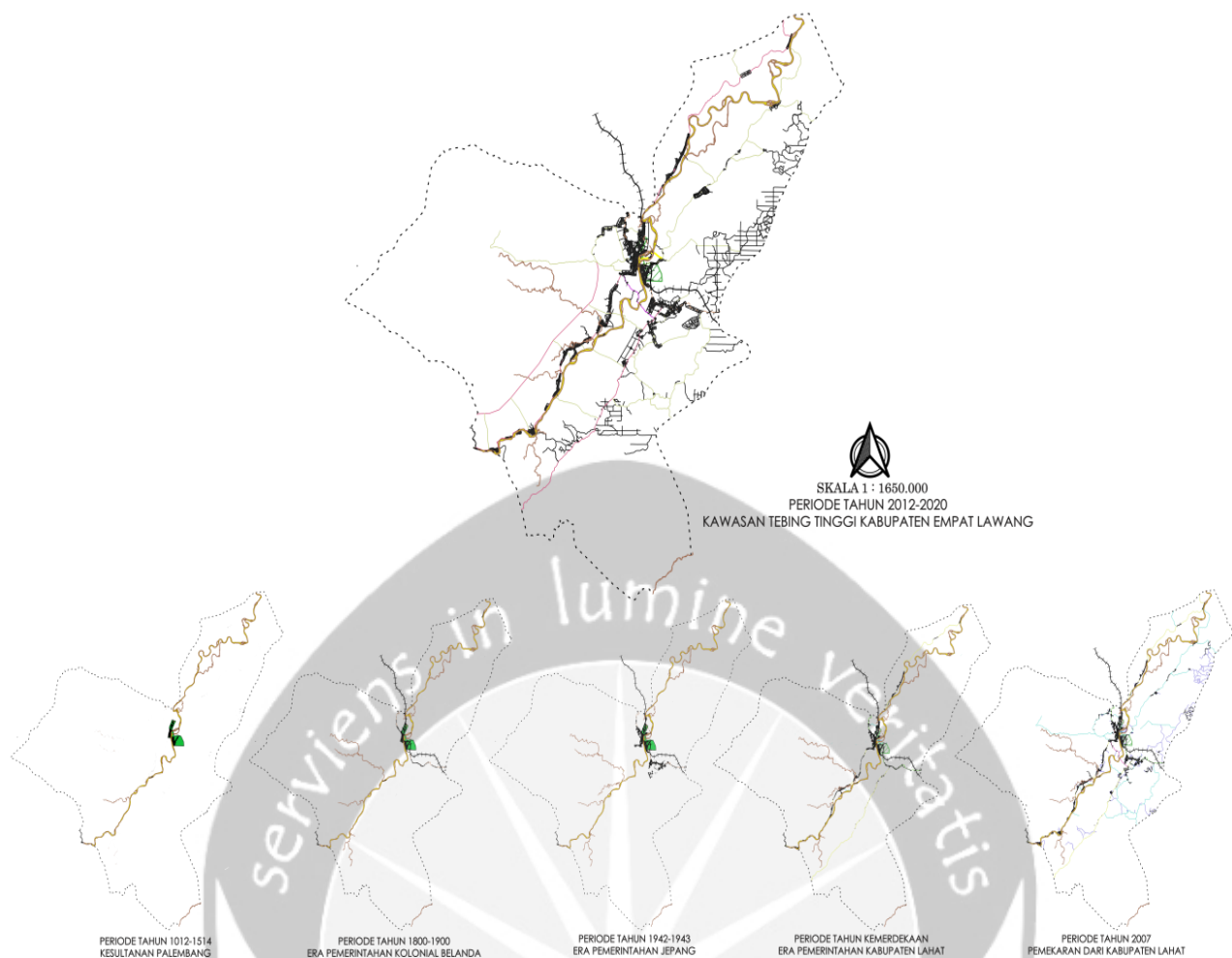
yaitu Afdelling sebagai lajur lalu lintas ekonomi karena letak kawasan yang strategis dan di masa penjajahan Jepang tahun 1942-1945, Tebing Tinggi berganti menjadi wilayah kewedanaan hingga akhirnya pada masa kemerdekaan menjadi bagian dari wilayah sekaligus Ibu Kota bagi Kabupaten Empat Lawang sampai saat ini.

Nama Kabupaten ini dari cerita rakyat berasal dari kata Empat Lawang yang berarti empat pendekar yang menjaga empat wilayah dilanjutkan munculnya semboyan Nedo Muno Mati Jadia yang berarti ini merupakan semboyan yang dipakai oleh Empat Pendekar yang berasal dari Lintang untuk menyelamatkan Sunan Palembang dari masa penjajah di tanah Sumatera. Adapun dalam salinan sejarah oleh pangeran H. Abu Bakar Bin H. Yen lahir pada tahun 1854 meninggal di tahun 1980 pangeran ke 12 yang berkuasa di daerah Lawang setelah adanya pangeran berdirinya kerajaan sriwijaya di sekitar Palembang dalam penjelasan sejarah mengenai tentang arti Empat Lawang (PROVINSI, 1981) yakni :

- Lawang Satu
- Lawang Dua
- Lawang Tiga
- Lawang Empat

Bentuk kawasan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang dapat dianalisis dari bentuk morfologi perkembangan sebelum dan sesudah terjadinya pemekaran. Awal perkembangan kawasan Tebing Tinggi yakni :

1. Periode tahun (1012-1514) sampai era Kesultanan Palembang.
2. Periode Pemerintah era Hindia Belanda tahun (1870-1900).
3. Periode Pemerintah Jepang tahun (1942-1945).
4. Periode Kemerdekaan sampai Pemerintahan Kabupaten Lahat.
5. Periode Pemekaran tahun 2007 Kabupaten Lahat – Kabupaten Empat Lawang.
6. Periode Tahun (2012-2020) Kawasan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.



Gambar 3. Peta Perkembangan Kawasan Tebing Tinggi Sebelum dan Setelah Pemekaran
Sumber: Analisis Penulis, 2020

ANALISIS MORFOLOGI KAWASAN TEBING TINGGI KABUPATEN EMPAT LAWANG

Pada dasarnya bentuk morfologi kota ditinjau dari 3 komponen menurut (Yunus, 2005) terdiri dari penggunaan lahan, pola jaringan jalan dan karakteristik bangunan, berdasarkan dari ketiga komponen ini memiliki peran atau kontribusi masing-masing dalam bentuk morfologi. Kawasan Tebing Tinggi didasari adanya bentuk *fragment cities* dan *split cities* kawasan berada pada jalan utama yakni jalan kolektor primer dan kolektor sekunder yang dimaksud dengan karakteristik penggunaan lahan perdagangan dan jasa dan kepadatan tinggi dan ini terletak di desa P.S Tebing Tinggi.

Table 1. Bentuk Morfologi Kawasan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang

Komponen Morfologi	Hasil Analisis
Pusat Kawasan	Pada pusat kawasan terletak di desa P.S Tebing Tinggi adanya sungai musi tepat berada di kawasan sehingga adanya antara ulu dan ilir dan ini tepat berada di pusat kota.
	Pola penggunaan lahan campuran dikarenakan

Pola Penggunaan Lahan	adanya perkebunan yang dikelola oleh masyarakat namun adanya perdagangan jasa dan fasilitas terdapat dikawasan ini dan penggunaan lahan permukiman terdapat mengelilingi perdagangan dan jasa.
-----------------------	--

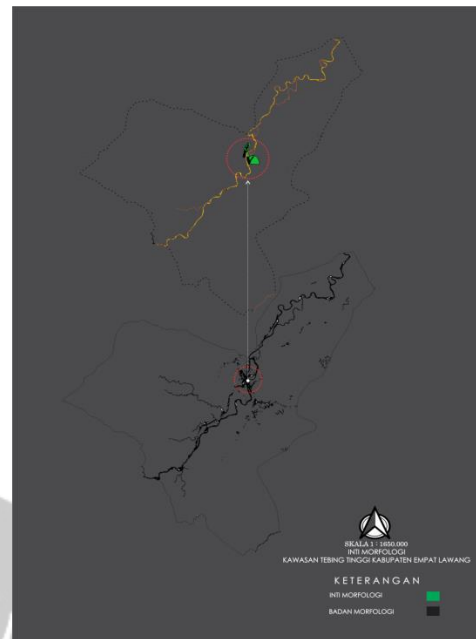
Pola Jaringan Jalan	Pola jaringan jalan berbentuk spinal atau bercabang dengan dimensi yang berbeda terdapat di kawasan ini.
---------------------	--

Kepadatan	Terpusat di kawasan di desa P.S Tebing Tinggi.
-----------	--

Pola Bangunan	Adanya heterogen terdapat kenampakan dua pola bangunan dengan dimensi yang berbeda.
---------------	---

Sumber : Analisis Penulis, 2020

Bagian inti yaitu pusat kawasan menandakan adanya konsentrasi aktivitas mempengaruhi kepadatan bangunan dan aktivitas komersial (perdagangan jasa). Pusat kawasan terhadap permukiman di Kecamatan Tebing Tinggi berada di sepanjang JL. Trans Sumatera Lahat-Lubuk Linggau dan pinggiran sungai antara ulu dan ilir karena adanya sungai yang berada di kawasan Tebing Tinggi.



Gambar 4. Inti Morfologi dan Badan Morfologi

Kawasan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang

Sumber: Analisis Penulis, 2020

Bagian badan, merupakan perkembangan terhadap bagian dari kerangka dikarenakan bagian badan ini identik dengan lahan terbangun dan perkembangan terhadap sekitar pusat kawasan kemudian mengikuti pola jalan spinal dan terindikasi terhadap kepadatan permukiman lebih rendah dibandingkan dengan kepadatan bagian inti (pusat kawasan). Pusat kota Kabupaten Empat Lawang mencirikan kenampakan morfologi yakni berbentuk fragment cities dan split cities yang berarti perluasan kota tidak menyatu dengan induk namun melainkan tersebar dan terbelah oleh perairan yang cukup lebar sehingga kota tersebut terdiri dari dua bagian terpisah dihubungkan oleh jembatan terdapat kawasan Tebing Tinggi merupakan sebagai pusat Kota Kabupaten Empat Lawang

PENGUNAAN LAHAN KAWASAN TEBING TINGGI KABUPATEN EMPAT LAWANG

Penggunaan lahan berawal berada di kawasan Tebing Tinggi dari tahun 1012-1514 sampai di masa penjajahan Jepang tahun 1942-1945, Tebing Tinggi berganti menjadi wilayah kewedanaan hingga akhirnya pada masa kemerdekaan menjadi bagian dari wilayah sekaligus merupakan menjadi pusat kawasan

Kota Kabupaten Empat sampai saat ini. Sedangkan terbentuknya kawasan permukiman berawal dari sepanjang tepian aliran sungai musi dan air lintang sampai saat ini permukiman di tepian sungai dengan luas area 20 ha pada masa saat itu. Perkembangan kawasan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang sebelumnya masih mencakup bagian dari Kabupaten Lahat, tahun 1996 kawasan Tebing Tinggi masih banyak hutan yang belum dikelola di masa itu dan untuk kawasan permukiman masih di dominasikan pada tepian sungai musi tepatnya berada di pusat kota sehingga adanya antara ulu dan ilir. Sedangkan di tahun 2006 catatan dari Kabupaten Lahat dalam angka mengatakan Kecamatan Tebing Tinggi memiliki 33 desa dan memiliki 48.578 jiwa, tata guna lahan mulai berkembang dengan adanya perdagangan dan jasa, permukiman sudah mulai meluas terjadi di kawasan ini tidak seperti tahun 1996 yang masih sedikit penyebaran permukiman, dimasa pemerintah Kabupaten Lahat menjadikan Kecamatan Tebing Tinggi sebagai kawasan pertanian dan perkebunan bagi masyarakat sebagai perekonomian.



Gambar 5. Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Pusat Kota Kabupaten Empat Lawang Tahun (2007-2019)

Sumber : Analisis Penulis, 2020

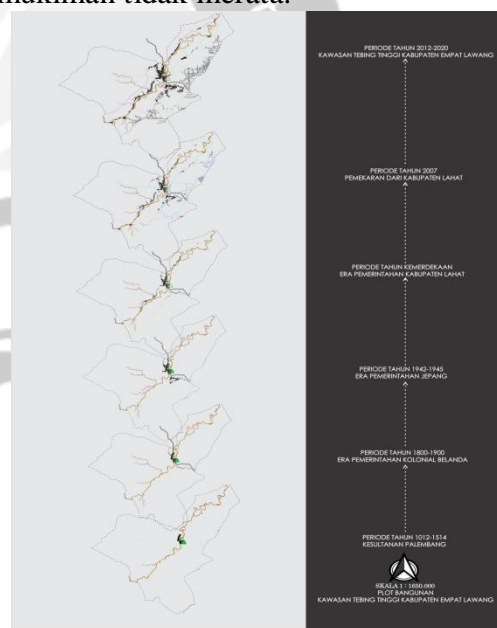
Hampir 95% rata-rata penduduk di Pusat Kota Kecamatan Tebing Tinggi berprofesi sebagai petani yakni Kelapa Sawit, Kopi, Karet, Durian dan Lada. Sedangkan 5% berprofesi yakni Pegawai Negeri Sipil, Buruh dan Perdagangan.

Berdasarkan (Lawang, 2019) mengenai penggunaan lahan di Kecamatan Tebing Tinggi terhadap sawah sebesar 2.074 ha dimana 720 ha irigasi sedangkan non irigasi

532 ha dan luas perkebunan 60.909 ha dan luas lahan non pertanian sebesar 914 ha. (Lawang, 2019) penggunaan lahan 24.626 ha di Kecamatan Tebing Tinggi, sekitar 23,15% merupakan lahan bukan pertanian, sedangkan lahan pertanian sebesar 76,85% yang terdiri atas 91,97% lahan pertanian bukan sawah dan 8,03% yakni lahan pertanian sawah.

ANALISIS PERUBAHAN PLOT-PLOT BANGUNAN KAWASAN TEBING TINGGI KABUPATEN EMPAT LAWANG

Perubahan plot-plot bangunan sebelum dan setelah pemekaran terjadi di kawasan Kecamatan Tebing Tinggi merupakan sebagai pusat kota Kabupaten Empat Lawang. Sebelum pemekaran menjadi Kabupaten Empat Lawang pola bangunan hanya terfokus di Desa Tebing Tinggi dikarenakan kawasan startegis bagi perekonomian, sehingga penyebaran pola bangunan terhadap permukiman tidak merata.



Gambar 6. Peta Plot Bangunan Sebelum dan Setelah Pemekaran Kawasan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang

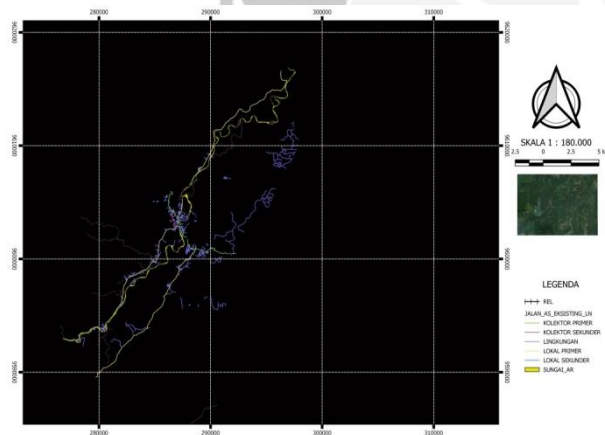
Sumber: Analisis Penulis, 2020

Periode tahun 2007 terjadinya pemekaran wilayah di Kabupaten Lahat yakni terfokus pada kawasan Kecamatan Tebing Tinggi sebelumnya kawasan ini luas area 590,93 Km2 setelah tahun 2012 adanya pemekaran wilayah di Kabupaten terjadi pada Kecamatan Saling

dan memberikan dampak perubahan luas area kawasan pusat kota menjadi 397,63 Km². Kepadatan bangunan tertinggi terdapat pada kawasan Tebing Tinggi merupakan sebagai pusat kota dikarenakan menghubungkan dengan jalan arteri dan jaringan jalan lokal. Seiring perkembangan peningkatan jumlah penduduk terjadi pada tahun 2016-2019 pemerintah Kabupaten Empat Lawang membuka akses jalan baru di desa Pajar Bakti, Tanjung Kupang, Terusan Lama sampai Desa Ujung Alih dapat menghubungkan dengan Kecamatan Pendopo sebagai jalur perekonomian bagi masyarakat

ANALISIS POLA JARINGAN JALAN KAWASAN TEBING TINGGI KABUPATEN EMPAT LAWANG

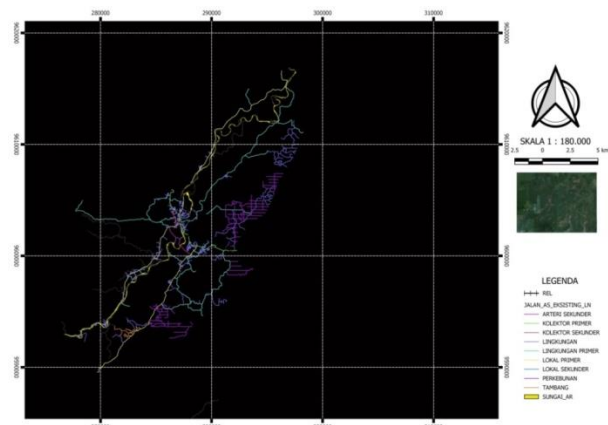
Pola jaringan jalan terhadap kawasan Tebing Tinggi merupakan sebagai pusat Kota Kabupaten Empat Lawang sebelum pemekaran dari Kabupaten Lahat terdapat jenis jaringan jalan yakni Kolektor Primer, Kolektor Sekunder, Lingkungan, Lokal Primer dan Sekunder.



Gambar 7. Peta Pola Jaringan Sebelum Pemekaran Kawasan Tebing Tinggi

Sumber: Analisis Penulis, 2020

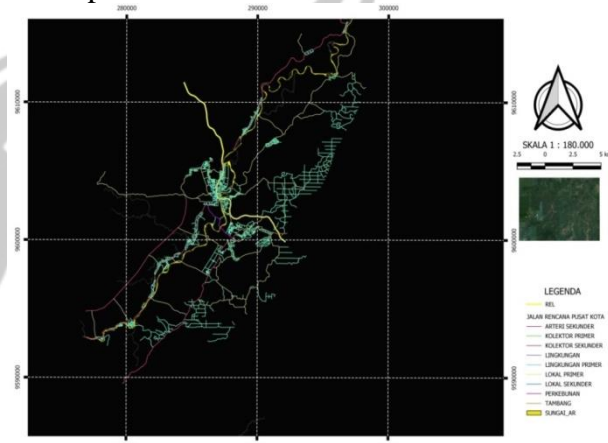
Sebelum pemekaran pola jaringan jalan hanya terfokus di Desa P.S Tebing Tinggi merupakan sebagai pusat kota kawasan ini terhubung dengan jalan kolektor primer bertujuan sebagai menghubungkan pusat-pusat kota dan pusat kegiatan di perkotaan.



Gambar 8. Peta Pola Jaringan Setelah Pemekaran Kawasan Tebing Tinggi Tahun (2009-2015)

Sumber: Analisis Penulis, 2020

setelah pemekaran adanya perkembangan munculnya pemukiman-pemukiman di Kecamatan Tebing Tinggi sehingga adanya pertambahan jaringan jalan baru terletak di desa Tanjung Kupang, Pajar Bakti, Ulak Mengkudu, Jaya Loka, Tanjung Kupang Baru dan Terusan Lama. Jaringan jalan tahun 2015-2020 adanya pertambahan akses dan perkembangan terhadap pusat kota di Kabupaten Empat Lawang terjadi di desa Lampar Baru, Seguring Kecil, Terusan Baru, Aur Gading, Batu Pancet, Ulak Mengkudu, Lubuk Gelanggang dan Ujung Alih kawasan ini berhubungan langsung dengan Kecamatan Pendopo.



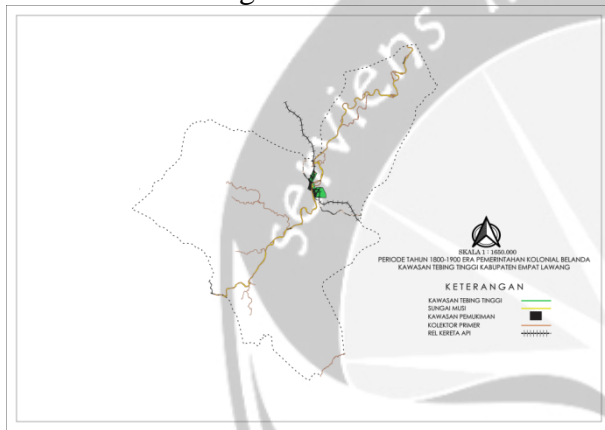
Gambar 9. Peta Pola Jaringan Kawasan Tebing Tinggi Tahun (2015-2020)

Sumber: BAPPEDA dan PUPR Kabupaten Empat Lawang, 2020

ANALISIS FAKTOR FISIK DAN NON FISIK MORFOLOGI KAWASAN TEBING TINGGI KABUPATEN EMPAT LAWANG

1. Analisis faktor fisik dan non fisik mempengaruhi terhadap perkembangan kawasan tebing tinggi periode tahun (1012-1514) era kesultanan Palembang periode tahun (1830)

Perkembangan kawasan berdasarkan adanya awal sejarah terjadinya kedatangan dari dataran Arab Saudi bermukim di kawasan Tebing Tinggi terletak di tepian sepanjang sungai musi kemudian mendirikan pemukiman sebagai tempat tinggal di kawasan tersebut. Perkembangan tahun 1012-1514 sampai era Kesultanan Kota Palembang.



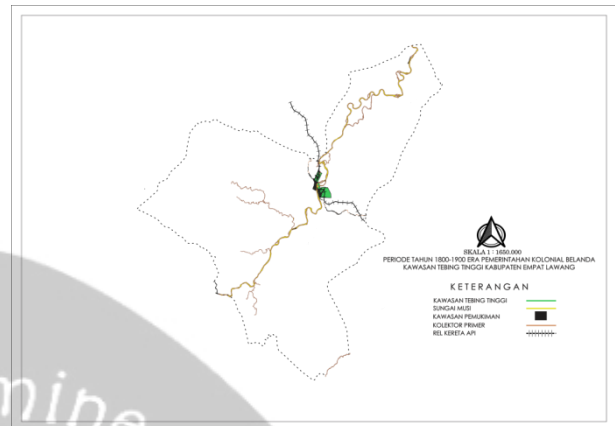
Gambar 10. Peta Perkembangan Kawasan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Periode Tahun (1870-1900) – Era Pemerintahan Hindia Belanda

Sumber : Analisis Penulis, 2020

periode tahun 1830 dominan terhadap faktor fisik, sosial budaya, religius selain itu adanya sektor perdagangan, jalan dan pertanian dimasa saat itu dan belum mengenal tentang politik. Elemen terhadap perkembangan kawasan Tebing Tinggi ditandai adanya pemukiman sampai kedatangan pemerintah Hindia Belanda pada tahun (1870-1900) memasuki dataran pulau Sumatera ke Indonesia.

2. Analisis Faktor Fisik dan Non Fisik Mempengaruhi Terhadap Perkembangan Kawasan Tebing Tinggi Pemerintahan Hindia Belanda Periode Tahun (1870-1900) Kawasan Tebing Tinggi perkembangan di era pemerintah Hindia Belanda bertujuan menjadikan kawasan P.S Tebing Tinggi

menjadi pusat kota dikarenakan sangat memegang penting sebagai wilayah administratif yaitu Afdelling sebagai lajur lalu lintas ekonomi karena letak kawasannya yang sangat strategis.



Gambar 11. Peta Perkembangan Kawasan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Periode Tahun (1870-1900) – Era Pemerintahan Hindia Belanda

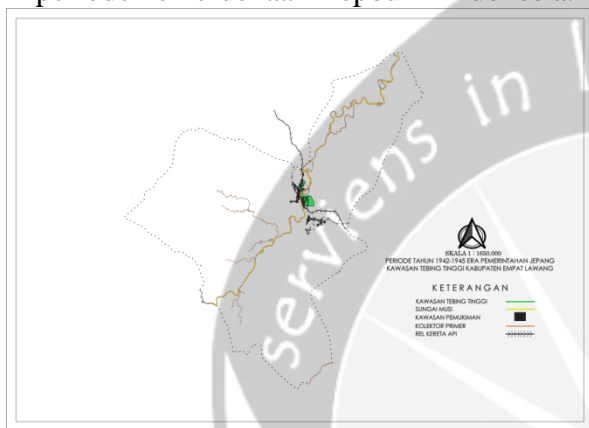
Sumber : Analisis Penulis, 2020

Pada periode ini kawasan Tebing Tinggi merupakan sebagai pusat Kota Kabupaten Empat Lawang dikembangkan menjadi kota pemerintah adanya bangunan tempat tinggal dan benteng pertahanan berorientasi menghadap ke arah tepian sungai musi terletak di Desa P.S Tebing Tinggi. Pengaruh terhadap pusat kota adanya indikator yakni faktor ekonomi dan politik, faktor ekonomi merupakan adanya perdagangan seperti pasar maupun permukiman penduduk yang berorientasi mengarah ke sungai musi. Sedangkan faktor politik ini memicu munculnya kantor-kantor pelayanan di pusat kota Tebing Tinggi pada masa pemerintah Hindia Belanda. Selain faktor ekonomi dan politik perkembangan kawasan Tebing Tinggi ditandai dengan adanya pembangunan jaringan kereta api di masa pemerintah Hindia Belanda sebagai fasilitas penunjang kebutuhan militer dan pemerintahan

3. Analisis Faktor Fisik dan Non Fisik Mempengaruhi Terhadap Perkembangan Kawasan Tebing Tinggi Pemerintahan Jepang Periode Tahun (1942-1945)

Pada masa penjajahan Jepang tahun (1942-1945) Tebing Tinggi berganti menjadi wilayah kewedanaan yakni mempengaruhi terhadap perkembangan pusat kota berfokus

pada pusat pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Perkembangan terhadap kawasan Tebing Tinggi di era Pemerintahan Jepang hanya meneruskan pembangunan dari Hindia Belanda di kawasan Tebing Tinggi. sedangkan terhadap elemen perkembangan kota ditandai adanya pembangunan terowongan kereta api dan rumah ibadah. Pemerintah era Jepang di kawasan Tebing Tinggi untuk pembangunan tidak dominan hanya memanfaatkan bangunan era Hindia Belanda, pada saat itu hanya terfokus di sektor pertanian dan perkebunan sampai di periode kemerdekaan Republik Indonesia.



Gambar 12. Peta Perkembangan Kawasan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Periode Tahun (1942-1945) – Era Pemerintah Jepang

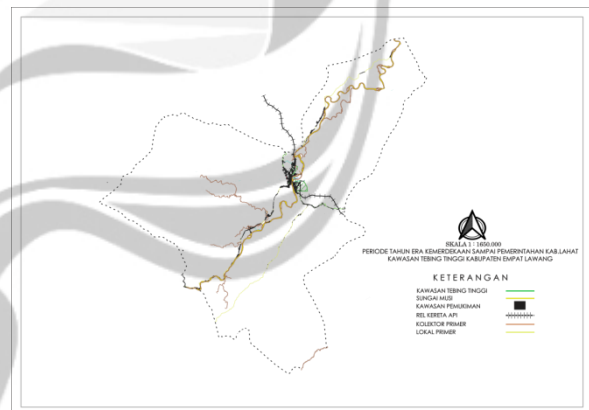
Sumber : Analisis Penulis, 2020

4. Analisis Faktor Fisik dan Non Fisik Mempengaruhi Terhadap Perkembangan Kawasan Tebing Tinggi Periode Kemerdekaan – Pemerintah Kabupaten Lahat

Di era kemerdekaan kawasan Tebing Tinggi menjadi bagian dari wilayah dari Kabupaten Lahat, setelah pasca kemerdekaan adanya otonomi daerah bermaksud sebagai pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan penggunaan terhadap sumber daya nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun mempercepat pembangunan terhadap perkembangan wilayah telah diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan telah diperbaharui oleh UU No. 32 Tahun 2004. Terbentuk wilayah kawasan Tebing Tinggi tahun 1956 merupakan satu induk

wilayah dengan Kabupaten Lahat, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Lahat mencatat tahun (2001-2005) bahwa perkembangan terhadap pusat kota Tebing Tinggi dominan lebih mengarah faktor non fisik yakni terkait dengan bidang perkebunan dan pertanian meliputi seperti kelapa sawit dan kopi yang mempengaruhi perkembangan perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Adapun catatan secara makro terhadap perkembangan selama di Kabupaten Lahat (Lahat, 2006). Pada tahun 2002 timbulnya wacana pemekaran wilayah di Kabupaten Lahat sampai tahun 2006-2007 terbentuknya Kabupaten baru hasil dari pemekaran wilayah yakni berdampak dengan Kecamatan Tebing Tinggi merupakan sebagai pusat kota Kabupaten Empat Lawang, hal ini berpengaruh terhadap faktor politik (faktor non fisik), selain itu mengakibatkan adanya perubahan yakni :

1. Perubahan Tata Guna Lahan.
2. Perubahan Jaringan Jalan.
3. Ekonomi.
4. Pemukiman.



Gambar 13. Peta Perkembangan Kawasan Tebing Tinggi Periode Kemerdekaan Sampai Pemerintahan Kabupaten Lahat

Sumber : Analisis Penulis, 2020

5. Analisis Faktor Fisik dan Non Fisik Mempengaruhi Terhadap Perkembangan Kawasan Tebing Tinggi Periode Tahun (2007-2020)

Pada periode tahun 2007 resmi terbentuknya Kabupaten baru dimana telah disahkan berdasarkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Pembentukan Kabupaten

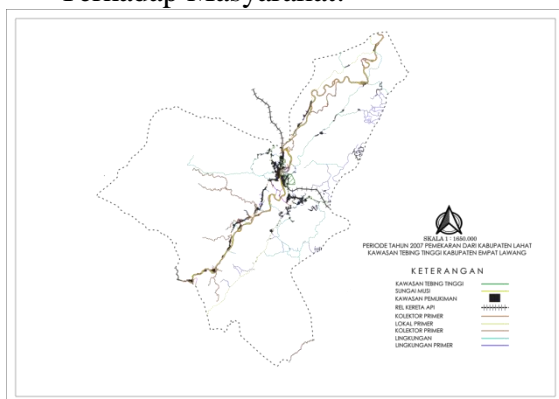
Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan, perkembangan pusat kota lebih dipengaruhi oleh faktor politik (non fisik) dikarenakan adanya awal pemilihan Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) di pusat kota. Hal ini bertujuan untuk mengatur sistem pemerintahan, tata guna lahan, ekonomi, kepemilikan tanah, sosial dan budaya sehingga perkembangan kota lebih terarah. Periode pertama perkembangan terhadap pusat kota Kabupaten Empat Lawang adanya dinamika-dinamika politik terjadi yakni adanya pemekaran kecamatan di pusat kota sebelumnya. Periode tahun 2012 pemekaran terhadap kecamatan Tebing Tinggi dikarenakan luas administrasi terlalu luas sebelumnya 590,93 Km² setelah pemekaran wilayah menjadi kawasan pusat kota menjadi 397,63 Km² berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 02 Tahun 2012 Pembentukan wilayah baru yakni Kecamatan Saling. Dari pemerkan wilayah perkembangan pusat kota berdampak secara segi positif dan negatif yakni :

1. Dampak positif

- Aspek Kesehatan.
- Administrasi Pemerintahan Kecamatan.
- Aspek Ekonomi.
- Aspek Sarana dan Prasarana.

2. Dampak Negatif

- Terjadinya Penyempitan Lahan.
- Adanya Pembagian Aset.
- Tidak Ada Ganti Rugi Kepemilikan Tanah.
- Adanya Tindakan Diskriminasi Terhadap Masyarakat.



Gambar 14. Peta Perkembangan Kawasan Tebing Tinggi Periode Tahun 2007 Pemekaran dari Kabupaten Lahat

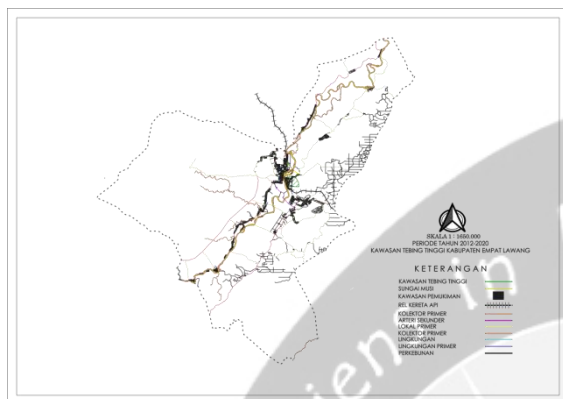
Sumber : Analisis Penulis, 2020

Menurut (Kartodirdjo, 1999) mengemukakan bahwa pemekaran dapat bertujuan membangun dan meningkatkan suasana kekeluargaan yang harmonis terhadap antar warga serta dengan jumlah penduduk proporsional dapat membangun kehidupan masyarakat yang berpartisipasi terhadap pembangunan. Adapun berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Kabupaten atau Kota. Kecamatan terdiri dari atas desa-desa atau Kelurahan-kelurahan. Kecamatan dan Kelurahan merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah Kabupaten/Kota bertujuan lembaga pada pemerintahan daerah yang bertanggung jawab kepala daerah atau membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan daerah diantara untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Besarnya jumlah penduduk di kawasan Tebing Tinggi merupakan sebagai pusat Kota dari tahun 2007-2011 dikarenakan sebelum terjadi pemekaran Kecamatan berdasarkan data (Lawang, 2019) pertumbuhan penduduk di Kecamatan tebing Tinggi sebagai pusat kota yakni sebesar setiap tahunnya 2,84 sampai 5,44 persen perkembangan terhadap laju pertumbuhan penduduk pusat kota.

Hal ini mempengaruhi perkembangan pusat kota non fisik (pembangunan manusia) munculnya pemukiman-pemukiman yang baru sebagai adanya perpindahan penduduk dari luar Kota Kabupaten Empat Lawang serta meningkatnya angka kelahiran. Selain faktor non fisik adapun faktor fisik yang mempengaruhi memberikan ruang bagi laju pertumbuhan penduduk adanya pembangunan jaringan jalan pada kawasan wilayah Kecamatan Tebing Tinggi dan ini telah dilakukan sejak pada tahun 2015 bertujuan untuk pembangunan yang merata tidak hanya terfokus di bagian ilir wilayah pusat kota. Sedangkan terhadap faktor ekonomi struktur ekonomi masih

didominasi oleh adanya lapangan usaha, perkebunan, pertanian, kehutanan dan perikanan hal ini yang menjadi faktor non fisik (ekonomi) sebagai roda perekonomian bagi masyarakat dan berdampak terhadap Kabupaten Empat Lawang sehingga ada kenaikan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,12 % dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara makro 65,1%.



Gambar 15. Peta Perkembangan Periode (2012-2020) Kawasan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang
Sumber : Analisis Penulis, 2020

Table 2. Elemen-Elemen Perkembangan Kawasan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang

No	Perkembangan Kawasan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Menurut Periode dan Elemen-Elemen Perkembangan Kota
1	<p>Periode tahun (1012-1514) sampai era Kesultanan Palembang tahun 1830</p> <p>Periode awal perkembangan ditandai pemukiman-pemukiman penduduk sepanjang tepian Sungai Musi pada kawasan Tebing Tinggi.</p>
2	<p>Periode Pemerintah era Hindia Belanda tahun (1870-1900)</p> <p>Periode era Hindia Belanda ditandai dengan pembangunan-pembangunan yakni adanya tugu titik nol, bangunan pemerintah, benteng pertahanan, stasiun kereta api, terowongan kereta api, jembatan penghubung antara Ulu dan Ilir, pemukiman penduduk tepian Sungai Musi selama era Hindia Belanda</p>

	tidak ada perubahan baik secara bentuk tipologi bangunan.
3	<p style="text-align: center;">Periode Pemerintah Jepang tahun (1942-1945)</p> <p>Periode pemerintahan Hindia Belanda berakhir dengan kedatangan Jepang secara perkembangan kawasan mengenai dampak terhadap elemen-elemen kota tidak adanya perubahan secara signifikan hanya memanfaatkan peninggalan bangunan-bangunan pada masa itu baik antara wilayah kawasan Ulu dan Ilir Desa P.S Tebing Tinggi, masa era Jepang hanya membangun jaringan jalan sehingga menghubungkan dengan wilayah Kabupaten Lahat.</p>
4	<p style="text-align: center;">Periode Kemerdekaan sampai Pemerintahan Kabupaten Lahat</p> <p>Setelah pasca pemerintah Hindia Belanda dan pemerintah Jepang timbulnya periode kemerdekaan sampai pemerintahan Kabupaten Lahat elemen-elemen terhadap perkembangan di masa kemerdekaan tidak ada perubahan dibandingkan masa pemerintah Kota Lahat kawasan Tebing Tinggi hilangnya tugu titik nol kilometer sebelum di masa Kolonial dan Jepang, adanya penambahan seperti pasar Tebing Tinggi, jembatan dan jaringan jalan. Elemen-elemen tetap di era Hindia Belanda masih bertahan sampai masa pemerintahan Kabupaten Lahat.</p>
5	<p style="text-align: center;">Periode Pemekaran tahun 2007 - 2020 Kawasan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang</p> <p>Elemen-elemen perkembangan kota kawasan Tebing Tinggi periode tahun 2007 merupakan hasil dari pemekaran wilayah dari Kabupaten Lahat merupakan induk pusat kota, bangunan-bangunan tetap dari peninggalan era Hindia Belanda dialihkan menjadi fungsi rumah dinas kantor Bupati yang bersifat kegiatan pemerintah dan titik nol kilometer pada kawasan dijadikan tempat kantor layanan publik. Sampai tahun 2007 – 2020 bangunan era Hindia Belanda tidak ada perubahan baik secara bentuk maupun material sampai pemukiman-pemukiman penduduk tepian Sungai Musi tidak perubahan. Setelah periode pertama dari pemekaran ditandai adanya bangunan kawasan pemerintah dibagian wilayah Ilirnya kawasan Tebing Tinggi seperti tugu emas, jembatan kuning, kantor bupati. Adanya pemekaran tahun 2012 hal ini mempengaruhi elemen-elemen terbentuknya di kawasan Tebing Tinggi. secara bentuk kawasan pemukiman-pemukiman penduduk antara Ulu dan Ilir kawasan memiliki secara arsitektural mempunyai perbedaan. Untuk Desa Kemang Manis sampai Desa Batu Pancet bangunan-bangunan pemukiman masih bentuk tradisional dan menggunakan material kayu terletak bagian Ulu Tebing Tinggi, sedangkan bagian Ilir elemen-elemen perkembangan kota sudah mengarah modern hal ini ditandai adanya kawasan bangunan pemerintah.</p>

Sumber : Analisis Penulis, 2020

KESIMPULAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan adanya indikator-indikator yang mempengaruhi terhadap perkembangan sampai terbentuknya wilayah pusat kota adalah kedatangan bangsa dari daratan Saudi Arabia dan Empat Pendekar periode tahun (1012-1514) sampai era kesultanan Kota Palembang periode tahun (1830), Pemerintahan Hindia Belanda periode tahun (1870-1900), Pemerintahan Jepang periode tahun (1942-1945) sampai kemerdekaan Republik Indonesia, terbentuknya wilayah Kecamatan Tebing Tinggi periode tahun 1959, Pemerintah Kabupaten Lahat sampai periode tahun 2006, periode tahun 2007 terbentuknya Kabupaten Empat Lawang dan berpusat kota di Kecamatan Tebing Tinggi dari Kabupaten Lahat, periode tahun (2007-2012) adanya pemekaran wilayah Kecamatan Tebing dan adanya Kecamatan Saling sampai periode tahun (2012-2020) berdampak terhadap faktor ekonomi, sosial, politik dan budaya terhadap perkembangan kawasan Tebing Tinggi, hal ini ditandai dengan elemen-elemen perkembangan terhadap pusat Kota Kabupaten Empat Lawang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima Kasih saya ucapkan kepada Bapak Amos Setiadi selaku dosen pembimbing dalam penelitian ini dan seluruh dosen magister arsitektur di Universitas Atma Jaya Yogyakarta maupun kepada Pemerintahan Kabupaten Empat Lawang atas izin untuk penelitian. Semoga jurnal ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang menggunakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Allain, R. (2004). Urban Morphology : Geografi, Management and architecture of the city. *Management and architecture of the city*, 254.
- Carmona, e. a. (2003). *Public Spaces – Urban Spaces, the dimension of urban design*. Skotlandia: The Architectural Press.
- Hendarto, R. M. (1997). Teori Perkembangan dan Pertumbuhan Kota. *Makalah*, 50-56.
- Hillier B, H. J. (1984). *The social logic of space*. United Kingdom: Cambridge University Press.

- Kaiser, e. a. (1995). *Urban Land use Planning. 4th Edition*. Chicago: Univeristy of Illinois.
- Kartodirdjo, S. (1999). *Multidimensi pembangunan bangsa : etos nasionalisme dan negara kesatuan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Krier, R. (1979). *Urban Space*. London: Academy Editions.
- Kuntowijoyo. (2008). *Metodologi Sejarah Edisi Kedua*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Lawang, B. K. (2019). *Kecamatan Tebing Tinggi Dalam Angka 2019*. Kabupaten Empat Lawang: BPS Kabupaten Empat Lawang.
- Lefebvre, H. (1901-1991). *The Urban Question*. Prancis: The Production of Space.
- PROVINSI, D. T. (1981). *RISALAH SEJARAH PERJ UANGAN SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II*. Palembang: team perumus hasil-hasil diskusi sejarah perjuangan Sultan Mahmud Badaruddin II.
- Rossi, A. (1982). *The Architecture of The City*. Cambridge: The MIT Press.
- Suprijanto, I. (1996). *Fenomenologi melalui Sinkronik–Diakronik Suatu Alternatif Pendekatan untuk Menjelajahi Esensi Arsitektur Nusantara*. Semarang: SIMPOSIUM NASIONAL dalam Rangka Dies Natalies 34 Arsitektur–FTSP.
- Yunus, H. S. (2005). *Manajemen Kota*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.